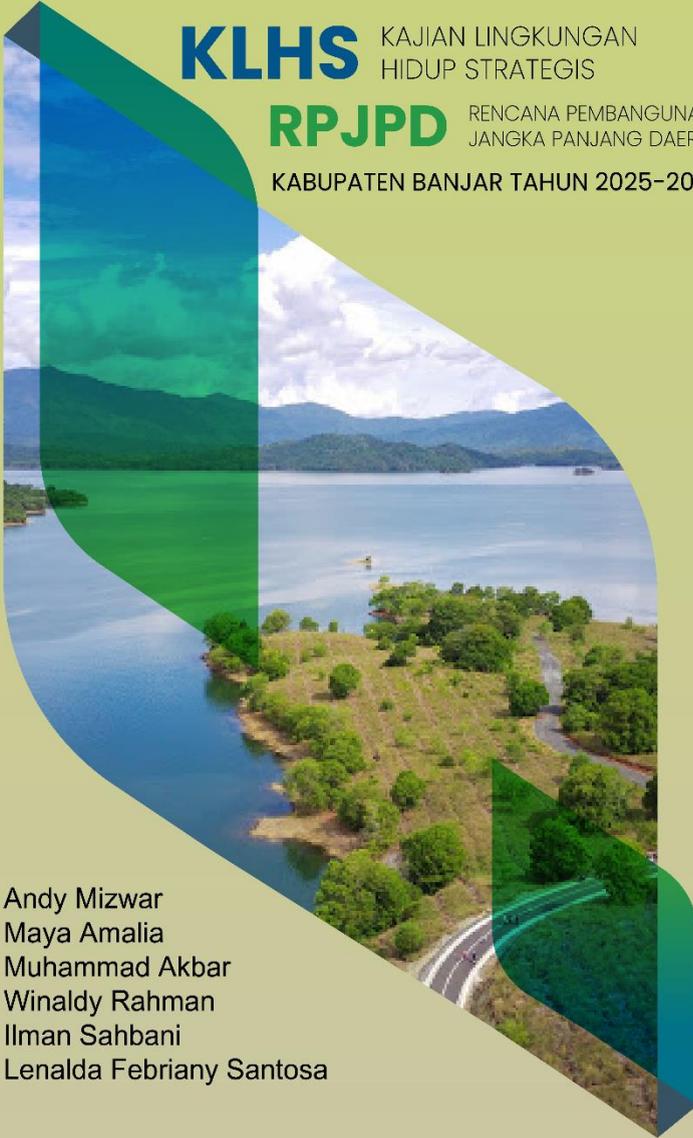


KLHS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RPJPD RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2045



— KLHS RPJPD

Andy Mizwar
Maya Amalia
Muhammad Akbar
Winaldy Rahman
Ilman Sahbani
Lenalda Febriany Santosa

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banjar 2025 - 2045**

**Andy Mizwar
Maya Amalia
Muhammad Akbar
Winaldy Rahman
Ilman Sahbani
Lenalda Febriany Santosa**



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banjar 2025 - 2045**

Penulis:

Andy Mizwar
Maya Amalia
Muhammad Akbar
Winaldi Rahman
Ilman Sahbani
Lenalda Febriany Santosa

Cetakan Pertama:

PENERBIT:

ULM Press, 2024

d/a Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan ULM

Lantai 2 Gedung Perpustakaan Pusat ULM

Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin 70123

Telp/Fax. 0511 - 3305195

ANGGOTA APPTI (004.035.1.03.2018)

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin

tertulis dari Penerbit, kecuali

untuk kutipan singkat demi penelitian ilmiah dan resensi

I - V + 50 hal, 15,5 × 23 cm

Cetakan Pertama. ... 2024

ISBN : ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar 2025-2045*. Buku ini merupakan hasil kerjasama UPA Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sangat membantu dalam pembuatan buku ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang terlibat dalam Kelompok Kerja KLHS RPJPD Kabupaten Banjar.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan yang membangun dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas buku ini. Terima kasih.

Oktober, 2024

Penulis

PRAKATA

Dalam buku *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar 2025-2045* ini dijelaskan tentang daya dukung dan daya tampung daerah Kabupaten Banjar, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045. Kami berusaha menghadirkan analisis yang komprehensif dan menyeluruh, mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Buku ini ditujukan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai panduan dalam menyusun RPJPD yang baru, namun juga relevan untuk kalangan luas yang ingin memahami tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Melalui analisis data dan rekomendasi yang disampaikan, kami berharap buku ini dapat menjadi acuan strategis yang berharga dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk mempertahankan daya dukung lingku-

ngan hidup agar tetap mampu mendukung aktivitas sosial-ekonomi dan pembangunan di masa depan.

Semoga karya ini memberikan manfaat yang nyata dan menjadi bagian dari upaya kolektif kita untuk membangun daerah yang lebih baik, serta menginspirasi berbagai pihak untuk terus memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang.

Oktober, 2024

Penulis

SINOPSIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar 2025-2045 merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui analisis menyeluruh, buku ini menyoroti capaian dan tantangan pembangunan daerah selama periode RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025 dan memperkenalkan kerangka strategis untuk RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembahasan utama dalam buku ini mencakup analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045

juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi Kabupaten Banjar pada masa depan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Prakata	ii
Sinopsis	iv
Daftar Isi	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
Bab 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Perencanaan Pembangunan Daerah	6
A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	6
B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	9
C. KLHS dalam Rencana Pembangunan Daerah ...	12
Bab 3 Kondisi Umum Kabupaten Banjar	20
A. Batas dan Luas Wilayah Administrasi	20
B. Batas dan Luas Wilayah Fungsional	22
C. Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Banjar	25
D. Daya Dukung dan Daya Tampung LH	27
E. Kuadran Pembangunan Berkelanjutan	29
F. Ringkasan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025	34
Bab 4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banjar	49
A. Penapisan Indikator TPB yang Relevan	49
B. Analisis Capaian Indikator TPB	52

C. Proyeksi Capaian Indikator TPB	53
D. Rekapitulasi Data Capaian Indikator TPB	55
Bab 5 Perumusan Isu Pembangunan	
Berkelanjutan Strategis	59
A. Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB	59
B. Isu PB Berdasarkan Perencanaan Strategis	64
C. Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Hasil Konsultasi Publik	67
D. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan	68
E. Analisis Isu Prioritas	70
Bab 6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi	73
A. Tanpa Upaya Tambahan	73
B. Dengan Upaya Tambahan	73
Bab 7 Kesimpulan	116
Daftar Pustaka	120
Glosarium	122
Profil Penulis	123
Sinopsis Buku	127

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Selama periode RPJPD 2005-2025, pembangunan Kabupaten Banjar telah mencatat beberapa capaian penting di berbagai bidang [1]. Di bidang ekonomi, laju pertumbuhan PDRB tahun 2022 mencapai 4,48%. Angka tersebut meningkat dari laju pertumbuhan PDRB tahun 2021 (3,21%) dan 2020 (-1,96%) yang terimbas kondisi pandemi Covid-19, namun cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB tahun 2005 (5,46%). Sementara itu, PDB per-kapita Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang sangat signifikan (402,15%). Pada tahun 2005 PDB per-kapita Kabupaten Banjar tercatat sebesar Rp. 7,2 juta, lalu masing-masing meningkat menjadi Rp. 15 juta pada tahun 2010, Rp. 22,5 juta pada tahun 2015, Rp. 31,3 juta pada tahun 2021 dan Rp. 36,3 juta pada tahun 2022. Pencapaian indikator makro tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Banjar menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Seiring kondisi perekonomian yang baik, capaian pembangunan Kabupaten Banjar di sisi kesejahteraan penduduk juga menunjukkan kondisi yang membaik. Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar mengalami penurunan dari 5,18% pada tahun 2005 menjadi 2,88% pada tahun 2022. Kondisi tersebut diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,63% di tahun 2015 menjadi 2,72 di

tahun 2022 [2]. Sementara itu, Pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Banjar juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Menurut data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar tahun 2005 sebesar 68 dan naik hampir tiga poin menjadi 70,72 pada tahun 2022. Peningkatan IPM ini merupakan hasil dari peningkatan Usia Harapan Hidup (65,97 di tahun 2016 menjadi 67,41 di tahun 2021), lama sekolah (6,93 di tahun 2012 menjadi 7,71 di tahun 2022), serta peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan melalui peningkatan konsumsi per kapita [2].

Namun demikian, perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjar masih mengandalkan komoditas berbasis sumber daya alam, sehingga setiap kebijakan ekonomi yang diambil dan dijalankan akan memberikan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar 4 tahun terakhir memang mengalami sedikit peningkatan. Namun kualitas air secara absolut mengalami penurunan, sedangkan kualitas tutupan lahan dan hutan, serta kualitas udara menunjukkan sedikit perbaikan [3]. Gambaran tren IKLH tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan masih kurang memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tahun 2024 menandai penyelenggaraan RPJPD 2005-2025 akan segera berakhir dan akan dimulainya penyusunan RPJPD 2025-2045. Seluruh tahapan penyusunan RPJPD 2025-2045 diatur melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5113/Bangda tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka pemerintah Kabupaten Banjar melakukan pembuatan KLHS untuk RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 sebagai wujud komitmen skenario pembangunan berkelanjutan 20 tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD 2025-2045 nantinya akan digunakan sebagai pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 untuk menyusun visi, misi dan program, serta sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

KLHS RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJPD. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), yang berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD). Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD bersifat *ex-ante* atau dilakukan sebelum perumusan kebijakan rencana dan program (KRP), dan menjadi satu kesatuan dalam proses pembuatan RPJPD.

Secara teknis, pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 mengacu pada Pedoman Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023) dan dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 adalah untuk memastikan bahwa isu dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2025-2045.

Tujuan pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 adalah :

- 1) Menganalisis daya dukung dan daya tampung daerah Kabupaten Banjar;

- 2) Menganalisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 2005 – 2025;
- 3) Merumuskan alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB.

Bab 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Brundtland Report (1987) menjadi titik awal dalam pemahaman dan pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia [4]. *Brundtland Report* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang". Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, sehingga pembangunan harus memperhitungkan interaksi kompleks antara tiga dimensi ini. Selain itu, *Brundtland Report* juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Hal ini mencakup kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan [5].

Brundtland Report kemudian ditindaklanjuti dalam KTT Bumi (*Earth Summit*) atau Konferensi Rio (*Rio Conference*) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 170 negara dan menghasilkan berbagai dokumen penting yang membahas isu-isu lingkungan dan pembangunan, termasuk "*Rio Declaration*" yang menjadi salah satu landasan utama dalam pembentukan konsep dan

prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Konferensi Rio 1992 juga menghasilkan rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai “*Agenda 21*”. Dokumen ini menetapkan prinsip, tujuan dan tindakan konkret yang harus diambil oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan [6].

Mengacu pada prinsip dan tujuan “*Agenda 21*”, pada September 2000 bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations Millennium Summit* (UNMS) di Amerika Serikat, PBB memperkenalkan *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai bagian dari upaya untuk memajukan pembangunan global dan meningkatkan kesejahteraan manusia terutama di negara-negara berkembang, hingga tahun 2015. MDGs mencakup delapan tujuan yang saling terkait, meliputi (1) pengentasan kemiskinan, (2) peningkatan pendidikan, (3) pemerataan gender, (4) penurunan angka kematian anak, (5) perbaikan kesehatan ibu, (6) pengendalian penyakit menular, (7) perlindungan lingkungan, dan (8) kemitraan global untuk pembangunan [7]. Implementasi MDGs telah memberikan dorongan signifikan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Berbagai negara telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs, meskipun tingkat kemajuannya bervariasi di berbagai wilayah.

Pada tahun 2015, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dideklarasikan bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di kantor PBB, New York, Amerika Serikat. SDGs diperkenalkan

sebagai pengganti MDGs dan menjadi penanda tahap baru dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan. SDGs mencakup 17 tujuan yang saling terkait, meliputi (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan, yang diadopsi oleh PBB sebagai bagian dari "*Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030*". Agenda 2030 didasarkan pada prinsip tidak meninggalkan siapa pun di belakang (*leave no one behind*), universalitas dan tanggung jawab bersama.

Berbeda dengan MDGs yang merupakan ramuan para pakar negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional, SDGs merupakan hasil kesepakatan 193 negara anggota PBB yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, SDGs membidik masalah-masalah yang lebih beragam dan detail, serta menysasar seluruh penduduk pada semua kelompok usia dan latar belakang dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi [8]. Untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan dan target SDGs, telah dibuat

serangkaian indikator yang terukur dan terverifikasi. Secara total, terdapat 241 indikator (247 indikator sejak tahun 2020) dan 169 target-sasaran dalam 17 tujuan SDGs. Hal ini membantu negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melacak kemajuan capaian SDGs dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan.

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, konsep SDGs diterjemahkan sebagai "*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*" yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB dirangkum ke dalam 4 pilar pembangunan, 17 tujuan global, 94 sasaran global dan 207 sasaran nasional yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan Indonesia sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

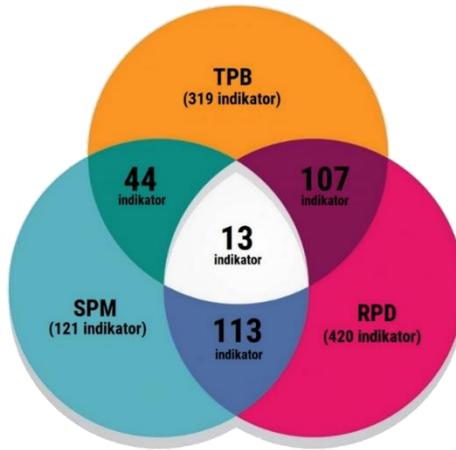
Untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB, Kementerian Perencanaan Pempa-

ngunan Nasional/Bappenas menerbitkan “Metadana Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia” (versi I - Juli 2017). Metadana ini dikembangkan berdasarkan metadana SDGs yang diterbitkan oleh *Department of Economic and Social Affairs* (DESA) PBB (versi Maret 2016). Metadana indikator TPB Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) Metadana Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup tujuan TPB 1, 2, 3, 4, dan 5; (2) Metadana Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup tujuan TPB 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) Metadana Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup tujuan TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4) Metadana Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola untuk tujuan TPB 16. Secara total, indikator TPB Indonesia meliputi 169 target dan 319 indikator, terdiri dari 85 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 166 indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 68 indikator nasional sebagai tambahan indikator global [9].

Integrasi TPB ke dalam perencanaan pembangunan Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengintegrasian TPB dalam

perencanaan pembangunan Indonesia dilakukan dengan cara menyelaraskan indikator dan target TPB ke dalam indikator kinerja pembangunan daerah yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Berdasarkan hasil penyelarasan diketahui bahwa dari 420 indikator kinerja pembangunan daerah terdapat 107 indikator (25,48%) yang identik dengan indikator TPB [10].

Peraturan lain yang mendukung integrasi TPB ke dalam perencanaan pembangunan Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM berkaitan dengan pelayanan dasar (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) sosial dengan berbagai target dan indikatornya masing-masing. Berdasarkan hasil penyelarasan diketahui bahwa dari 121 indikator SPM terdapat 44 indikator (36,36%) yang identik dengan indikator TPB dan 113 indikator (93,39%) yang identik dengan indikator kinerja pembangunan daerah [10]. **Gambar 1** menunjukkan irisan antara indikator TPB, indikator SPM dan indikator rencana pembangunan daerah (RPD).



Gambar 1. Irisan antara indikator TPB, indikator SPM dan indikator rencana pembangunan daerah (RPD)

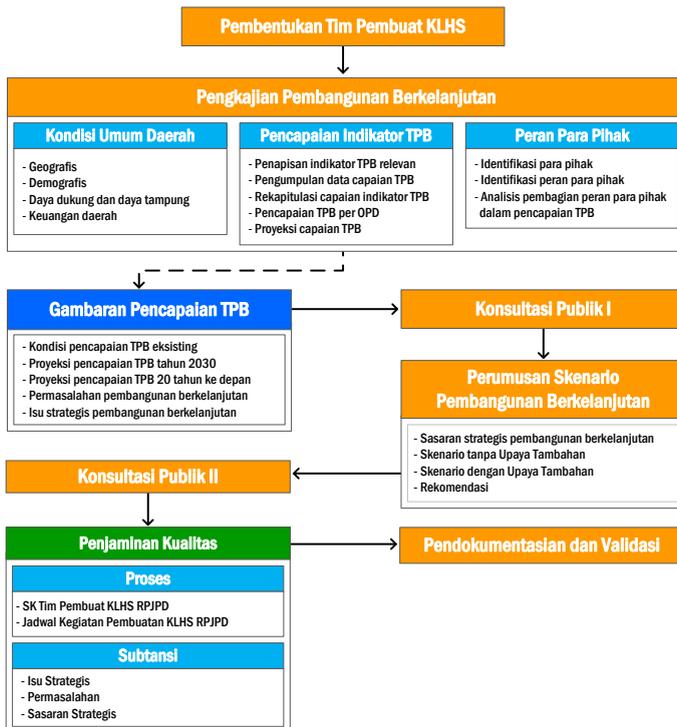
C. KLHS dalam Rencana Pembangunan Daerah

Pelaksanaan TPB di daerah bermakna bahwa pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan seluruh proses pembangunan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Sesuai dengan semangat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka pemerintah daerah wajib melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tindak lanjut dari amanat tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Permendagri No. 07 Tahun 2018 memuat 475 indikator TPB yang harus diadopsi dalam proses penyusunan KLHS RPJMD dan berlaku *mutatis mutandis* untuk penyusunan KLHS RPJPD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didefinisikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). KLHS merupakan adopsi dari konsep *Strategic Environmental Assessment* (SEA) yang diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh PBB terutama melalui *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) [11]. SEA digunakan untuk memformulasikan visi, tujuan, dan kerangka kerja keberlanjutan dalam pengambilan keputusan, sehingga harus mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses perumusan KRP. Seiring berjalannya waktu, konsep SEA kemudian berkembang menjadi *Environmental Sustainability Assurance* (ESA) untuk jaminan keberlanjutan lingkungan hidup [12]. Pelaksanaan KLHS pertama kali diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian sejak tahun 2000-an, konsep KLHS telah diimplementasi kan walaupun dengan metodologi yang bervariasi [13].

Sesuai dengan definisi KLHS, Permendagri No. 07 Tahun 2018 lebih lanjut menetapkan mekanisme pembuatan KLHS RPJPD (**Gambar 2**) sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme pembuatan KLHS RPJMD/RPJPD

1) Pembentukan tim pembuat KLHS

Tim pembuat KLHS ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. Tim pembuat KLHS beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS,

serta melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya.

2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Tim pembuat KLHS melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup: (a) kondisi umum daerah; (b) capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, dan (c) pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.

3) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan

Tim pembuat KLHS melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian TPB berdasarkan target pencapaian tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang sesuai dengan masa periode RPJMD/RPJPD dan tetap memperhatikan masa pencapaian TPB.

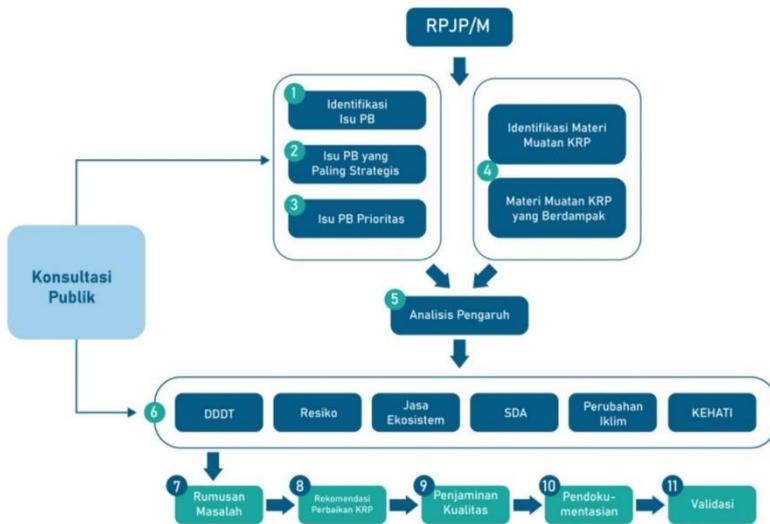
Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target TPB dengan memperhati-

kan: (a) pencapaian target tanpa upaya tambahan, (b) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional, (c) potensi, daya saing dan inovasi daerah, (d) daya dukung dan daya tampung daerah, dan (e) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil alternatif proyeksi menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis (berupa rumusan isu utama dalam pencapaian TPB), permasalahan (berupa tantangan pelaksanaan TPB), dan sasaran strategis daerah (berupa kondisi pencapaian TPB berdasarkan isu strategis dan permasalahan).

4) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS dan kualitas substansi KLHS. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS dibuktikan dengan: (a) ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS, (b) jadwal kegiatan pembuatan KLHS, (c) berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan, dan (d) laporan KLHS (laporan induk, ringkasan eksekutif dan tahapan proses pembuatan KLHS). Penjaminan kualitas substansi KLHS untuk memastikan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Disamping itu, proses pembuatan KLHS juga harus mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan KLHS sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebagai berikut (**Gambar 3**).



Gambar 3. Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS

a. Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan tahapan:

- Melakukan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis.
- Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup untuk menemukan dan menentukan muatan KRP yang harus dianalisis pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- Melakukan analisis pengaruh materi muatan KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup. Analisis pengaruh dilakukan dengan cara memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan KRP yang

berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan isu PB Paling Strategis.

- Melakukan analisis kajian muatan KLHS pada setiap materi muatan KRP yang berpengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan 6 (enam) muatan KLHS: (a) daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, (b) risiko dampak dan kerusakan Lingkungan Hidup, (c) kinerja jasa lingkungan, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil analisis kajian muatan KLHS menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan KRP.

b. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP

Alternatif penyempurnaan KRP berupa: (a) perubahan tujuan atau target, (b) perubahan strategi pencapaian target, (c) perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan, (d) perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan, (e) penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan, (f) pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem, dan/atau (g) pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkung-

an Hidup. Hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan memuat: (a) materi perbaikan KRP, dan/atau (b) informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

- 2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS
Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun KRP untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen KRP.

- 3) Validasi KLHS

Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bab 3

Kondisi Umum Kabupaten Banjar

A. Batas dan Luas Wilayah Administrasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041, wilayah Kabupaten Banjar terletak pada $114^{\circ} 30' 20''$ sampai dengan $115^{\circ} 33' 37''$ Bujur Timur (BT) dan $2^{\circ} 49' 55''$ sampai dengan $3^{\circ} 43' 38''$ Lintang Selatan (LS) dengan luas ± 4.589 Km². Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, wilayah administrasi Kabupaten Banjar seluas 4.588 Km². Secara geografis, Kabupaten Banjar berada di bagian tengah dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi dan kedudukan ini sangat strategis, karena dekat dengan Kota Banjarbaru (ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan), berperan sebagai penyangga kota Banjarmasin (pusat perdagangan dan distribusi Kalimantan Selatan), dan merupakan jalur trans Kalimantan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan:
 - a) Kabupaten Tapin (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan);
 - b) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan).

- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan:
 - a) Kabupaten Kotabaru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan);
 - b) Kabupaten Tanah Bumbu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan);
- 3) Sebelah Barat, berbatasan dengan:
 - a) Kota Banjarmasin (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan);
 - b) Kabupaten Barito Kuala (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan).
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - a) Kota Banjarbaru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan);
 - b) Kabupaten Tanah Laut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan).

Secara administratif, Kabupaten Banjar terdiri 20 Kecamatan dengan 13 kelurahan, dan 277 desa, sebagaimana disajikan pada **Tabel 1** dan **Gambar 4**.

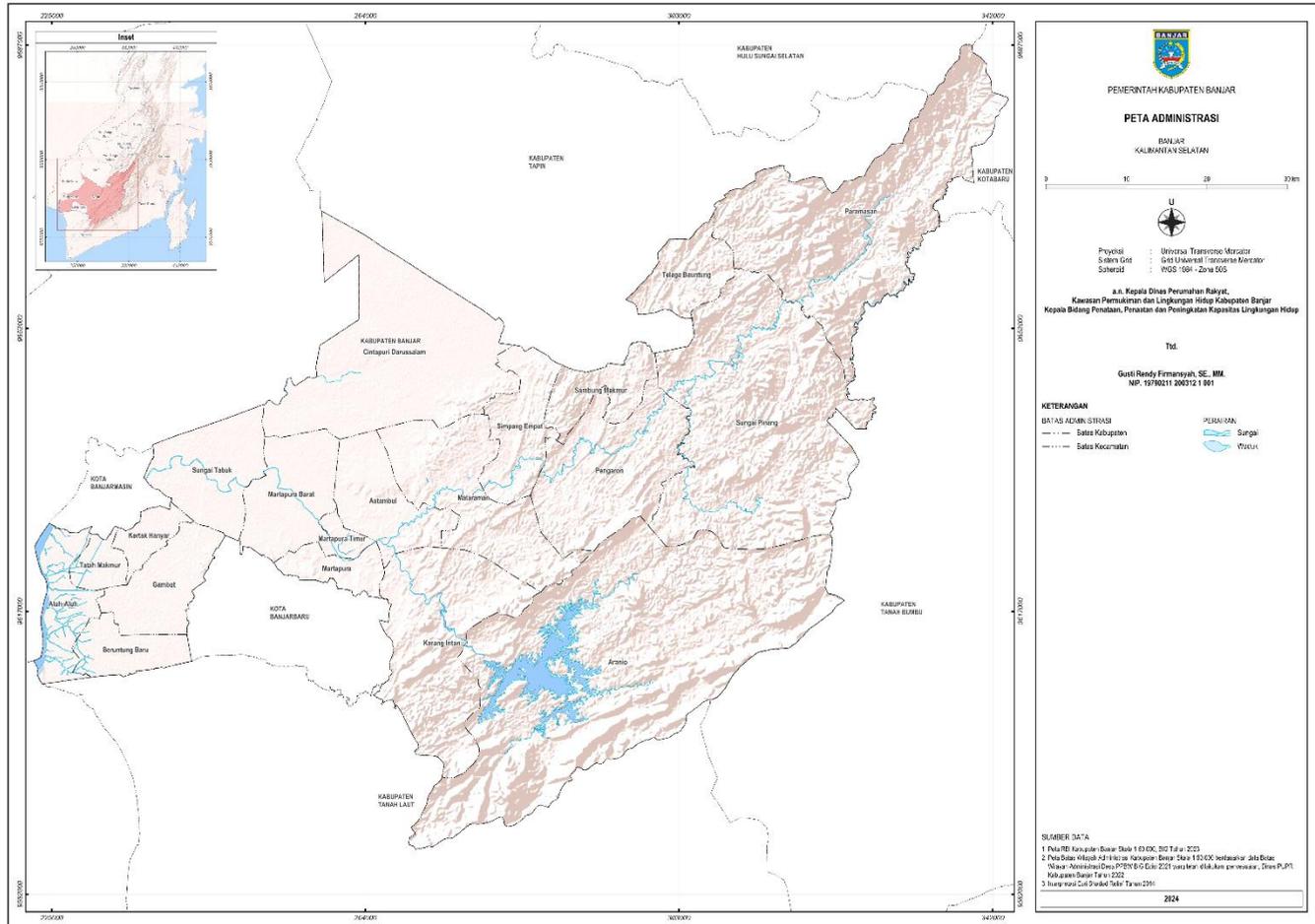
Tabel 1. Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km ²)	%
1	Aluh-Aluh	19	-	99,06	2,16
2	Aranio	12	-	1.007,53	21,96
3	Astambul	22	-	128,50	2,80
4	Beruntung Baru	12	-	73,36	1,60
5	Cintapuri Darussalam	11	-	448,68	9,78
6	Gambut	12	2	117,30	2,56
7	Karang Intan	26	-	305,50	6,66
8	Kertak Hanyar	10	3	40,62	0,89
9	Martapura	19	7	53,68	1,17
10	Martapura Barat	13	-	144,85	3,16
11	Martapura Timur	20	-	22,43	0,49
12	Mataraman	15	-	234,03	5,10
13	Paramasan	4	-	528,26	11,51
14	Pengaron	12	-	260,49	5,68
15	Sambung Makmur	7	-	82,32	1,79
16	Simpang Empat	15	-	121,90	2,66
17	Sungai Pinang	11	-	640,73	13,96
18	Sungai Tabuk	20	1	151,59	3,30
19	Tatah Makmur	13	-	36,80	0,80
20	Telaga Bauntung	4	-	91,35	1,99
Jumlah		277	13	4.589	100

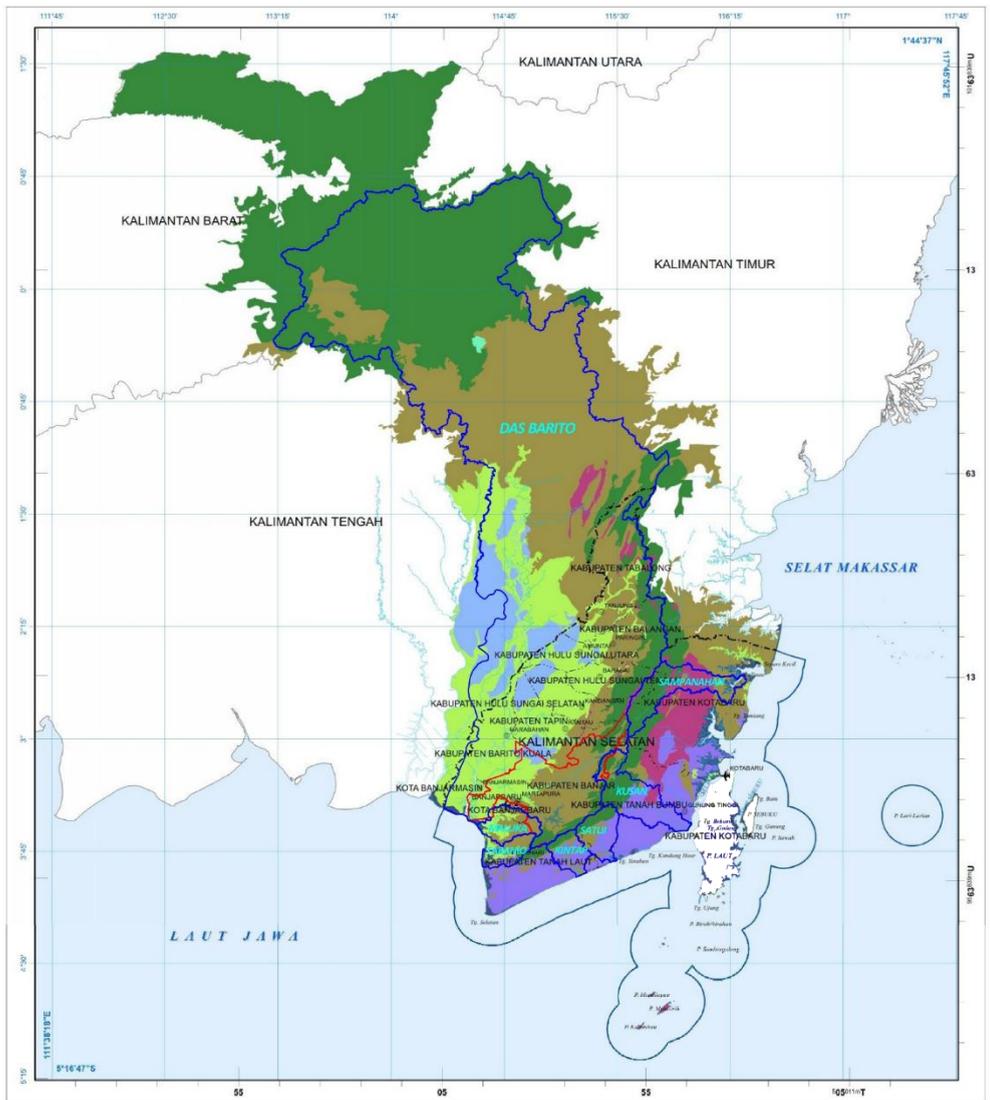
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021

B. Batas dan Luas Wilayah Fungsional

Penentuan batas wilayah fungsional (batas ekologi) dilakukan berdasarkan batas Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, dan batas Wilayah Ekoregion sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 (**Gambar 5**).



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Banjar



Gambar 5. Peta Batas Wilayah Fungsional (Batas Ekologi)

Mengacu pada batas DAS, Kabupaten Banjar berada pada 7 DAS yaitu DAS Barito (62.512.673,33 Km²), Maluka (833.010,40 Km²), Tabunio (545.155,58 Km²), Kintap (658.338,66 Km²), Satui (875.228,27 Km²), Kusan (1.752.830,90 Km²) dan Sampanahan (1.695.839,95 Km²) dengan luas total ± 68.873.077,08 Km² yang meliputi wilayah ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan, Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam, Dataran Pantai Kalimantan, Dataran Struktural Kompleks Meratus, Danau, Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan, Pegunungan Struktural Kompleks Meratus, Perbukitan Karst Kalimantan dan Perbukitan Struktural Kompleks Meratus.

C. Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Banjar

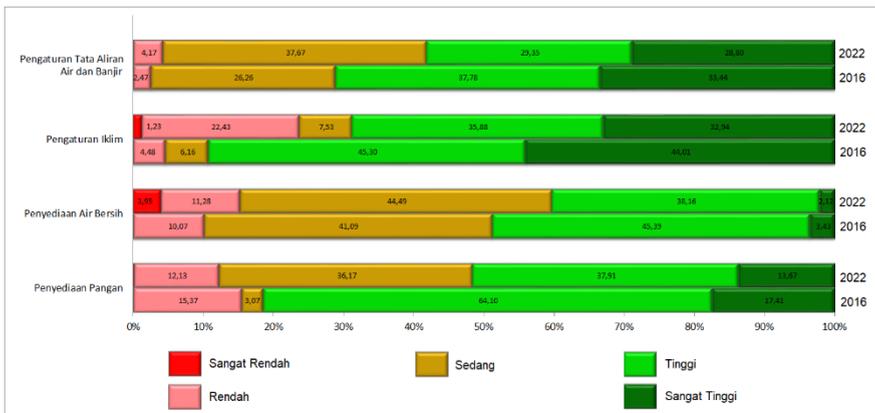
Penentuan kinerja jasa lingkungan Kabupaten Banjar mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022). Untuk mengetahui kecenderungan perubahan jasa lingkungan, maka pada kajian ini juga disajikan data pembandingan kondisi jasa lingkungan Kabupaten Banjar tahun 2016, sebagaimana disajikan pada **Tabel 2** dan **Gambar 6**.

Tabel 2. Jasa Lingkungan Kabupaten Banjar

Jasa Lingkungan	Tahun	Sangat Tinggi (Km ²)	Tinggi (Km ²)	Sedang (Km ²)	Rendah (Km ²)	Sangat Rendah (Km ²)
Penyediaan Pangan	2022	627,10	1.739,60	1.659,89	556,86	5,55
	2016	799,16	2.941,49	140,97	705,18	2,2
Penyediaan Air Bersih	2022	97,41	1.751,10	2.041,72	517,48	181,29
	2016	157,4	2.082,95	1.885,79	462,28	0,58

Jasa Lingkungan	Tahun	Sangat Tinggi (Km ²)	Tinggi (Km ²)	Sedang (Km ²)	Rendah (Km ²)	Sangat Rendah (Km ²)
Pengaturan Iklim	2022	1.511,68	1.646,46	345,37	1.029,13	56,35
	2016	2.019,62	2.078,82	282,68	205,59	2,29
Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	2022	1.321,46	1346,65	1728,86	191,42	0,61
	2016	1.534,68	1.733,72	1.205,07	113,42	2,28
Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Alam	2022	1.610,05	1660,08	169,83	506,22	642,82
Pengaturan Kualitas Udara	2022	1.533,21	976,98	987,65	1.084,34	6,82
Pemurnian Air & Pengolahan Air Limbah	2022	-	1273,92	1812,29	296,13	1206,66

Sumber : DLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022)



Gambar 6. Kecenderungan Perubahan Kondisi Jasa Lingkungan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022

Berdasarkan **Gambar 6** diketahui bahwa jasa penyediaan pangan, penyediaan air bersih, pengaturan iklim dan pengaturan tata aliran air dan banjir cenderung mengalami penurunan seiring dengan penurunan prosentase tingkat jasa lingkungan sangat tinggi dan tinggi, serta meningkatnya prosentase jasa lingkungan kategori sedang.

D. Daya Dukung dan Daya Tampung LH

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Penentuan D3TLH Kabupaten Banjar mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) sebagai berikut.

1) Daya dukung lahan permukiman

Daya dukung lahan permukiman didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Penentuan daya dukung lahan permukiman (DDL_{Pm}) berdasarkan perbandingan luas lahan permukiman dengan luas kebutuhan lahan permukiman [14]. Semakin tinggi DDL_{Pm} maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan lahan permukiman.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 2022 sebanyak 579.910 jiwa dan asumsi kebutuhan lahan permukiman layak 60 m²/orang maka kebutuhan lahan permukiman di kabupaten banjar ± 34.794.600 m². Berdasarkan hasil analisis spasial, lahan permukiman di Kabupaten Banjar tahun 2022 seluas ± 88.625.506 m². Dengan demikian, DDL_{Pm} Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,5 yang berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk hingga ± 1.477.092 jiwa.

2) Daya dukung pangan

Daya dukung pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas pertanian untuk menghasilkan makanan (terutama beras) yang memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut. Penentuan daya dukung pangan (DDPn) berdasarkan perbandingan jumlah produksi dengan jumlah konsumsi beras pada tahun yang sama [15]. Semakin tinggi DDPn maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 579.910 jiwa dan angka konsumsi beras 124 kg/kapita/tahun maka jumlah konsumsi beras di Kabupaten Banjar tahun 2022 sebanyak 71.909 ton. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah produksi padi di Kabupaten Banjar tahun 2022 sebanyak 141.592,25 ton atau setara dengan 83.780 ton gabah kering giling (GKG). Dengan demikian, DDPn Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 1,17 yang berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi hingga ± 675.645 penduduk.

3) Daya dukung air

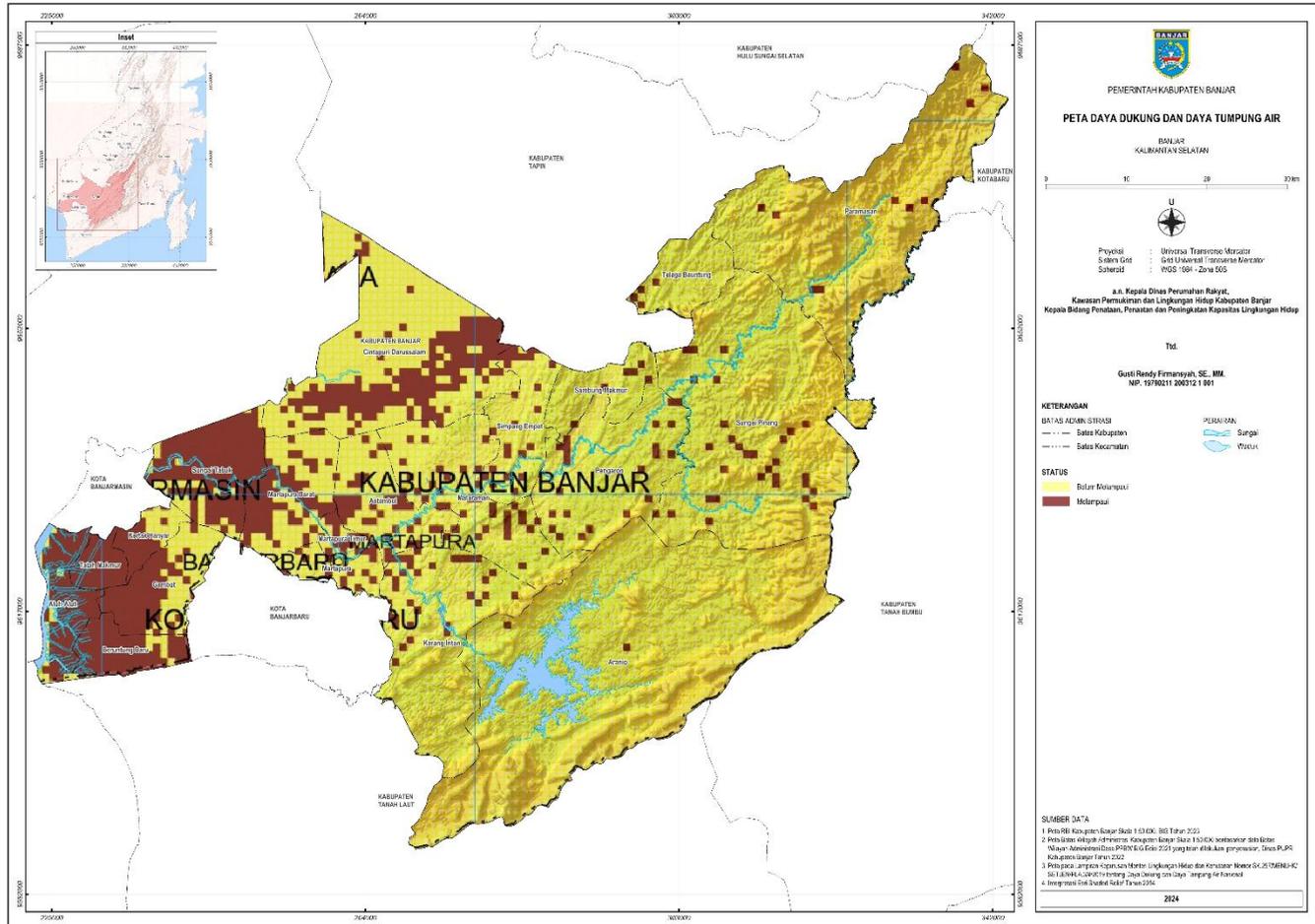
Daya dukung air didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan air secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan berbagai jenis pemanfaatan. Penentuan daya dukung air (DDA) berdasarkan perbandingan jumlah ketersediaan dengan jumlah kebutuhan air. Semakin tinggi DDA maka semakin tinggi kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan air.

Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

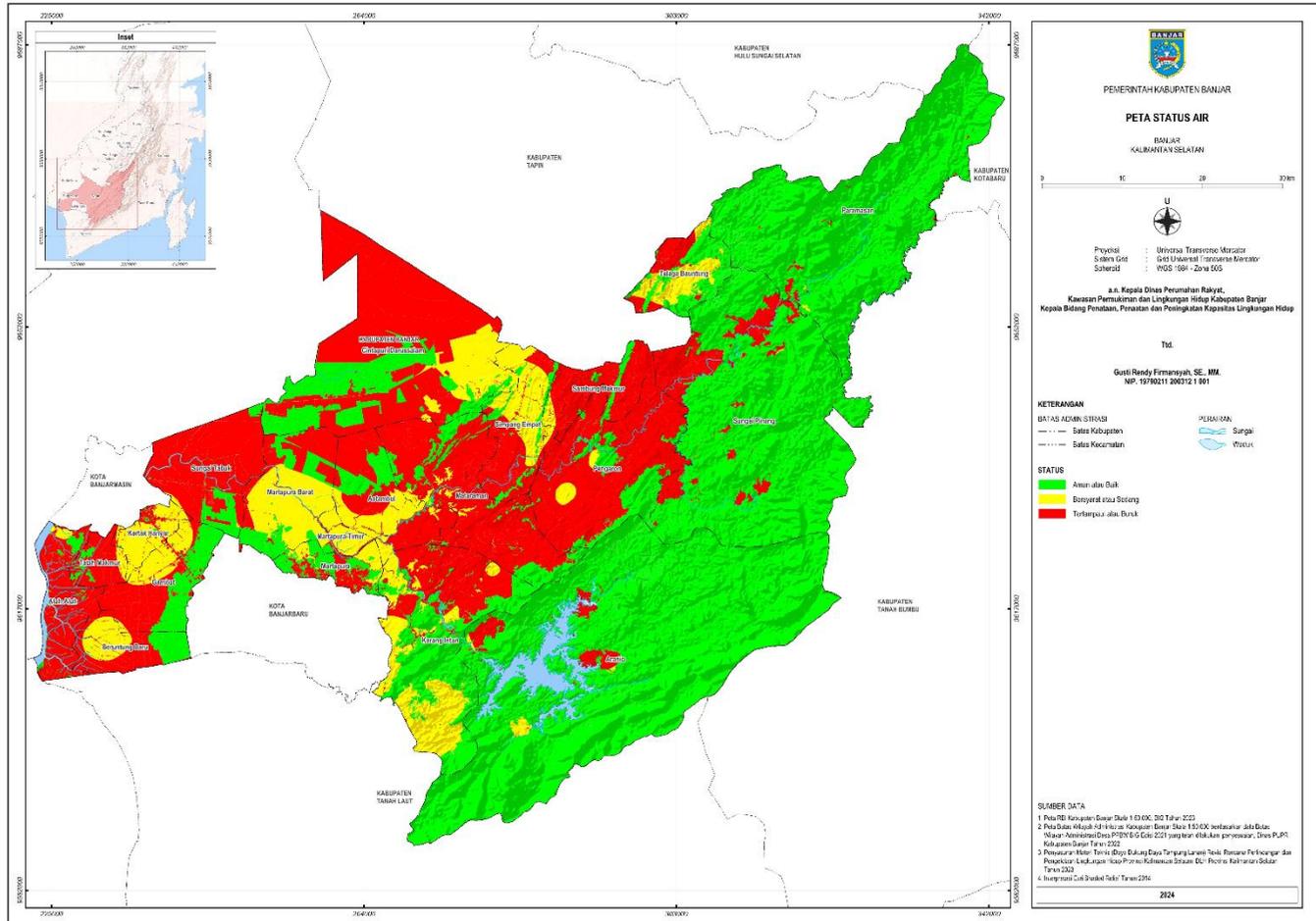
No. SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, diketahui bahwa 17,60% (807,61 Km²) wilayah Kabupaten Banjar berstatus telah melampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), sedangkan 82,40% (3.781,39 Km²) berstatus belum melampaui (ketersediaan air lebih besar daripada kebutuhan air) sebagaimana disajikan pada **Gambar 7**. Sementara itu, mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) diketahui bahwa 32,40% (1.486,82 Km²) wilayah Kabupaten Banjar berstatus telah buruk/terlampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 10,32% (473,43 Km²) berstatus sedang/bersyarat (kebutuhan air hampir seimbang dengan ketersediaan air), dan 57,28% (2.628,75 Km²) berstatus baik/aman (ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan air). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 6.403.353.583 m³/tahun dan total kebutuhan air sebesar 2.635.123.871 m³/tahun (kebutuhan domestik 16.516.542 m³/tahun dan non-domestik 2.618.607.329 m³/tahun), maka DDA Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,43 yang berarti termasuk dalam kategori “sedang/bersyarat” sebagaimana disajikan pada **Gambar 8**.

E. Kuadran Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per-kapita merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Namun sejak diperkenal-



Gambar 7. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Banjar



Gambar 8. Peta Status Air Kabupaten Banjar

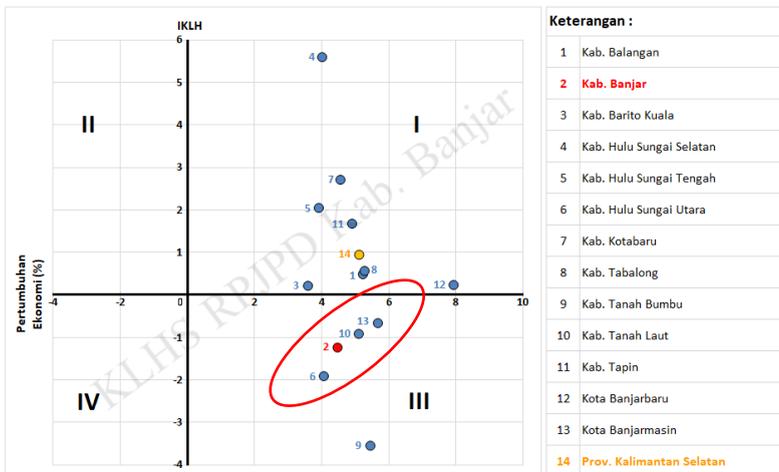
kannya konsep pembangunan berkelanjutan, tingkat keberhasilan pembangunan diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan diselaraskan dengan kelestarian lingkungan [16]. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan adalah dengan analisis kuadran melalui tipologi Klassen [17]. Metode ini membagi wilayah kajian ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu:

- 1) Kuadran I (Peradaban Ekologis) adalah kelompok wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup meningkat;
- 2) Kuadran II (*underutilized*) adalah kelompok wilayah dengan pertumbuhan ekonomi menurun namun kualitas lingkungan hidup meningkat;
- 3) Kuadran III (*overexploitation*) adalah kelompok wilayah dengan pertumbuhan ekonomi meningkat namun kualitas lingkungan hidup menurun;
- 4) Kuadran IV (Darurat Ekologis) adalah kelompok wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup menurun.

Pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sedangkan perubahan kondisi lingkungan ditentukan berdasarkan perubahan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan data BPS, PDRB Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 12.651,51 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,48% [2]. Berdasarkan data DLH Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, nilai IKLH Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah 67,27 dan pada

tahun 2022 adalah 66,03 (Δ IKLH = -1,24). Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,51 pada tahun 2021 dan turun menjadi 87,90 pada tahun 2022 (Δ IKU = -0,61). Kondisi yang sama juga terjadi pada kualitas air, dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 53,56 dan turun pada tahun 2021 menjadi 50,93 pada tahun 2022 (Δ IKA = -2,63). Sementara itu, nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Banjar pada tahun 2021 dan 2022 adalah 51,51 (Δ IKL = 0). Hasil analisis kuadran pembangunan berkelanjutan disajikan pada **Gambar 9**.



Gambar 9. Kuadran Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Posisi Kabupaten Banjar berada di Kuadran III, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (4,48%) menyebabkan tekanan terhadap lingkungan (Δ IKLH = -1,24). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

F. Ringkasan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 adalah “**Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing tahun 2025**”. Untuk mencapai visi tersebut, pembangunan Kabupaten Banjar dilakukan berdasarkan enam misi, sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Banjar yang religius dan berbudaya luhur

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia

Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima

Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan mendorong pertumbuhan investasi

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan

Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tujuan, sasaran dan indikator pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 disajikan pada **Tabel 3**. Selanjutnya masing-masing sasaran ditentukan arah, tahapan dan prioritas pembangunan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, sebagaimana disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	
Visi : Kabupaten Banjar yang berbudaya dan religius				
Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Banjar yang religius dan berbudaya luhur	1. Terciptanya nuansa religius, dan berbudaya luhur	1.1. Terwujudnya nuansa religius di Kabupaten Banjar	a. Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah b. Berkembangnya pemanfaatan kebudayaan daerah dan apresiasi seni budaya bernuansa religius c. Terwujudnya suasana nyaman dan menunjang aktivitas keagamaan	
		1.2. Terjalinnnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong masyarakat di Kabupaten Banjar	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mematuhi norma budaya dan kearifan lokal b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten Banjar c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
		1.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban Masyarakat antar umat beragama	a. Berkurangnya angka kejahatan/kriminalitas b. Berkurangnya gangguan terhadap hak individu, kelompok masyarakat dan institusi c. Meningkatnya daya dukung, sarana dan kualitas pembinaan dan pelayanan aparat pelindung masyarakat (linmas)	
	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia	2.a. Meningkatnya kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas dan kemandirian masyarakat.	2.1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan	a. Meningkatnya wajib belajar pendidikan dasar b. Berkurangnya masyarakat miskin yang tidak memperoleh pendidikan dasar c. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana di daerah tertinggal
			2.2. Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa	a. Pembinaan rohani bagi pemerintahan dan masyarakat b. Meningkatnya toleransi antar umat beragama
			2.3. Meningkatnya mutu dan daya saing Masyarakat pada bidang pendidikan	a. Meningkatnya angka melek huruf b. Berkurangnya angka putus sekolah c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
2.b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		2.4. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan	a. Menurunnya angka kesakitan b. Menurunnya penyakit menular c. Meningkatnya pembinaan dan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat d. Meningkatnya akses terhadap sarana kesehatan lingkungan	
		2.5. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana Kesehatan dan olahraga	a. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan b. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau secara geografis maupun biaya c. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana keagamaan sesuai peraturan yang berlaku d. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga yang terpadu	
		2.6. Terwujudnya Keluarga berkualitas dan meningkatnya peran gender dalam pembangunan di Kabupaten Banjar	a. Meningkatnya pengguna KB menuju Keluarga berkualitas b. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima	3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima	3.1. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima serta mengikuti dinamika pelayanan aparatur pemerintahan yang transparan	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) yang mengedepankan minim struktur kaya fungsi. b. Terciptanya keseimbangan formasi antara jabatan struktural dan fungsional di setiap SOPD. c. Terciptanya sistem karir yang berbasis pada kompetensi, Kinerja, profesionalisme dan kehandalan. d. Terciptanya akuntabilitas aparatur pemerintah daerah melalui penerapan sistem penghargaan dan hukuman. e. Meningkatnya akses masyarakat kepada dokumendokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kabupaten Banjar.
		3.2. Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas public sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
		3.3. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum b. Meningkatnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
Visi : Kabupaten Banjar yang mandiri dan berdaya saing			
Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan mendorong pertumbuhan investasi	4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas perekonomian daerah	4.1. Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis sumberdaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal oleh industri dan UMKM b. Meningkatnya penggunaan tenaga kerja local untuk bekerja di industri dan UMKM c. Meningkatnya jumlah UMKM yang sehat d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan
		4.2. Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya produk khusus minapolitan yang berdaya saing
		4.3. Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan pariwisata di Kabupaten Banjar b. Meningkatnya pengelolaan daerah tujuan wisata c. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata d. Meningkatnya pola kerjasama, kemitraan dan promosi wisata
		4.4. Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku UMKM b. Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan satu pintu c. Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat, dan pasti d. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas
		4.5. Terlaksananya pembangunan pusatpusat perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang informal (PKL) b. Meningkatnya pemasaran hasil produk unggulan lokal di kawasan objek wisata c. Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan d. Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan e. Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan	5.a. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan	5.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan pembangunan
		5.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sesuai dengan hirarki dan kebutuhan masyarakat	a. Meningkatnya sarana dan prasarana publik di setiap WP yang berkualitas dan sesuai kebutuhan penduduk. b. Meningkatnya peran dan fungsi wilayah sesuai dengan arahan RTRW.
		5.3. Terwujudnya pembangunan daerah tertinggal dan Kawasan strategis	a. Meningkatkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan Kawasan strategis. b. Meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal.
	5.b. Mewujudkan kinerja pelayanan sektor transportasi yang handal	5.4. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa dan prasarana transportasi	a. Idealisasi simpul-simpul transportasi darat b. Mengoptimalkan kinerja prasarana dan fasilitas transportasi darat yang ada
		5.5. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi	a. Meningkatkan kelaikan sarana transportasi yang berwawasan lingkungan b. Meningkatkan kelaikan prasarana fasilitas keselamatan transportasi darat c. Tersedianya kebijakan, norma, dan prosedur di bidang transportasi darat d. Peningkatan kedisiplinan pengguna lalu lintas
Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	6.1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, limbah, dan polusi	a. Berkurangnya Tingkat pencemaran lingkungan b. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kebersihan
		6.2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	a. Meningkatnya penambangan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang b. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan c. Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa izin
		6.3. Terwujudnya pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau b. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman yang terkait dengan ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan standar/ketentuan yang ada c. Berkurangnya Tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang d. Tidak terjadi perubahan guna lahan pada kawasan lindung

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

Tabel 4. Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar	Penyediaan Infrastruktur dan peningkatan kuantitas serta kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang untuk mendukung sektor pertanian menjadi <i>leading sector</i> bagi bidang lainnya	Peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing untuk mendukung sektor pertanian menjadi <i>leading sector</i> bagi bidang lainnya	Pemantapan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas menuju agro industri	Pemantapan perekonomian daerah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing berbasis agro industri dengan ditunjang peningkatan jaringan pemasaran yang luas, penguatan industri pengolahan, jasa dan perdagangan
Tujuan 1 : Terciptanya nuansa religius, dan berbudaya luhur				
1.1. Terwujudnya nuansa religius di Kabupaten Banjar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mencanangkan pembangunan fasilitas seni dan budaya Banjar yang bernuansa religius 2) Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya Banjar 2) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana ibadah masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan 2) Terwujudnya suasana yang nyaman dan menunjang aktivitas keagamaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam bermasyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ibadah untuk menunjang aktivitas keagamaan
1.2. Terjalinnnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong masyarakat di Kabupaten Banjar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kesadaran gotong royong di masyarakat 2) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat 2) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantapkan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat 2) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat 2) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian
1.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban Masyarakat antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan rasio Linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk 2) Meningkatkan kualitas anggota Linmas 3) Mencanangkan pelaksanaan kerjasama pengamanan lingkungan antara masyarakat, pemerintah dengan aparat keamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menciptakan kondisi keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat 2) Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif. 2) Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantapkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas 2) Mempertahankan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
Tujuan 2.a. : Meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas dan kemandirian masyarakat				
2.1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan wajardikdas 9 tahun 2) Mencanangkan pendidikan anak usia dini 3) Meningkatkan Manajemen pelayanan pendidikan 4) Mencanangkan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar 5) Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga pendidik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan wajar dikdas 9 tahun 2) Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini 3) Mencanangkan wajar dikdas 12 Tahun 4) Mengembangkan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar 5) Mengembangkan sekolah berbasis internasional 6) Meningkatkan beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi 7) Melibatkan peran pihak swasta dalam bidang Pendidikan 8) Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan wajar dikdas 12 Tahun 2) Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas 3) Meningkatkan kualitas SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar. 4) Meningkatkan kualitas sekolah berbasis internasional 5) Meningkatkan program beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi 6) Meningkatkan peran pihak swasta dalam bidang pendidikan 7) Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan wajar dikdas 12 Tahun 2) Mempertahankan kualitas pendidikan anak usia dini 3) Mempertahankan kualitas SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar 4) Mempertahankan kualitas sekolah berbasis internasional 5) Meningkatkan program beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi. 6) Meningkatkan peran pihak swasta dalam bidang pendidikan 7) Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin
2.2. Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mencanangkan pembangunan fasilitas seni dan budaya Banjar 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya Banjar 3) Menanamkan toleransi dan sikap saling menghargai sejak di Sekolah Dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkenalkan bahasa dan budaya Banjar serta kearifan lokal sejak Sekolah Dasar 2) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan peninggalan budaya lokal 3) Meningkatkan penanaman toleransi dan sikap saling menghargai sejak di Sekolah Dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melestarikan budaya dan asetaset bersejarah 2) Meningkatkan pengelolaan dan revitalisasi kawasan bersejarah di Kabupaten Banjar untuk menjaga kelestariannya 3) Mencanangkan program promosi budaya dan bangunan bersejarah di tingkat nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan kualitas aset-aset kekayaan budaya Banjar 2) Mencanangkan program budaya dan bangunan bersejarah pada tingkat Internasional
2.3. Meningkatnya mutu dan daya saing Masyarakat pada bidang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mencanangkan Program Gemar Membaca Bagi anak usia sekolah 2) Mencanangkan Program Peningkatan kualitas guru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan masyarakat yang mampu membaca dan menulis 2) Meningkatkan kualitas guru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3) Meningkatkan ketertarikan siswa/i SMP/MTs untuk melanjutkan sekolah ke SMK yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong peningkatan ketertarikan masyarakat lulusan SMA/MA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan daerah dan perpustakaan berjalan 3) Meningkatkan keberadaan institusi pendidikan formal dan nonformal terkait pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil dalam berbagai bidang dalam menunjang sektor pertanian sebagai <i>leading sector</i>

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
Tujuan 2.b. : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
2.4. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan terhadap masyarakat miskin. 2) Melaksanakan Pelayanan kesehatan di puskesmas secara gratis melalui jaminan pelayanan kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat 2) Meningkatkan penyuluhan/ sosialis asi tentang lingkungan dan budaya hidup yang sehat kepada masyarakat 3) Meningkatkan penyuluhan tentang gizi dan program imunisasi 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan hingga menjangkau desa-desa. 5) Menyediakan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas tenaga-tenaga di bidang pelayanan kesehatan 2) Meningkatkan penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi 3) Meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia 4) Meningkatkan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian terhadap pelayanan kesehatan dan kesadaran akan gizi dan pola hidup sehat 2) Meningkatkan informasi layanan kesehatan hingga tingkat desa 3) Mempertahankan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah
2.5. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana Kesehatan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi 2) Menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga umum masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan sarana prasarana sebagai daya dukung kesehatan 2) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas atlet berprestasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan sarana prasarana sebagai daya dukung kesehatan 2) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas atlet berprestasi 3) Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi 4) Menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga umum masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan sarana prasarana sebagai daya dukung kesehatan 2) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas atlet berprestasi 3) Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi 4) Menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga umum masyarakat
2.6. Terwujudnya Keluarga berkualitas dan meningkatnya peran gender dalam pembangunan di Kabupaten Banjar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pengguna KB menuju keluarga berkualitas 2) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan layanan KB bagi berbagai lapisan masyarakat 2) Peningkatan peran gender dalam organisasi pemerintahan, politik, dan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan partisipasi program KB bagi pria 2) Optimalisasi peran gender dalam organisasi pemerintahan, politik, dan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan melalui program KB 2) Peningkatan kualitas SDM perempuan dan kesadaran untuk pembangunan

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
Tujuan 3 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima				
3.1. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima serta mengikuti dinamika pelayanan aparatur pemerintahan yang transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperbaiki sistem pelayanan publik/perizinan ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian 2) Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dalam pelayanan prima 3) Identifikasi kebutuhan dan kelengkapan wilayah perkantoran baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan sistem pelayanan publik/ perizinan ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah dalam pelayanan prima 3) Sosialisasi dan proses perpindahan perkantoran pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas system pelayanan publik/perizinan 2) Memantapkan pelayanan publik yang prima 3) Terbangunnya kantor pemerintahan yang baru dan terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan 2) Peningkatan fasilitas dan pelayanan perkantoran baru yang terpadu
3.2. Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 2) Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 3) Meningkatkan kualitas para aparat pemerintahan 4) Meningkatkan disiplin pegawai 5) Mengimplementasikan sistem reward & punishment pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan sistem reward & punishment pegawai 2) Mempermudah akses masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan penyempurnaan satuan organisasi pemerintah daerah (SOPD) ke arah organisasi yang efektif dan efisien 2) Mewujudkan sistem kepegawaian yang profesional 3) Memantapkan kompetensi, kinerja, serta kehandalan aparatur yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan <i>good governance</i> dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Banjar 2) Mewujudkan perencanaan partisipatif dalam pembangunan
3.3. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi	Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terkait proses pemilihan umum	Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum	Mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum
Tujuan 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas perekonomian daerah				
1.1. Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis sumberdaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi pemanfaatan koperasi oleh masyarakat 2) Meningkatkan jumlah industri manufaktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkelompokkan dan mengembangkan kawasan menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat local untuk terlibat di dalam kegiatan jasa perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terserapnya produk UMKM di pasar regional, nasional bahkan internasional 2) Meningkatnya kualitas produk UMKM.

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
	3) Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan industri berbasis potensi lokal 4) Meningkatkan industri manufaktur	2) Menyiapkan infrastruktur, berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan 3) Menetapkan AMDAL bagi kawasan yang akan dikembangkan menjadi sentra UMKM, industri kreatif, serta pusat perdagangan 4) Meningkatkan kondisi iklim investasi yang menarik dan memudahkan bagi investor baik dalam maupun luar negeri 5) Menganangkan kerjasama antar daerah produsen dengan pasar-pasar yang menjadi target penjualan hasil-hasil industri	2) Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan kemudahan untuk mengakses permodalan 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif 4) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jasa perdagangan, dari skala kabupaten menjadi skala regional 5) Mendorong peningkatan investasi terhadap UMKM dan industri kreatif 6) Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat nasional	3) Meningkatnya akses UMKM terhadap informasi pusat dan mengakses permodalan
1.2. Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing	1) Revitalisasi Kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dalam aglomerasi ekonomi 2) Menganangkan intensifikasi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 3) Pencanaan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 4) Menganangkan program “one village one product” dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian,	1) Menumbuh-kembangkan sistem manajemen terpadu antar komo ditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan wilayah sentra produksi 2) Mengelola dan melaksanakan intensifikasi lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 3) Mendorong masyarakat untuk terlibat pada sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan	1) Mendorong terbentuknya klast er industri-industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang ramah lingkungan 2) Mendorong terbentuknya industri-industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang teraglomerasi dan ramah lingkungan 3) Menganangkan kerja sama antara petani dengan industri pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,	1) Mendorong pengembangan sektor hilir industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 2) Mendorong terciptanya <i>linkage</i> (keterkaitan) antara daerah produsen (penghasil bahan baku dengan daerah aglomerasi industri pengolahan) serta daerah distribusi (pasar) 3) Meningkatkan promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
	perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan	<p>4) Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam rangka peningkatan kualitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan</p> <p>5) Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri pengolahan</p> <p>6) Mewujudkan program “one village one product” dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan</p> <p>7) Menganangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengembangan agribisnis kewilayahan</p>	<p>perikanan serta antara sektor industri dengan pasar-pasar yang potensial</p> <p>4) Mendorong penggunaan teknologi pada industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.</p> <p>5) Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan penggunaan teknologi agar dapat terlibat dalam industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan</p> <p>6) Meningkatkan program “one village one product” dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan</p> <p>7) Meningkatkan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian di tingkat nasional melalui pencitraan produk pertanian lokal</p> <p>8) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi pada pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pengembangan agribisnis, dan informasi pasar</p>	<p>pada Tingkat internasional</p> <p>4) Memantapkan kawasan agropolitan “one village one product” yang berbasis potensi</p> <p>5) Memantapkan program “one village one product” dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan.</p> <p>6) Meningkatkan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian di tingkat internasional</p>
1.3. Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	1) Pengembangan kegiatan pariwisata berorientasi religius	1) Pengembangan kegiatan pariwisata umum	1) Mengelola dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata.	1) Meningkatkan potensi Kawasan pariwisata agar lebih menarik bagi para wisatawan

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata berorientasi religius 3) Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisata 4) Meningkatkan jumlah dan keragaman daerah tujuan wisata 5) Penetapan wisata alam unggulan 6) Studi kelayakan pembangunan aksesibilitas (infrastruktur) wisata religius daerah Kelampayan 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata 3) Meningkatkan investasi usaha pariwisata 4) Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisata 5) Meningkatkan jumlah dan keragaman daerah tujuan wisata 6) Rintisan regulasi pariwisata 7) Pengembangan kegiatan wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan revitalisasi kawasan-kawasan budaya yang merupakan objek wisata 3) Melibatkan masyarakat dalam industri pariwisata (sebagai penyedia jasa dan fasilitas pendukung kegiatan wisata) 4) Meningkatkan promosi hasil-hasil pertanian dan industri pengolahan sebagai ciri khas objek wisata 5) Pengembangan aksesibilitas (infrastruktur) wisata religius daerah Kelampayan 6) Meningkatkan promosi daerah wisata dan potensi wisata alam pada tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan kelengkapan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan wisata. 3) Meningkatkan kualitas/ pengetahuan Masyarakat tentang industri pariwisata dan kegiatan bangkitannya 4) Meningkatkan promosi daerah wisata dan potensi wisata alam pada Tingkat Internasional 5) Terwujudnya penataan Kawasan pariwisata daerah 6) Peningkatan aksesibilitas wisata religius daerah Kelampayan
1.4. Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyederhanaan pelayanan perizinan investasi 2) Mengadakan promosi pada skala nasional dan internasional terhadap sektor-sektor yang potensial dan menguntungkan untuk dikembangkan di Kabupaten Banjar 3) Peningkatan layanan informasi secara terpadu, murah, sehat dan aman ke desa – desa 4) Pembinaan dan pengendalian pos telekomunikasi dan frekuensi 5) Mendorong terciptanya lembaga-lembaga keuangan yang aman dan terpercaya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mendorong terciptanya hubungan yang baik dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor, serta antara investor terhadap pemerintah dan masyarakat 2) Menerapkan sistem insentif bagi para investor yang hendak berinvestasi di Kabupaten Banjar 3) Optimalisasi layanan informasi secara terpadu, murah, sehat dan aman ke desa-desa 4) Peningkatan fasilitas, pembinaan dan pengendalian pos telekomunikasi dan frekuensi 5) Memeratakan informasi dan kemudahan akses mencari investor dan mencari sektor yang potensial berkembang serta membutuhkan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi investor 2) Meningkatkan kualitas lembaga pendukung investasi yang aman, terpercaya dan memudahkan proses investasi 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi. 4) Peningkatan Kerjasama informasi dengan Mass Media 5) Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap jasa layanan pos telekomunikasi dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan kondisi iklim investasi yang kondusif bagi investor 2) Memelihara sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi 3) Pengembangan komunikasi dan informasi dengan Media Massa 4) Optimalisasi pembinaan, pengendalian pos telekomunikasi dan frekuensi

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1.5. Terlaksananya pembangunan pusat-pusat perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mencanangkan jumlah sentra UMKM dan industri manufaktur 2) Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal 3) Pengembangan aksesibilitas jalan aluh-aluh untuk Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan jumlah sentra UMKM dan industri manufaktur 2) Meningkatkan pemeliharaan yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal 3) Peningkatan aksesibilitas jalan aluh-aluh untuk pembangunan infrastruktur Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merintis alternatif jenis industri dan pembinaan sentra-sentra industri kecil 2) Memantapkan pemeliharaan yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal 3) Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan alternatif jenis industri dan pembinaan sentra-sentra industri kecil 2) Mementapkan pemeliharaan yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal 3) Pengembangan infrastruktur Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI)
Tujuan 5.a. : Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan				
5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan 2) Terciptanya transparansi dalam proses pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik 2) Terciptanya taransparansi dalam proses pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik 2) Terciptanya taransparansi dalam proses pembangunan
5.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sesuai dengan hirarki dan kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan ketersediaan dan kemampuan kondisi jalan dan jembatan 2) Optimalisasi fungsi irigasi untuk pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan ketersediaan dan kemampuan kondisi jalan dan jembatan 2) Optimalisasi fungsi irigasi untuk pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan ketersediaan, kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2) Peningkatan optimalisasi fungsi dan kemampuan irigasi untuk pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan ketersediaan, kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2) Peningkatan optimalisasi fungsi dan kemampuan irigasi untuk pertanian
5.3. Terwujudnya pembangunan daerah tertinggal dan Kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Percepatan terhadap pembangunan di daerah tertinggal 2) Percepatan terhadap pembangunan di kawasan strategis 3) Studi kelayakan Pembangunan terminal center 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Percepatan terhadap pembangunan di daerah tertinggal 2) Percepatan terhadap pembangunan di kawasan strategis 3) Pembangunan terminal center 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Percepatan dan penataan pembangunan di daerah tertinggal 2) Percepatan dan penataan pembangunan di kawasan strategis 3) Optimalisasi terminal center sebagai pusat kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terwujudnya peralihan daerah tertinggal menjadi daerah maju dan mandiri 2) Terwujudnya Pembangunan kawasan strategis 3) Pengembangan sistem transportasi terdiri atas angkutan muatan (barang) dan manajemen yang mengelola angkutan
Tujuan 5.b. : Mewujudkan kinerja pelayanan sektor transportasi yang handal				
5.4. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa dan prasarana transportasi	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum massal sebagai moda utama pergerakan masyarakat	Pengembangan kualitas pelayanan angkutan umum massal sebagai moda utama pergerakan masyarakat	Optimalisasi kapasitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas transportasi

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
5.5. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas Keselamatan jalan 2) Peningkatan pemahaman pengguna jalan tentang berlalu lintas yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas keselamatan jalan 2) Mengembangkan pemahaman masyarakat pengguna jalan tentang berlalu lintas yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kelaikan sarana dan prasarana transportasi yang sesuai standar nasional 2) Peningkatan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2) Peningkatan pelayanan angkutan
Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan				
6.1. Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, limbah, dan polusi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penanganan terhadap lahan kritis, pencemaran lingkungan 2) Menetapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan luas lahan kritis 3) Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap lahan kritis dan tidak membuang sampah pada sembarang tempat (sungai) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menerapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan lahan kritis 2) Pembinaan teknis dan penyadaran mengenai pengelolaan Kesehatan lingkungan 3) Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah rawan bencana 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis 5) Mengelola sumber daya alam & lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana 6) Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7) Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan 8) Penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah dan limbah 9) Rintisan pembentukan lembaga pengelolaan sampah & limbah 10) Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor 2) Meningkatnya wawasan dan kesadaran mengenai pengelolaan Kesehatan lingkungan 3) Memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan perbaikan lahan kritis secara mandiri 4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju Pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana 5) Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan 6) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah dan limbah 7) Terbentuknya lembaga pengelolaan sampah dan limbah 8) Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan daya dukung dan Kualitas lingkungan dengan mengupayakan peningkatan penanganan lahan kritis dan lahannya potensial kritis di beberapa wilayah 2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan 3) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah dan limbah dan sehingga menghasilkan nilai tambah dari sisi ekonomi 4) Terbentuknya Lembaga pengelolaan sampah dan limbah 5) Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan sesuai dengan kebutuhan

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
6.2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan 2) Memantapkan kepranataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 3) Mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan 4) Memperkuat kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan Kawasan lindung 5) Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan (terkait pengelolaan lingkungan hidup) yang baik secara adil dan konsisten 6) Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis 7) Peningkatan sistem penegakan hukum di bidang pertambangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan 2) Memfasilitasi sarana dan lahan ruang terbuka hijau 3) Meningkatkan sistem informasi dan sumber daya lingkungan 4) Optimalisasi penggunaan teknologi ramah lingkungan 5) Memperkuat kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelolaan sumber daya air dan Kawasan lindung 6) Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (terkait pengelolaan lingkungan hidup) secara adil dan konsisten 7) Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis 8) Merencanakan usaha ekonomi produktif (pertanian dan perkebunan) dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan 9) Mendorong terwujudnya <i>good mining practise</i> penambang di Kab. Banjar dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pengelolaan pertambangan dengan tertib bagi pengusaha tambang sebesar 70% 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung 2) Tersedianya sarana ruang terbuka hijau 3) Mengontrol sistem penegakan hukum dan pemerintahan (terkait pengelolaan lingkungan hidup) yang baik secara adil dan konsisten 4) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 5) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam 6) Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 7) Meningkatkan upaya pemulihan kualitas lingkungan 8) Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana 9) Mendorong terwujudnya <i>good mining practise</i> penambang di Kab. Banjar dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pengelolaan pertambangan dengan tertib bagi pengusaha tambang sebesar 75% 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantapkan daya dukung lingkungan dalam Pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan 2) Pengelolaan dan pelestarian ruang terbuka hijau berkelanjutan 3) Mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan 4) Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (terkait pengelolaan lingkungan hidup) 5) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 6) Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 7) Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana dan mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis 8) Meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi bidang pertambangan dan air tanah/sungai 9) Mendorong terwujudnya <i>good mining practise</i> penambang di Kab. Banjar dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pengelolaan pertambangan dengan tertib bagi pengusaha tambang sebesar 80%

Prioritas / Tujuan / Sasaran	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025			
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
		10) Meningkatkan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; melalui pelaksanaan reklamasi dan revegetasi pasca pertambangan, sebesar 250 Ha	10) Meningkatkan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, melalui pelaksanaan reklamasi dan revegetasi pasca pertambangan, sebesar 500 Ha	10) Meningkatkan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, melalui pelaksanaan reklamasi dan revegetasi pasca pertambangan, sebesar 750 Ha
6.3. Terwujudnya pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rencana tata ruang wilayah 2) Menyusun rencana pembangunan 3) Meningkatkan ketersediaan data spasial 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan ketersediaan data spasial 2) Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan 4) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang 5) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu 6) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tata ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan ketersediaan data spasial 2) Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang 4) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu 5) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tata ruang 6) Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan ketersediaan data spasial 2) Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang 4) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu 5) Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

Bab 4

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banjar

A. Penapisan Indikator TPB yang Relevan

Penapisan indikator TPB yang relevan di Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Metadata Indikator TPB Edisi 1. Dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 197 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Banjar ditambah 1 indikator khas kabupaten (indikator 2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan) sebagaimana disajikan pada **Tabel 5**, sedangkan justifikasi indikator yang tidak relevan disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 5. Jumlah Indikator TPB yang Relevan di Kabupaten Banjar

No TPB	Tujuan TPB	Indikator Relevan				Tidak Relevan	Total
		A	B	C	D		
PILAR SOSIAL		65	21	9	1	1	97
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	18	5	0	0	1	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	4	0	1	0	12
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	22	5	7	0	0	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	9	4	0	0	0	13
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	9	3	2	0	0	14

No TPB	Tujuan TPB	Indikator Relevan				Tidak Relevan	Total
		A	B	C	D		
PILAR EKONOMI		23	13	14	0	10	60
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	0	0	0	0	2	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	9	2	8	0	0	19
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	3	6	0	0	4	13
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	5	1	1	0	3	10
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	4	4	0	1	16
PILAR LINGKUNGAN		21	9	1	0	12	43
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	8	4	1	0	5	18
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	5	3	0	0	5	13
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	4	1	0	0	0	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	0	2	0	0	0	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3	0	0	0	2	5
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA		13	2	6	0	0	21
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	13	2	6	0	0	21
TOTAL		122	46	29	1	23	220 + 1

Keterangan :

A : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018, Perpres No. 59/2017 dan Metadata 1

B : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018, Perpres No. 111/2022 dan Metadata 1

C : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018 dan Metadata 1

D : Indikator TPB terdapat pada Permendagri No. 07/2018 dan Perpres No. 59/2017 sebagai indikator khas kabupaten

(mengacu Perda KalSel No. 6 tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042, Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai salah satu kawasan pertanian dan lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Selatan)

Tabel 6. Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan di Kabupaten Banjar

Indikator TPB [Permendagri No. 07/2018 dan Metadata 1]		Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan
PILAR SOSIAL		
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan ketenagalistrikan menjadi kewenangan pusat dan provinsi

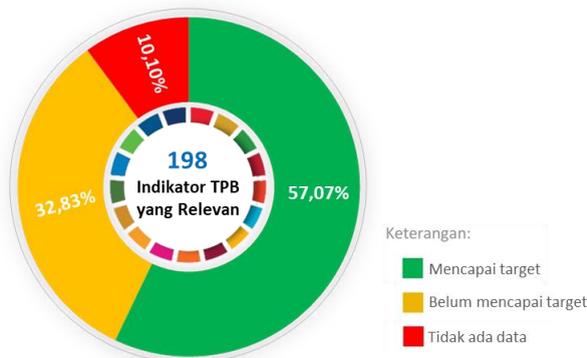
Indikator TPB [Permendagri No. 07/2018 dan Metadata 1]		Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan
PILAR EKONOMI		
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan pusat dan provinsi
7.3.1*	Intensitas energi primer	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan pusat dan provinsi
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Tidak ada jalan tol di Kabupaten Banjar
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Tidak ada jalur kereta api di Kabupaten Banjar
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Tidak ada dermaga penyeberangan di Kabupaten Banjar
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Tidak ada pelabuhan strategis di Kabupaten Banjar
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Mengacu Perpres No. 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk Daerah Tertinggal
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Mengacu Perpres No. 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk Daerah Tertinggal
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Mengacu Perpres No. 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk Daerah Tertinggal
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Kabupaten Banjar tidak termasuk dalam 122 Kabupaten 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
PILAR LINGKUNGAN		
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Kabupaten Banjar tidak termasuk daerah yang terdapat salah satu dari 15 danau prioritas
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kabupaten Banjar tidak berada di dalam wilayah 108 DAS Prioritas Nasional (SK. 328/Menhut-II/2009)
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Kabupaten Banjar tidak termasuk dalam wilayah Sungai strategis nasional
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai & danau	Kabupaten Banjar tidak termasuk dalam wilayah Sungai strategis nasional
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kabupaten Banjar tidak termasuk dalam wilayah Sungai strategis nasional
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	Kabupaten Banjar tidak menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kabupaten Banjar tidak termasuk kab./kota di luar Jawa yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan baru sebagai PKN (buku III RPJMN 2015-2019)
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Kabupaten Banjar tidak termasuk kabupaten/kota yang menjadi/memiliki kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Kabupaten Banjar tidak menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Kabupaten Banjar tidak menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Mengacu UU 23 tahun 2014, sejak 2016 urusan/sub urusan pengelolaan hutan menjadi kewenangan pusat dan provinsi
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Kabupaten Banjar tidak berada di dalam wilayah 108 DAS Prioritas Nasional (SK. 328/Menhut-II/2009)

B. Analisis Capaian Indikator TPB

Analisis capaian indikator TPB Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan data capaian indikator TPB tahun 2012 – 2022 terhadap target sasaran TPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Untuk indikator TPB yang belum ditentukan targetnya dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, maka target sasaran TPB akan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Sementara itu, untuk indikator TPB yang belum ditentukan targetnya dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 maupun Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, maka capaian indikator TPB ditentukan secara kualitatif. Pada kajian KLHS ini hasil analisis capaian TPB diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu :

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- 3) Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)
- 4) Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 198 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 113 indikator TPB (57,07%) mencapai target, 65 indikator TPB (32,83%) belum mencapai target, 20 indikator TPB (10,10%) tidak/belum ada data dan tidak ada indikator TPB (0%) yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (**Gambar 10**).

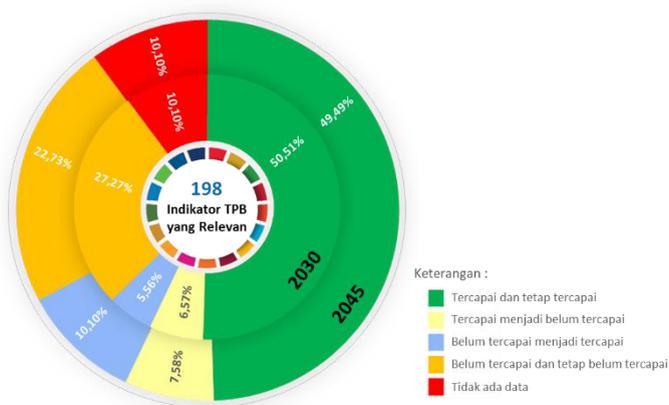


Gambar 10. Status Capaian Indikator TPB tahun 2022

C. Proyeksi Capaian Indikator TPB

Proyeksi capaian masing-masing indikator TPB dilakukan untuk memperkirakan capaian indikator TPB pada tahun 2025 – 2045. Proyeksi ditentukan berdasarkan baseline data capaian TPB Kabupaten Banjar tahun 2012-2022 dan perhitungan tren pertumbuhannya dengan laju perubahan business as usual (BAU) atau laju pertumbuhan umum. Analisis proyeksi capaian indikator TPB Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan data proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030 terhadap target sasaran TPB pada Peta Jalan TPB 2023-2030, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 atau Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sementara itu, untuk analisis proyeksi capaian indikator TPB tahun 2045 menggunakan target sasaran TPB pada RPJPN 2025-2045, Peta Jalan TPB 2023-2030, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 atau Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Untuk indikator TPB yang belum ditentukan targetnya, maka capaian indikator TPB ditentukan secara kualitatif (perlu peningkatan atau perlu penurunan).

Hasil proyeksi capaian indikator TPB yang relevan di Kabupaten Banjar pada tahun 2030 menunjukkan bahwa terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang pada tahun 2022 mencapai target dan tetap mencapai target pada tahun 2030, 13 indikator TPB (6,57%) yang pada tahun 2022 mencapai target menjadi belum mencapai target pada tahun 2030, 11 indikator TPB (5,56%) yang pada tahun 2022 belum mencapai target menjadi mencapai target pada tahun 2030, 54 indikator TPB (27,27%) yang pada tahun 2022 belum mencapai target dan tetap belum mencapai target pada tahun 2030, dan 20 indikator TPB (10,10%) yang pada tahun 2022 dan 2030 tidak/belum ada data (**Gambar 11**).



Gambar 11. Proyeksi Status Capaian Indikator TPB tahun 2030 dan 2045

Sementara itu, hasil proyeksi capaian indikator TPB tahun 2045 menunjukkan bahwa terdapat 98 indikator TPB (49,49%) yang pada tahun 2022 mencapai target dan tetap mencapai target pada tahun 2045, 15 indikator TPB (7,58%) yang pada tahun 2022 mencapai target menjadi belum mencapai target pada tahun 2045, 20

indikator TPB (10,10%) yang pada tahun 2022 belum mencapai target menjadi mencapai target pada tahun 2045, 45 indikator TPB (22,73%) yang pada tahun 2022 belum mencapai target dan tetap belum mencapai target pada tahun 2045, dan 20 indikator TPB (10,10%) yang pada tahun 2022 dan 2045 tidak/belum ada data.

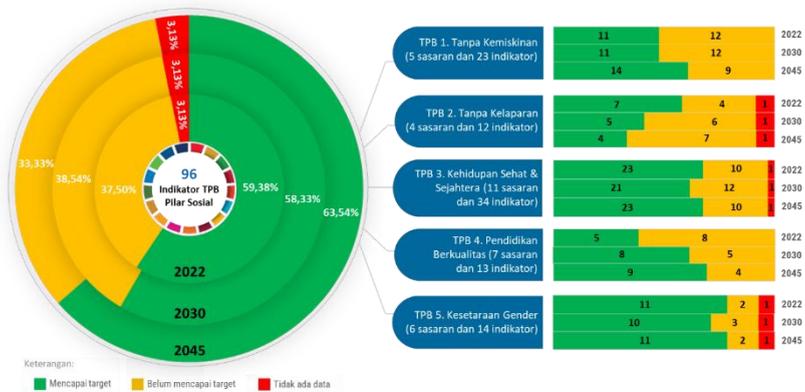
D. Rekapitulasi Data Capaian Indikator TPB

1) Pilar Pembangunan Sosial

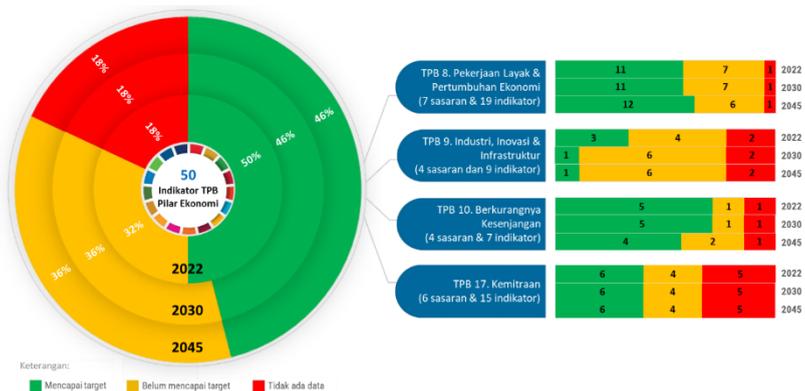
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 57 indikator TPB (59,38%) mencapai target, 36 indikator TPB (37,50%) belum mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 56 indikator TPB (58,33%) mencapai target, 37 indikator TPB (38,54%) belum mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 61 indikator TPB (63,54%) mencapai target, 32 indikator TPB (33,33%) belum mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada **Gambar 12**.

2) Pilar Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 25



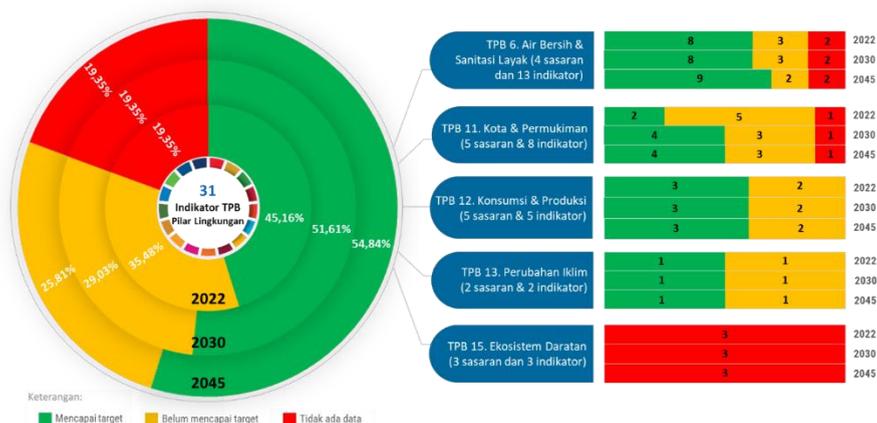
Gambar 12. Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial indikator TPB (50%) mencapai target, 16 indikator TPB (32%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 maupun 2045 terdapat sebanyak 23 indikator TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada **Gambar 13**.



Gambar 13. Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi

3) Pilar Pembangunan Lingkungan

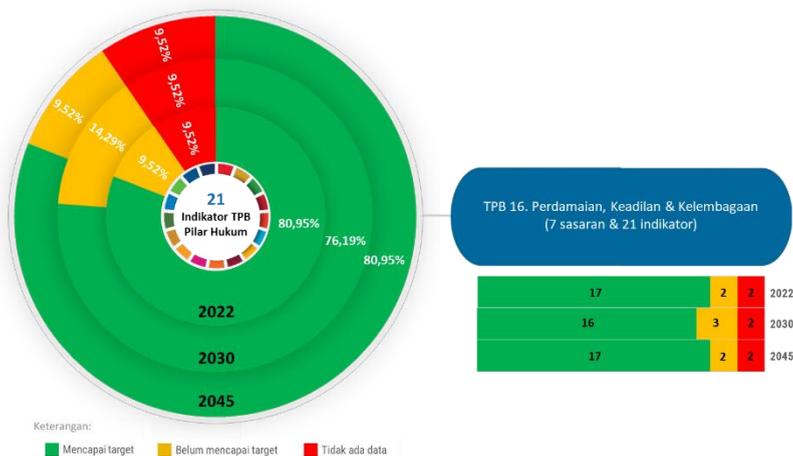
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 14 indikator TPB (45,16%) mencapai target, 11 indikator TPB (35,48%) belum mencapai target dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 16 indikator TPB (51,61%) mencapai target, 9 indikator TPB (29,03%) belum mencapai target, dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 17 indikator TPB (54,84%) mencapai target, 8 indikator TPB (25,81%) belum mencapai target, dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada **Gambar 14**.



Gambar 14. Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan

4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa terdapat sebanyak 17 indikator TPB (80,95%) mencapai target, 2 indikator TPB (9,52%) belum mencapai target, dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 16 indikator TPB (76,19%) mencapai target, 3 indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 17 indikator TPB (80,95%) mencapai target, 2 indikator TPB (9,52%) belum mencapai target, dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada Gambar 4.6..

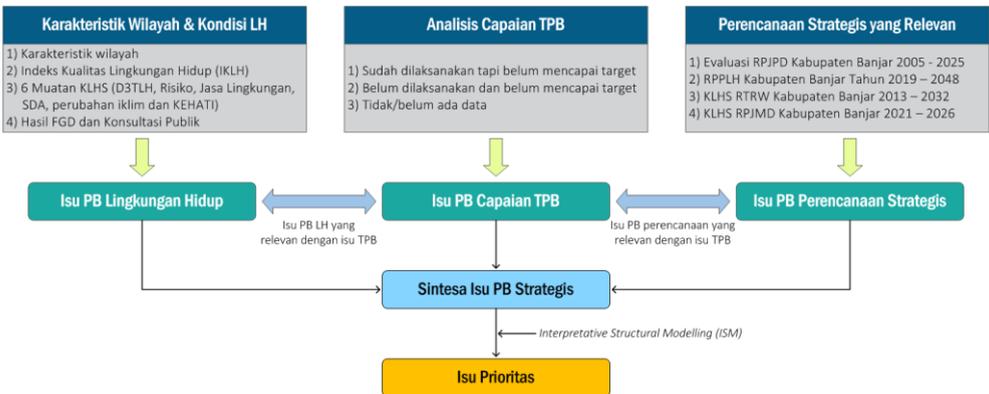


Gambar 15. Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Bab 5

Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui proses sintesa isu strategis dari berbagai sumber (**Gambar 16**) untuk menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan (PB) strategis. Selanjutnya isu prioritas pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan Teknik Pemodelan Interpretasi Struktural (*Interpretative Structural Modelling/ISM*).



Gambar 16. Sintesa Isu Strategis

A. Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan capaian indikator TPB mengacu pada hasil proyeksi tahun 2030 dan 2045 (terutama indikator TPB dengan status belum mencapai target [SB], belum dilaksanakan [BB] dan tidak/belum ada data [NA]) yang diinteraksikan dengan 6 muatan

KLHS, karakteristik wilayah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selanjutnya, permasalahan yang mengemuka dikelompokkan sehingga menghasilkan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan capaian TPB, sebagaimana disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk dapat memberikan jaminan sosial sesuai dengan target yang ditetapkan • Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan fasilitas sekolah sesuai dengan target yang ditetapkan • Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan target yang ditetapkan • Dominasi usaha sektor informal yang tidak wajib pajak dan menyebabkan terbatasnya pendapatan daerah dari sektor pajak 	Kemampuan keuangan daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan aksesibilitas wilayah menyebabkan meningkatnya unmet need pelayanan kesehatan • Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan • Terbatasnya akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan terlatih yang memberikan pelayanan persalinan • Masih tingginya kasus komplikasi kehamilan • Masih tingginya persalinan non nakes dan di luar faskes • Masih terbatasnya layanan konseling kontrasepsi dan kesehatan reproduksi • Masih terbatasnya layanan konseling UBM (upaya berhenti merokok) 	Layanan kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan menengah • Terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan menengah • Terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas • Terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan akademik dan sertifikasi pendidik sesuai dengan target yang ditetapkan • Belum meratanya distribusi tenaga pendidik 	Layanan pendidikan

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana Poskesdes untuk pertolongan persalinan • Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Pendidikan • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik • Terbatasnya infrastruktur jaringan internet • Terbatasnya infrastruktur jaringan mobile broadband • Terbatasnya infrastruktur penunjang industri manufaktur • Terbatasnya infrastruktur penunjang pariwisata 	Ketersediaan sarana prasarana/ infrastruktur daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko bencana di Kab. Banjar terutama banjir, kebakaran lahan dan kekeringan, serta potensi risiko bencana gempa bumi • Faktor risiko tinggi terutama karena permukiman penduduk sebagian besar berada pada wilayah rawan bencana • Gagal panen pertanian padi akibat perubahan iklim 	Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian • Belum dilakukannya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 	Alih fungsi lahan pertanian
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pencemaran perairan sumber air baku menyebabkan peningkatan biaya pengolahan air minum 	Pencemaran perairan sumber air baku
<ul style="list-style-type: none"> • Iklim investasi yang kurang kondusif • Terbatasnya inovasi dan teknologi pengembangan industri manufaktur • Masih terbatasnya produk wisata 	Ketergantungan perekonomian daerah pada pemanfaatan sumber daya lahan
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelayanan publik • Masih belum meratanya pemahaman standar pelayanan publik • Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk mendukung sektor industri manufaktur • Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata • Terbatasnya lapangan kerja formal karena dominasi usaha sektor informal dalam perekonomian Kab. Banjar • Terbatasnya lapangan kerja sektor industri manufaktur • Terbatasnya akses informasi tentang sertifikasi pendidik, terutama bagi guru di wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten 	Sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan yang dimiliki angkatan kerja tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor formal • Belum adanya kegiatan pendataan jumlah pekerja industri pariwisata 	
<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdatanya siswa yang bersekolah setingkat SMP pada lembaga pendidikan non formal (terutama Pesantren) • Belum adanya kegiatan pendataan <i>unmet need</i> pelayanan kesehatan pada setiap kecamatan dan/atau puskesmas • Belum adanya kegiatan skrining/pemeriksaan filariasis pada penduduk di setiap kecamatan • Belum adanya kegiatan pendataan jumlah perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi • Belum optimalnya komitmen lintas program dan lintas sektor dalam mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba • Belum dilakukan pendataan anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis • Belum adanya kegiatan pendataan jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan • Belum adanya kegiatan pendataan rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan sabun dan air • Belum ada program insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri • Belum adanya kegiatan pendataan nilai tambah industri kecil terhadap sektor industri • Belum adanya kegiatan pendataan jumlah industri kecil dengan pinjaman atau kredit • Belum adanya kegiatan pendataan institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan • Belum dilakukan pendataan jumlah pekerja informal • Belum terdatanya peserta SJSN – BPJS pekerja informal • Belum dilakukan pendataan jumlah Perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) • Belum dilakukan pendataan jumlah produk ramah lingkungan yang teregister (RG) dan label ramah lingkungan (LB) 	Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati • Belum dilakukan pendataan tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 • Belum dilakukan pendataan Jumlah dokumen daftar rencana KPBU (DRK) • Belum dilakukan pendataan Jumlah proyek skema kerjasama pemerintah & badan usaha • Belum dilakukan pendataan anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. • Belum dilakukan pendataan jumlah kepemilikan sertifikat PPID • Belum dilakukan pendataan indikator SDGs terpilih yang relevan • Belum dilakukan pendataan jumlah rumah tangga terlayani jaringan pitalebar • Terbatasnya akurasi data peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Masih rendahnya hasil skrining kebutuhan ber-KB, karena masih kurangnya minat/kunjungan PUS untuk konseling KB • Masih rendahnya hasil skrining korban hukuman fisik dan/atau agresi psikologis, karena adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan • Masih lemahnya sistem pengaduan dan penanganan keluhan Masyarakat • Budaya birokrasi yang lamban dalam pelayanan public • Terbatasnya sistem penagihan pajak • Update perhitungan IRBI Kab. Banjar belum dilakukan secara rutin 	
<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat (orang tua) tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi anak usia 12-23 bulan • Masih rendahnya pemahaman masyarakat (orang tua) tentang pentingnya kecukupan gizi pada balita • Masih adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap program imunisasi bagi anak usia 12-23 bulan • Masih adanya penolakan/keengganan sebagian masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi • Masih rendahnya kesadaran masyarakat (terutama ibu hamil) untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin 	<p>Pengetahuan dan daya saing masyarakat</p>

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kepercayaan di sebagian masyarakat yang turun temurun dan merasa nyaman ditolong oleh DK (Dukun Kampung) • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok • Masih adanya keengganan masyarakat untuk menyekolahkan anak perempuan hingga tingkat pendidikan menengah atau lebih tinggi • Biaya layanan air minum tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat • Biaya layanan sanitasi tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat • Semakin meningkatnya harga hunian layak yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hunian yang layak • Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap standar pelayanan publik • Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak • Harga pangan untuk memenuhi kriteria makanan sehat dan bergizi tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat • Stigma masyarakat terhadap pekerjaan manufaktur sebagai pekerja kasar dan tidak bergengsi • Biaya layanan mobile broadband yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat • Biaya layanan internet yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat • Masih terbatasnya akses literasi digital masyarakat 	

B. Isu PB Berdasarkan Perencanaan Strategis

1) Evaluasi RPJPD Kabupaten Banjar 2005 - 2025

Permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia

- Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pada layanan kesehatan dasar dan rujukan
- Masih ada stigma yang menghambat peran perempuan di ranah publik
- Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat
- Belum semua pesantren mewajibkan peserta didik mengikuti Pendidikan penyeteraan
- Masih tingginya angka putus sekolah, anak bekerja maupun menikah dini akibat terbatasnya kemampuan ekonomi keluarga
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam manfaat dan pemenuhan pangan dan gizi
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam manfaat dan pemenuhan sanitasi dan ketersediaan air bersih
- Masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak
- Masih rendahnya kesiapan masyarakat sekitar destinasi wisata
- Ketidaksiapan keterampilan tenaga kerja
- Terbatasnya pelaksanaan pelatihan kerja pada Masyarakat

b. Tata Kelola Pemerintahan

- Terbatasnya infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian
- UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) baru berdiri dan masih belum ada bagian perlindungan hukum.
- Belum tersedianya sarpras: pusat kreatifitas anak, ruang bermain layak anak, dan videotron tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Belum optimalnya pelibatan dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam mendukung KLA
- Belum optimalnya sinergi antar SKPD dalam perihal promosi pariwisata

- Kompleksitas mekanisme penyaluran bantuan hibah bagi kelompok tani, perikanan dan IKM
 - Masih rendahnya amenities pada destinasi wisata, sehingga mengurangi daya tarik wisata
 - Belum optimalnya pemasaran program wisata daerah
 - Terbatasnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi
- c. Perekonomian
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah
 - Adanya keterbatasan ekonomi Perempuan sebagai kepala keluarga
 - Metode produksi dan pemasaran pelaku usaha masih tradisional
 - Sebagian besar kelompok tani, perikanan dan IKM (industri kecil menengah) di Kabupaten Banjar belum berbadan hukum
 - Masih rendahnya kesadaran kelompok tani, perikanan dan IKM untuk melaksanakan kewajiban lapor data kegiatannya
- d. Lingkungan
- Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan
 - Masih tingginya laju alih fungsi lahan pertanian
 - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelanggaran lingkungan

2) RPPLH Kabupaten Banjar Tahun 2019 – 2048

Isu strategis berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan
- b. Penurunan kualitas air sungai
- c. Penurunan kualitas udara

- d. Ketahanan pangan
- e. Penyediaan air bersih
- f. Sampah dan Limbah B3
- g. Kebakaran hutan dan lahan

3) KLHS RTRW Kabupaten Banjar 2013 – 2032

Isu strategis berdasarkan KLHS RTRW Kabupaten Banjar 2013 – 2032 adalah sebagai berikut:

- a. Isu PB Prioritas Lingkungan
 - Tutupan lahan
 - Tata air
 - Bencana
- b. Isu PB Prioritas Ekonomi
 - Pangan
 - Kesesuaian lahan
 - Perdagangan, industri, jasa dan pariwisata
- c. Isu PB Prioritas Sosial
 - Kemiskinan
 - Pendidikan berkualitas
 - Kesehatan ibu dan anak

4) KLHS RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

Isu strategis berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Alih fungsi lahan
- d. Air (kualitas, kuantitas dan kontinuitas),
- e. Infrastruktur
- f. Sanitasi (sampah dan limbah)

C. Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Hasil Konsultasi Publik

Berdasarkan hasil konsultasi publik penyusunan

KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023, isu strategis kondisi daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- a. Meningkatnya alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian (sawah) menjadi lahan non pertanian
- b. Meningkatnya kejadian bencana hidro-meteorologi, terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan
- c. Meningkatnya kejadian gagal panen
- d. Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, terutama jaringan jalan, penerangan jalan umum, sistem drainase, sistem penyediaan air bersih, sistem sanitasi/air limbah
- e. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- f. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata
- g. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar
- h. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba
- i. Meningkatnya pencemaran air
- j. Kondisi TPA Cahaya Kencana yang over capacity
- k. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
- l. Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB

D. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan

Sintesa isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menggabungkan dan mengelompokkan isu strategis berdasarkan capaian TPB, kondisi 6 muatan KLHS, dokumen perencanaan terkait dan hasil konsultasi publik sebagaimana disajikan pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banjar

Isu PB Berdasarkan Capaian TPB	Isu PB Berdasarkan Perencanaan yang Relevan				Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Hasil Konsultasi Publik	Sifat Isu		Pengelompokan Isu PB	TPB yang Relevan
	Evaluasi RPJPD 2005-2025	RPPLH 2019 – 2048	KLHS RTRWK 2013 – 2032	KLHS RPJMD 2021 – 2026		Dampak	Akar Masalah		
<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan keuangan daerah Tata Kelola Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Pemerintahan 	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB 	-	√	Tata Kelola Pemerintahan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17
<ul style="list-style-type: none"> Layanan Kesehatan Layanan Pendidikan Ketersediaan sarana prasarana/ infrastruktur daerah Sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan Pengetahuan dan daya saing masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan air bersih Ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kemiskinan Pangan Pendidikan berkualitas Kesehatan ibu dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Kesehatan Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya rata-rata lama sekolah Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba 	-	√	Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17
<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Bencana 	-	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi Meningkatnya kejadian gagal panen 	-	√	Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim	1, 11, 13
<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi lahan pertanian 	-	<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi lahan 	-	<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya alih fungsi lahan 	-	√	Alih fungsi lahan	2
<ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan perekonomian daerah pada pemanfaatan sumber daya lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Perekonomian 	-	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan, industri, jasa dan pariwisata 	-	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan UMKM Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata 	-	√	Pertumbuhan ekonomi/ ekonomi hijau	8, 9
<ul style="list-style-type: none"> Pencemaran perairan sumber air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan kualitas air sungai Penurunan kualitas udara Sampah dan Limbah B3 Kebakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Tutupan lahan Tata air Kesesuaian lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Air (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) Sanitasi (sampah dan limbah) 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pencemaran air Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3 Kondisi TPA Cahaya Kencana yang <i>over capacity</i> 	√	-	-	-

Berdasarkan **Tabel 8** tersebut diperoleh 5 isu PB strategis di Kabupaten Banjar, yaitu:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan
- 2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia
- 3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
- 4) Alih fungsi lahan
- 5) Pertumbuhan ekonomi/ ekonomi hijau

E. Analisis Isu Prioritas

Analisis isu prioritas pembangunan Kabupaten Banjar 2025-2045 dilakukan dengan Teknik Pemodelan Interpretasi Struktural (*Interpretative Structural Modelling-ISM*). ISM merupakan suatu teknik pemodelan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar elemen dalam suatu sistem dan memecahkannya dalam bentuk grafik berdasarkan tingkat hierarki elemen.

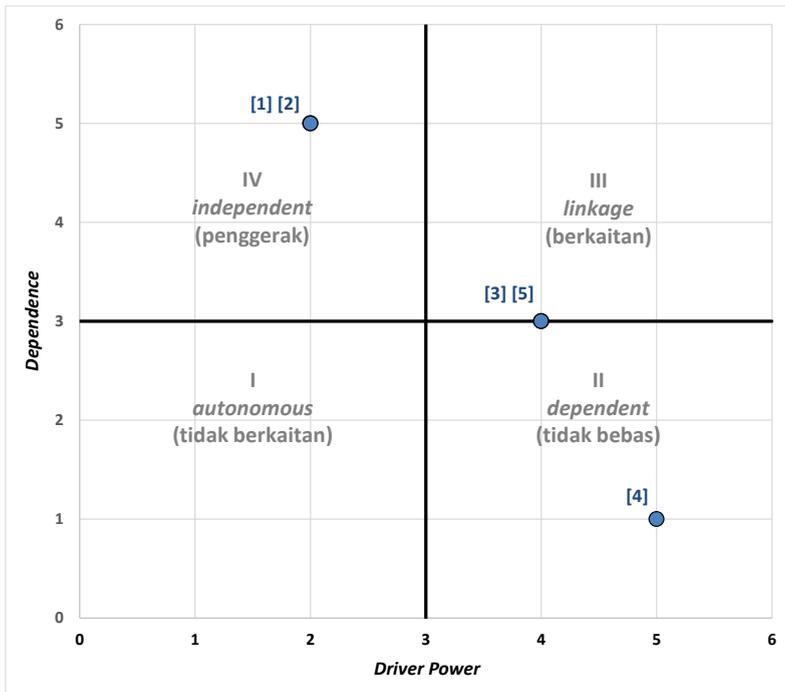
Data analisis ISM berdasarkan pendapat 20 responden yang merupakan anggota Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 dengan input isu PB strategis sebagai berikut :

- E1 : Tata Kelola Pemerintahan
- E2 : Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia
- E3 : Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
- E4 : Alih fungsi lahan
- E5 : Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

Hasil analisis ISM terhadap elemen isu PB strategis disajikan pada **Tabel 9**, sedangkan kedudukan setiap sub-elemen isu PB strategis disajikan pada **Gambar 17**.

Tabel 9. *Reachability Matrix Final* Sub Elemen Isu PB Strategis

Sub Elemen	1	2	3	4	5	Driver Power	Ranks
E1	1	1	1	1	1	5	1
E2	1	1	1	1	1	5	1
E3	0	0	1	1	1	3	2
E4	0	0	0	1	0	1	3
E5	0	0	1	1	1	3	2
<i>Depedence</i>	2	2	4	5	4		
<i>Level</i>	3	3	2	1	2		



Gambar 17. Kedudukan Setiap Sub Elemen Isu PB strategis

Berdasarkan hasil analisis ISM diketahui bahwa isu prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten Banjar 2025 – 2045 adalah :

- 1) Tata Kelola Pemerintahan
- 2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia
- 3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
- 4) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau
- 5) Alih fungsi lahan

Pada **Gambar 17**, dua sub elemen kunci isu PB strategis Kabupaten Banjar yaitu E1 (tata kelola pemerintahan) dan E2 (pelayanan dasar dan sumberdaya manusia) terletak pada kuadran IV (independent). Kedua sub elemen kunci tersebut mempunyai nilai penggerak yang tertinggi dan nilai ketergantungan sangat rendah. Kondisi ini dapat diartikan bahwa apabila tata kelola pemerintahan, serta pelayanan dasar dan sumberdaya manusia ditingkatkan, maka keduanya menjadi penggerak positif atau akan meningkatkan kualitas 2 sub elemen di kuadran III (linkage) yaitu: E3 (ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim) dan E5 (Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau). Sementara itu, dua sub elemen di kuadran III merupakan penghubung antara 2 sub elemen di kuadran IV dengan 1 sub elemen di kuadran II. Kondisi ini dapat diartikan bahwa perbaikan/peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau dapat mengurangi alih fungsi lahan (E4).

Bab 6

Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Perumusan alternatif skenario dan rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 mengacu pada hasil analisis capaian indikator TPB tahun 2022, proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030 dan tahun 2045, serta hasil identifikasi permasalahan masing-masing indikator TPB yang telah dianalisis.

A. Tanpa Upaya Tambahan

Skenario dan rekomendasi tanpa upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB telah mencapai atau melampaui target yang ditentukan, dan selanjutnya pencapaian indikator TPB dilakukan dengan upaya yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (*business as usual*).

B. Dengan Upaya Tambahan

Skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB belum mencapai target yang ditentukan dan untuk indikator TPB yang belum/tidak ada data. Skenario pencapaian TPB dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target TPB. Skenario optimis dipilih apabila upaya percepatan diproyeksikan mencapai target pada tahun 2030, sedangkan skenario moderat dipilih apabila upaya percepatan diproyeksikan mencapai target pada tahun 2045.

Tabel 10. Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB					OPD	Sasaran	Rekomendasi	Arah Kebijakan			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045							
PILAR SOSIAL															
TPB 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun															
Target TPB 1.3. Menetapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan															
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkat menjadi 17,12% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 17,12% (Perpres 59/2017)	16,07%	20,34%	27,44%	34,55%	41,65%	48,76%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2K8	Meningkatnya pemenuhan hak dasar & inklusi wias penyandang disabilitas pada tahun 2045 menjadi 17,12%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas; • peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur; • penyelenggaraan pendidikan inklusif; • pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan; • perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan; • peningkatan teknologi informasi; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
1.3.1.(e)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurun (Perpres 59/2017)	Menurun (Perpres 59/2017)	8.481	7.512	5.950	4.368	2.787	1.205	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2K8	Menurunnya jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses dan kualitas pendidikan; • peng-atan ekonomi lokal dan lapangan pekerjaan; • peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
Target TPB 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi, data, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro															
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SeDerajat	Meningkat menjadi 94,78% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 94,78% (Perpres 59/2017)	99,18%	99,27%	99,42%	99,57%	99,72%	99,87%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya APM SD/MI/SeDerajat pada tahun 2045 menjadi 94,78%	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; • peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Meningkat menjadi 77,40% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 77,40% (Perpres 59/2017)	86,33%	87,07%	88,32%	89,57%	90,82%	92,07%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdukcapil	Meningkatnya kepemilikan akta lahir untuk pada tahun 2045 menjadi 77,40%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses dan infrastruktur pelayanan catatan sipil; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
Target TPB 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	24	30	40	50	60	70	Mencapai Target	Mencapai Target	B/B/D	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> • pemetaan risiko dan zonasi wilayah; • pengembangan infrastruktur tahan bencana; • penguatan kapasitas lembaga lokal; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Terpenuhi (Perpres 59/2017)	Terpenuhi (Perpres 59/2017)	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2K8	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial	<ul style="list-style-type: none"> • pemetaan risiko dan zonasi wilayah; • penyediaan bantuan kebutuhan dasar; • penyediaan pelayanan kesehatan dan psikososial; • penguatan kapasitas lembaga lokal; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Terlaksana (Perpres 59/2017)	Terlaksana (Perpres 59/2017)	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2K8	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	<ul style="list-style-type: none"> • pemetaan risiko dan zonasi wilayah; • penyediaan bantuan kebutuhan dasar; • penyediaan pelayanan kesehatan dan psikososial; • penguatan kapasitas lembaga lokal; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
1.5.1.(e)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB: Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	0	1	2	3	4	5	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • pemetaan risiko dan zonasi wilayah; • penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan khusus; • pengembangan kurikulum dan kapasitas guru; • dukungan pelayanan kesehatan dan ps kososial; • penguatan kapasitas lembaga lokal; 	

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	2	3	4	5	6	6	Mencapai Target	Mencapai Target	RPRD	Meningkatnya jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • penguatan kapasitas lembaga lokal; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan
Target TPB														
1.a. Menjamin mobilitas yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi														
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemerantasan kemiskinan	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	0,57%	0,63%	0,73%	0,57%	0,58%	0,58%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPKPAD	Meningkatnya alokasi sumber daya untuk program pemerantasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • penguatan kapasitas lembaga lokal; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • penetapan prioritas anggaran; • peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran; • integrasi program pemerantasan daerah; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	46,48%	47,17%	48,32%	49,47%	50,62%	51,77%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPKPAD	Meningkatnya pengeluaran untuk layanan pokok dari total belanja pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran; • integrasi program pemerantasan daerah; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan
TPB 2. Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
Target TPB														
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula														
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)	16,23%	15,51%	14,31%	13,11%	11,91%	10,71%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) baduta pada tahun 2045 menjadi 28%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi; • peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 28% (Perpres 59/2017)	12,98%	14,09%	15,94%	17,79%	19,64%	21,40%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya preva lensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2045 menjadi 28%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan suplementasi dan pemantauan gizi; • peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 50% (Perpres 59/2017)	75,16%	78,16%	83,16%	88,16%	93,16%	98,16%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya persen-tase bayi < 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan
Target TPB														
2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian														
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah pertanaga kerja).	Meningkat menjadi Rp. 62,65 (Tenaga kerja/thn (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi Rp. 52,65 (Tenaga kerja/thn (Roadmap SDGs 2030)	33,00	37,26	44,36	51,46	58,56	65,66	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Distan	Meningkatnya nilai tambah pertanian pada tahun 2045 menjadi Rp. 62,65 /tenaga kerja/thn	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • pengembangan infrastruktur pertanian; • penguatan kapasitas petani; • diversifikasi produksi pertanian; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata keola pemerintahan
Target TPB														
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan														
2.4.1	Peneleapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Ditetapkan (Perpres 59/2017)	Ditetapkan (Perpres 59/2017)	Belum Ditetapkan	Belum Ditetapkan	Ditetapkan	Ditetapkan	Ditetapkan	Ditetapkan	Mencapai Target	Mencapai Target	DPU/PR	Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • identifikasi dan zonasi kawasan pertanian; • pengembangan infrastruktur pertanian; • pemberdayaan petani dan masyarakat lokal;

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
TPB 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia														
Target TPB 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal: setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000														
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 18,8 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 18,8 (Roadmap SDGs 2030)	0,68	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Menurunnya Angka Kematian Balita (AKBa) pada tahun 2045 menjadi 18,8	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal; • peningkatan pencegahan dan penyulutan penyakit menular; • peningkatan akses air bersih dan sanitasi; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 7,0 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 7,0 (Roadmap SDGs 2030)	5,87	5,12	3,87	2,62	1,37	0,12	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Menurunnya Angka Kematian Neonatal (AKN) pada tahun 2045 menjadi 7,0	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal; • peningkatan pencegahan dan penyulutan penyakit menular; • peningkatan akses air bersih dan sanitasi; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 12 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 12 (Roadmap SDGs 2030)	2,62	2,56	2,46	2,36	2,26	2,16	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2045 menjadi 12	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal; • peningkatan pencegahan dan penyulutan penyakit menular; • peningkatan akses air bersih dan sanitasi; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya														
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,3% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi <0,3% (Perpres 59/2017)	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,07%	0,09%	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2045 menjadi <0,5%	<ul style="list-style-type: none"> • pencegahan, pengujian dan penyaringan penularan HIV; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Menurunnya Kejadian Malaria per 1000 orang pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan program pencegahan dan pengendalian malaria; • peningkatan akses perawatan malaria; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Status Eliminasi Malaria (Roadmap SDGs 2030)	Status Eliminasi Malaria (Roadmap SDGs 2030)	Belum Eliminasi Malaria	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Tercapainya Status Eliminasi Malaria pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan program pengendalian dan surveilans Malaria; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • keberlanjutan dan pemantauan pasca-eliminasi; • peningkatan tata kelola pemerintahan 					
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Status Pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	Status Pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Terlaksananya deteksi dini untuk infeksi Hepa Uti B pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses dan ketersediaan tes Hepatitis B; • peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit Tropis yang terabaikan	Status pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	Status pelaksanaan (Sifat indikator TPB)	F = 0 K = 15	F = 0 K = 15	F = 0 K = 15	F = 0 K = 15	F = 0 K = 15	F = 0 K = 15	Mencapai Target	Vencapai Target	Dinkes	Terlaksananya pendataan jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> • survey dan pemetaan epidemiologi; • penguatan sistem pemantauan dan pelaporan; • peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB							OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan		
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Status Eliminasi Kusta (Perpres 111/2022)	Status Eliminasi Kusta (Perpres 111/2022)	Belum eliminasi kusta	Belum eliminasi kusta	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Tercapainya status Eliminasi Kusta pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan program pengendalian dan surveilans Kusta; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • keberlanjutan dan pemantauan pasca-eliminasi; • peningkatan tata kelola pemerintahan 					
Target TPB 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan															
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 7,5% (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 7,5% (Roadmap SDGs 2030)	1,04%	1,43%	2,08%	2,73%	3,38%	4,03%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya persen tase perokok usia 10-18 tahun pada tahun 2045 menjadi 7,5%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan program layanan konseling upaya berhenti merokok; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan • oromos gaya hidup sehat; 	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 34,1% (Perpres 111/2022)	Menurun menjadi 34,1% (Perpres 111/2022)	8,53%	9,49%	11,09%	12,69%	14,29%	15,89%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya preva lensi obesitas pada penduduk usia ≥18 tahun pada 2045 menjadi ≤ 34,1%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan • oromos gaya hidup sehat; 	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun menjadi 21,8% (Perpres 111/2022)	Menurun menjadi 21,8% (Perpres 111/2022)	4,62%	5,91%	8,06%	10,21%	12,36%	14,51%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Menurunnya preva lensi tekanan darah tinggi pada tahun 2045 menjadi ≤ 21,8%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan • oromos gaya hidup sehat; 	
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target	Mencapai Target	Bakesbangpol	Tidak meningkatnya angka kematian akibat bunuh diri	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan mental; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	24	24	24	24	24	24	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan infrastruktur, fasilitas akses dan kualitas layanan kesehatan jiwa; • pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
Target TPB 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional															
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 23,5% (Perpres 59/2017)	30,45%	37,50%	34,40%	31,39%	28,29%	25,10%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2045 menjadi 23,5%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi; • pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,1 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 2,1 (Roadmap SDGs 2030)	2,20	2,11	1,96	1,81	1,66	1,51	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Menurunnya angka TFR pada tahun 2045 menjadi 2,1.	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi; • pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
Target TPB 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang															
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat (Perpres 111/22)	Meningkat (Perpres 111/22)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya cakupan asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran; • penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan; • kolaborasi dengan stakeholder; • penggunaan teknologi informasi; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022		Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi		
	2030	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045	Sasaran		Arah Kebijakan		
Target TPB	3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah													
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	0%	tidak ada kasus	Mencapai Target	Mencapai Target	Basesbangpol	Menurunnya proporsi kematian akibat keracunan	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan regulasi dan pengawasan; • peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan; • pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 				
Target TPB	3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk memastikan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Asean Aspek Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual terkait keelaksanaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua													
3.b.1.(a)	Persen-tase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat menjadi 96% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 96% (Perpres 111/2022)	96%	96,15%	96,40%	96,65%	96,90%	97,15%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada tahun 2045 menjadi 98%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan regulasi dan pengawasan; • peningkatan manajemen rantai pasokan; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil													
3.c.1*	Kepastian dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat (Perpres 111/22)	Meningkat (Perpres 111/22)	2,82	3,64	4,84	6,04	7,24	8,44	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meratanya kepastian dan distribusi tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan regulasi dan pengawasan; • pengembangan karir dan kesejahteraan tenaga kesehatan; • penguatan infrastruktur kesehatan; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
TPB 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua														
Target TPB	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan elektif													
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	4 SD (AKS) meningkat menjadi: 67,2% (L); 35,5% (N) & 9 SMP (PISA) meningkat menjadi: 50% (L); 38% (N) (Roadmap SDGs 2030)	Meningkatnya rata-rata nilai PISA pada tahun 2045 menjadi 485 (matematika) dan 487 (sains) (RPJPN 2025-2045)	SD : 63,75% (L); 46,66% (N)	SD : 67,02% (L); 47,29% (N)	SD : 72,47% (L); 48,34% (N)	SD : 77,92% (L); 49,39% (N)	SD : 83,37% (L); 50,44% (N)	SD : 88,82% (L); 51,49% (N)	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya rata-rata nilai PISA pada tahun 2045 menjadi 485 (matematika) dan 487 (sains)	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan infrastruktur dan sumber daya pendidikan; • peningkatan kualitas guru; • pelibatan orang tua dan komunitas; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
4.1.1.(b)	Persen-tase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 81% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 81% (Perpres 59/2017)	72,93%	76,50%	82,45%	88,40%	94,35%	100,00%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya persen-tase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2045 menjadi 81%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah; • peningkatan kualitas guru; • peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; • pelibatan orang tua dan komunitas; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
4.1.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 106,24% (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 106,24% (Roadmap SDGs 2030)	110,35%	111,78%	114,15%	116,53%	118,90%	121,28%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya APK SD/MI/ sederajat pada tahun 2045 menjadi 106,24%	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; • peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar													
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 65,51% (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 65,51% (Roadmap SDGs 2030)	75,26%	76,37%	78,21%	80,05%	81,89%	83,73%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdik	Meningkatnya APK PAUD pada tahun 2045 menjadi 65,51%	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; • peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan													
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	68,28%	70,20%	73,40%	76,60%	79,80%	83,00%	Mencapai Target	Mencapai Target	DikSP	Meningkatnya proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan infrastruktur dan akses TIK; • pendidikan dan pelatihan TIK untuk masyarakat; • integrasi TIK dalam kurikulum pendidikan; • pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru;

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						DPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi													
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun	Meningkat menjadi 96,1% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 96,1% (Perpres 59/2017)	97,93%	97,93%	97,93%	97,93%	97,93%	97,93%	Mencapai Target	Mencapai Target	Diskrik	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2045 menjadi 96,1%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai target	Mencapai Target	Diskrik	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan pendidikan dasar dan program literasi; • peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga pengajar; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua													
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (rendiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	35,71%	37,80%	41,26%	44,73%	48,20%	51,67%	Mencapai target	Mencapai target	Diskrik	Meningkatnya proporsi sekolah dengan penyediaan akses sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • investasi infrastruktur dan sarana pendidikan; • peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
TPB	5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan													
Target TPB	5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun													
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	6	6	6	6	6	6	Mencapai target	Mencapai Target	Disos P3AP2K3	Meningkatnya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan; • peningkatan data dan penelitian gender; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya													
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disos P3AP2K3	Menurunnya proporsi Perempuan dan anak perempuan yg mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka dan penegakan hukum; • pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; • perlindungan khusus bagi anak perempuan; • peningkatan layanan dukungan korban kekerasan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
5.2.1(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi < 20,48% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi < 20,48% (Perpres 59/2017)	0,07%	0,12%	0,19%	0,26%	0,34%	0,41%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disos P3AP2K3	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2045 menjadi < 20,48%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka dan penegakan hukum; • pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; • perlindungan khusus bagi anak perempuan; • peningkatan layanan dukungan korban kekerasan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun (Perpres 111/2022)	Menurun (Perpres 111/2022)	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disos P3AP2K3	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka dan penegakan hukum; • pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; • perlindungan khusus bagi anak perempuan; • peningkatan layanan dukungan korban kekerasan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat;

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB								OPD	Rekomendasi	
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045	Sasaran		Arah Kebijakan	
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 70% (Perpres 59/2017)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pd. 2045 menjadi 70%	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan														
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan 18 tahun.	Menurun menjadi 6,94% (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 6,94% (Roadmap SDGs 2030)	0,42%	0,90%	1,70%	2,50%	3,30%	4,10%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 6,94%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses terhadap pendidikan & layanan kesehatan; • pemberdayaan perempuan; • pelibatan tokoh masyarakat dan agama; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)	Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)	32,58	29,96	25,54	21,14	16,74	12,34	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Menurunnya angka ASFR pada tahun 2045 menjadi 18	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi; • pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat														
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintahan daerah.	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD Kab/Kota pada 2045 menjadi 17%	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan kuota gender; • pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	Eselon II meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	Eselon II meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya keterwakilan perempuan berkedudukan Eselon II pada 2045 menjadi 16,39%	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan kuota gender; • pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan														
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat menjadi 75,7% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 75,7% (Perpres 111/2022)	81,62%	82,97%	85,23%	87,47%	89,72%	91,97%	Mencapai Target	Mencapai Target	DKISP	Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada tahun 2045 menjadi 75,7%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; • peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan; • peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas perangkat; • peningkatan literasi digital; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
PILAR EKONOMI														
TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua														
Target TPB 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya														
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB hil per orang bekerja per tahun.	Meningkat menjadi 3,7% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 3,7% (Perpres 111/2022)	4,48%	4,51%	4,56%	4,61%	4,66%	4,71%	Mencapai Target	Mencapai Target	Rapoeda litbang	Meningkatnya Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja pada 2045 menjadi 3,7%	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; • peningkatan akses ekonomi; • penguatan sektor industri dan pertanian; • peningkatan investasi; • peningkatan kualitas sumber daya manusia; • pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif; • peningkatan efisiensi dan produktivitas;

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB 8.3. Mengalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan														
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Meningkat menjadi 30,8% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 30,8% (Perpres 111/2022)	19,20%	22,71%	28,56%	34,41%	40,26%	46,11%	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	DIKUI/PP	Meningkatnya persentase akses UMKM ke layanan keuangan pada 2045 menjadi 30,8%	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi perwujudan dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya														
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	14.548	20.003	28.928	37.853	46.778	55.703	Mencapai Target	Mencapai Target	Disakertrans	Meningkatnya upah rata-rata per jam pekerja	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan produktivitas tenaga kerja; • pengembangan keterampilan dan pendidikan berkelanjutan; • penguatan kelembagaan dan jaringan; • pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif; • peningkatan efisiensi dan produktivitas; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 3,8% (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 4% (RPJPN 2025-2045)	2,72%	2,51%	2,16%	1,81%	1,46%	1,11%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disakertrans	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka pada 2045 menjadi 4%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan pendidikan dan pelatihan; • penciptaan lapangan kerja; • pengembangan pasar tenaga kerja; • dukungan untuk kewirausahaan; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	0,43%	0,40%	0,35%	0,30%	0,25%	0,20%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disakertrans	Menurunnya tingkat setengah pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan pendidikan dan pelatihan; • penciptaan lapangan kerja; • pengembangan pasar tenaga kerja; • dukungan untuk kewirausahaan; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan														
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Menurun (Perpres 59/2017)	Menurun (Perpres 59/2017)	26,83%	25,39%	22,99%	20,59%	18,19%	15,79%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disakertrans	Menurunnya persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan pendidikan dan pelatihan; • penciptaan lapangan kerja; • pengembangan pasar tenaga kerja; • dukungan untuk kewirausahaan; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal														
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat (Roadmap SDGs 2030)	1.063	1.545	2.348	3.152	3.955	4.758	Mencapai Target	Mencapai Target	Disbudparapar	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan destinasi pariwisata; • pengembangan produk wisata; • peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; • penguatan pemasaran dan promosi; • pengembangan sumber daya manusia; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	2.152.383	2.253.759	2.422.719	2.591.679	2.760.639	2.929.599	Mencapai Target	Mencapai Target	Disbudparapar	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan destinasi & produk wisata; • peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; • penguatan pemasaran dan promosi; • pengembangan sumber daya manusia; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (RPI/PN 2025-2045)	396	404	417	430	444	457	Mencapai Target	Mencapai Target	Disbudoperpar	Meningkatnya jumlah devisa sektor pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan destinasi pariwisata; • pengembangan produk wisata; • peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; • penguatan pemasaran dan promosi; • pengembangan sumber daya manusia; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua														
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Perlu Peningkatan (5/fat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (5/fat indikator TPB)	10,68	11,68	12,68	13,68	14,68	15,68	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya jumlah kantor bank dan ATM	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur keuangan; • kerjasama dengan bank; • edukasi dan literasi keuangan; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Perlu Penurunan (5/fat indikator TPB)	Perlu Penurunan (5/fat indikator TPB)	35,99	35,99	35,99	35,99	35,99	35,99	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Menurunnya rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur keuangan; • kerjasama dengan bank; • edukasi dan literasi keuangan; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	467.733	467.763	467.813	467.863	467.913	467.963	Mencapai Target	Mencapai Target	DKUMPP	Meningkatnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur keuangan; • kerjasama dengan bank; • edukasi dan literasi keuangan; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
TPB 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi														
Target TPB 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020														
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat menjadi 75,7% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 79,7% (Perpres 111/2022)	81,62%	82,97%	85,22%	87,47%	89,72%	91,97%	Mencapai Target	Mencapai Target	DKSP	Meningkatnya individu yang memiliki telepon genggam pada 2045 menjadi 75,7%.	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; • peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan telekomunikasi; • peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas perangkat; • peningkatan literasi digital; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
TPB 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara														
Target TPB 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional														
10.1.1*	Koefisien Gini	Menurun menjadi 0,363 (Roadmap SDGs 2030)	Menurun menjadi 0,379 (RPI/PN 2025-2045)	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	Mencapai Target	Mencapai Target	Bappeda- Ilirang	Menurunnya Koefisien Gini pada 2045 menjadi 0,379	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan pemerataan pembangunan; • pengembangan ekonomi dan kewirausahaan; • kebijakan perumahan dan infrastruktur; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Menurun (Perpres 111/2022)	Menurun (Perpres 111/2022)	13	11	10	8	6	4	Mencapai target	Mencapai target	DFMD	Menurunnya Jumlah desa tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar; • kebijakan pemerataan pembangunan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	5	7	9	11	13	15	Mencapai Target	Mencapai Target	DFMD	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar; • kebijakan pemerataan pembangunan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian		Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045	TPB 2022	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan		
Target TPB	10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut														
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan perubahan diskriminasi menurut hukum IIAW Internasional.	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Mencapai Target	Mencapai Target	Bappedalitbang	Menurunkan jumlah kebijakan yang diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> • peninjauan kebijakan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
TPB 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan															
Target TPB	17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang, pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional														
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan data yang akurat dan terkini; • peningkatan kualitas data; • transparansi dan keterbukaan; • peningkatan literasi digital; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	97,10%	97,95%	97,93%	97,93%	97,95%	97,95%	97,95%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan data yang akurat dan terkini; • peningkatan kualitas data; • transparansi dan keterbukaan; • peningkatan literasi digital; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	11	11	11	11	11	11	11	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya jumlah metadata dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan data yang akurat dan terkini; • peningkatan kualitas data; • transparansi dan keterbukaan; • peningkatan literasi digital; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	17.19. Pada tahun 2030, mengadopsi inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang														
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia (Perpres 111/2022)	Tersedia (Perpres 111/2022)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Mencapai Target	Mencapai Target	Disuduki	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; • peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	42,00%	44,91%	49,76%	54,51%	59,46%	64,31%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan data yang akurat dan terkini; • peningkatan kualitas data; • transparansi dan keterbukaan; • peningkatan literasi digital; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan 	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPS	Meningkatnya persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan data yang akurat dan terkini; • peningkatan kualitas data; • transparansi dan keterbukaan; • peningkatan literasi digital; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022		Proyeksi Capaian TPB						OPD	Sasaran	Rekomendasi Arah Kebijakan	
	2030	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045					
PILAR LINGKUNGAN														
TPB 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua														
Target: TPB 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua														
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPRP	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku	<ul style="list-style-type: none"> • investasi dalam infrastruktur air baku; • pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan; • peningkatan kapasitas intitusi dan sumber daya manusia; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 15% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 15% (Perpres 111/2022)	16,77%	16,75%	16,80%	16,85%	16,90%	16,95%	Mencapai Target	Mencapai Target	DPKPIII	Meningkatnya akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada 2045 menjadi 15%	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan infrastruktur air minum; • perlindungan sumber daya air; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target: TPB 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan														
6.2.1.(c)	Jumlah desa/keurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	273	273	273	273	273	273	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya jumlah desa/keurahan yang melaksanakan STBM	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur sanitasi; • penguatan kapasitas dan kelembagaan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/keurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	95	98	103	108	113	118	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinkes	Meningkatnya jumlah desa/keurahan yang melaksanakan SBS	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur sanitasi; • penguatan kapasitas dan kelembagaan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	44/	59/	84/	109/	134/	159/	Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPRP	Meningkatnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur sanitasi; • penguatan kapasitas dan kelembagaan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	3,08%	4,07%	5,72%	7,37%	9,02%	10,67%	Mencapai target	Mencapai Target	DPUPRP	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur sanitasi; • penguatan kapasitas dan kelembagaan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target: TPB 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global														
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT).	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1	1	Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPRP	Meningkatnya kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur sanitasi; • penguatan kapasitas dan kelembagaan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	62,92%	63,19%	63,64%	64,09%	64,54%	64,99%	Mencapai Target	Mencapai Target	DPUPRP	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur sanitasi; • penguatan kapasitas dan kelembagaan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi			
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030		2045	Sasaran	Arah Kebijakan	
TPB	11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
Target TPB	11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi retail, terutama TDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan													
11.5.1.c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedia (Perpres 59/2017)	Tersedia (Perpres 59/2017)	1	2	3	4	5	5	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur teknologi; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target IPB	11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota													
11.6.1.a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 90% (RPJPN 2025-2045)	79,20%	81,06%	84,16%	87,26%	90,36%	93,46%	Mencapai Target	Mencapai Target	DPRKPH	Meningkatnya sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2045 menjadi 90%	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur & teknologi pengelolaan sampah; • penguatan kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah; • pengembangan ekonomi sirkular; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penanganan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembankan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030													
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	2	3	4	5	6	6	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Meningkatnya jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • penguatan kapasitas lembaga lokal; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
TPB	12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan													
Target IPB	12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan													
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	175	176	177	179	180	181	Mencapai Target	Mencapai Target	DPRKPH	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur dan teknologi pengelolaan B3; • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali													
12.5.1.a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkat (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat (RPJPN 2025-2045)	1.000	1.257	1.631	2.025	2.419	2.813	Mencapai Target	Mencapai Target	DPRKPH	Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur & teknologi pengelolaan sampah; • penguatan kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah; • pengembangan ekonomi sirkular; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam													
12.8.1.a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	31	33	35	37	39	41	Mencapai Target	Mencapai Target	DPRKPH	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • pemberian insentif dan dukungan teknis; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
TPB	13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya													
Target TPB	13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara													
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	Jumlah dokumen (Perpres 111/2022)	2	3	4	5	6	6	Mencapai Target	Mencapai Target	BPBD	Meningkatnya jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • penguatan kapasitas lembaga lokal; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian		Proyeksi Capaian TPB						OPD	Rekomendasi		
	2030	2045	TPB 2022	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA														
TPB 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan														
Target TPB 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan teroris angka kematian dimanapun														
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	5	5	5	5	5	5	Mencapai Target	Mencapai Target	Bakesbangpol	Menurunnya jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • pencegahan kriminalitas; • peningkatan keamanan dan pengawasan; • penguatan dan penegakan hukum; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.1.2.(a)	Kemelian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Mencapai target	Mencapai target	Bakesbangpol	Menurunnya kemelian akibat konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> • pencegahan konflik sosial; • peningkatan keamanan dan pengawasan; • penguatan dan penegakan hukum; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.1.3.(a)	Proorsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Mencapai Target	Mencapai Target	Bakesbangpol	Menurunnya penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • pencegahan kriminalitas; • peningkatan keamanan dan pengawasan; • penguatan dan penegakan hukum; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.1.4*	Proorsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat menjadi 60% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 80% (RPJPN 2025 2045)	65,47%	68,15%	72,70%	77,75%	81,80%	85,35%	Mencapai Target	Mencapai Target	Bakesbangpol	Meningkatnya penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	<ul style="list-style-type: none"> • pencegahan kriminalitas; • peningkatan keamanan dan pengawasan; • penguatan dan penegakan hukum; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 16.7. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak														
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	P : 20,48% L : 38,62% (Perpres 59/2017)	P : 20,48% L : 38,62% (Perpres 59/2017)	P : 0,031% L : 0,010%	P : 0,044% L : 0,013%	P : 0,060% L : 0,022%	P : 0,089% L : 0,029%	P : 0,111% L : 0,036%	P : 0,133% L : 0,043%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Menurunnya prevalensi kekerasan pada tahun 2045 terhadap anak laki-laki menjadi 20,48% dan anak Perempuan menjadi 38,62%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka dan penegakan hukum; • pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; • perlindungan khusus bagi anak perempuan; • peningkatan layanan dukungan korban kekerasan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.2.3.(a)	Proorsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Menurunnya perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka dan penegakan hukum; • pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; • perlindungan khusus bagi anak perempuan; • peningkatan layanan dukungan korban kekerasan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya														
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,5 (Roadmap SDGs 2030)	Meningkat menjadi 4,5 (Roadmap SDGs 2030)	4,06	4,24	4,54	4,84	5,14	5,44	Mencapai Target	Mencapai Target	Inspektorat	Meningkatnya IPAK pada tahun 2045 menjadi 4,5	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • transparansi dan akuntabilitas; • pengawasan dan pengendalian internal; • pemberian penghargaan dan dukungan teknis; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		Capaian TPB 2022	Proyeksi Capaian TPB							OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
Target TPB	16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat													
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Perlu peningkatan (Sifat indikator IPB)	Perlu peningkatan (Sifat indikator IPB)	91,58%	91,88%	92,38%	92,88%	93,38%	93,88%	Mencapai Target	Mencapai Target	BPKPAD	Meningkatnya proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka keajaiban dan regulasi; • penetapan prioritas anggaran; • peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran; • integrasi program pembangunan daerah; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) atas Laporan Keuangan K/L dan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi 60% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 60% (Perpres 59/2017)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Mencapai Target	Insoektorat	Meningkatnya WTP atas laporan keuangan pada tahun 2045 menjadi 60%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; • transparansi dan akuntabilitas; • pengawasan dan pengendalian internal; • pemberian penghargaan dan dukungan teknis; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkat menjadi 80% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 80% (Perpres 59/2017)	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	Mencapai target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan pada tahun 2045 menjadi 80%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka keajaiban dan regulasi; • transparansi dan akuntabilitas; • E-procurement terhadap belanja pengadaan; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Balik K/L dan Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi 70% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 70% (Perpres 111/2022)	56,52%	61,98%	71,08%	80,18%	89,28%	98,38%	Mencapai Target	Mencapai Target	Setda	Meningkatnya instansi pemerintah yang memiliki nilai IRB Balik pada tahun 2045 menjadi 70%	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka keajaiban dan regulasi; • transparansi dan akuntabilitas; • pengawasan dan pengendalian internal; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target IPB	16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan													
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 17% (Perpres 111/2022)	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD Kab/Kotz pada 2045 menjadi 17%	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan kuota gender; • pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II).	Meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 16,39% (Perpres 59/2017)	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	25,81%	Mencapai Target	Mencapai Target	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya keterwakilan perempuan berkedudukan Eselon II pada 2045 menjadi 16,39%	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan kuota gender; • pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan; • penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target IPB	16.9. Pada tahun 2030, membenarkan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran													
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 77,4% (Perpres 59/2017)	81,06%	82,95%	86,11%	89,26%	92,41%	95,56%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdukcapil	Meningkatnya persentase kepemilikan akta lahir pada tahun 2045 menjadi 77,4%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses & infrastruktur pelayanan pencatatan sipil; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 100% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 100% (Perpres 111/2022)	86,32%	87,07%	88,32%	89,57%	90,82%	92,07%	Mencapai Target	Mencapai Target	Disdukcapil	Meningkatnya kepemilikan akta lahir untuk pada tahun 2045 menjadi 77,40%	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses & infrastruktur pelayanan pencatatan sipil; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan
Target TPB	16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan													
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarakan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	Jumlah kebijakan (Perpres 111/2022)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Mencapai Target	Mencapai Target	Raopada libang	Menurunkan jumlah kebijakan yang diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> • peninjauan kebijakan; • penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; • peningkatan tata kelola pemerintahan

Tabel 11. Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum/Tidak Ada Data

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
PILAR SOSIAL						
TPB 2. Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
Target TPB	2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Menurun menjadi 8,5% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 8,5% (Perpres 59/2017)	DKPP	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori < 1400 kkal/ kapita/hari pada tahun 2045 menjadi 8,5%.	Melakukan pendataan penduduk dengan asupan kalori < 1400 kkal/kapita/hari
TPB 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
Target TPB	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91% (Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 9,91% (Perpres 59/2017)	Dinkes	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2045 menjadi 9,91%.	Melakukan pendataan unmet need pelayanan kesehatan
TPB 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
Target TPB	5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut					
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Dinsos P3AP2KB	Meningkatnya proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Melakukan pendataan perempuan 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi
PILAR EKONOMI						
TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
Target TPB	8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal					
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Disbudporapar	Meningkatnya proporsi pekerja industri pariwisata	Melakukan pendataan pekerja pada industri pariwisata
TPB 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi						
Target TPB	9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DKUMPP	Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Melakukan pendataan nilai tambah industri kecil terhadap sektor industri

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat menjadi 5% (Perpres 111/2022)	Meningkat menjadi 5% (Perpres 111/2022)	DKUMPP	Meningkatnya proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit pada 2045 menjadi 5%	Melakukan pendataan industri kecil dengan kredit
TPB 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara						
Target TPB	10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya					
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu Penurunan (Sifat indikator TPB)	Dinsos P3AP2KB	Menurunnya pendu-duk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	Melakukan pendataan penduduk yang hidup dibawah 50% median pengeluaran per kapita
TPB 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan						
Target TPB	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya					
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	BKPAD	Meningkatnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Melakukan pendataan anggaran yang didanai pajak daerah
Target TPB	17.6. Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global					
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi 71% (Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 71% (Perpres 59/2017)	DKISP	Meningkatnya akses tetap pitalebar (fixed broadband) pada 2045 menjadi 71%	Melakukan pendataan rumah tangga terlayani jaringan pita lebar
Target TPB	17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama					
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek (Perpres 59/2017)	Jumlah proyek (Perpres 59/2017)	Setda	Meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU	Melakukan pendataan dokumen daftar rencana KPBU (DRK)
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah dokumen (Perpres 59/2017)	Jumlah dokumen (Perpres 59/2017)	Setda	Meningkatnya jumlah dokumen KPBU	Melakukan pendataan proyek skema kerjasama pemerintah & badan usaha
Target TPB	17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional					
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	BPS	Meningkatnya persen-tase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Melakukan pendataan indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
PILAR LINGKUNGAN						
TPB	6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua					
Target TPB	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	Perlu Peningkatan (Sifat indikator TPB)	DPUPRP	Meningkatnya populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Melakukan pendataan rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan sabun dan air
Target TPB	6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air					
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Terlaksana (Perpres 59/2017)	Terlaksana (Perpres 59/2017)	DPUPRP	Terlaksananya insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Melakukan pendataan insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri
TPB	11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					
Target TPB	11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara					
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	Bappeda litbang	Meningkatnya institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Melakukan pendataan institusi yang berperan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan
TPB	15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati					
Target TPB	15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal					
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DPRKPLH	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	Melakukan pendataan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21
Target TPB	15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen (Perpres 111/2022)	Dokumen (RPJPN 2025-2045)	DPRKPLH	Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Kehati
Target TPB	15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan					
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Meningkat (Perpres 111/2022)	Meningkat (Perpres 111/2022)	DPRKPLH	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	Melakukan pendataan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21

Indikator TPB (PERMENDAGRI No. 7 tahun 2018)	Target Indikator TPB		OPD	Rekomendasi		
	2030	2045		Sasaran	Arah Kebijakan	
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA						
TPB	16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
Target TPB	16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak					
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Perlu penurunan (Sifat indikator TPB)	Dinsos P3AP2KB	Menurunnya jumlah anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh	Melakukan pendataan anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis
Target TPB	16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional					
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat (Perpres 59/2017)	Meningkat (Perpres 59/2017)	DKISP	Meningkatnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Melakukan pendataan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersertifikat

Tabel 12. Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum Mencapai Target

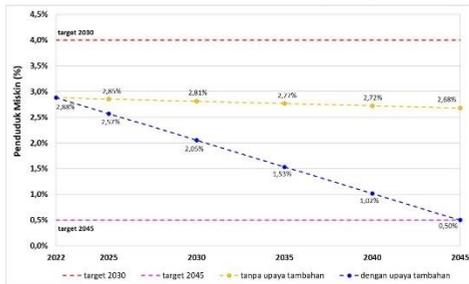
1) Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Indikator TPB :	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Tujuan TPB :	
1-	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarmagara
Target TPB :	
2030	: Menurun menjadi 4-4,5% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Menurun menjadi 0,5-0,8% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capain Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mengalami penurunan sebesar 0,01% per tahun. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 2,88% dan (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase penduduk miskin akan turun menjadi 2,87% pada tahun 2030 (mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 2,68% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 0,5-0,8% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,10% per-tahun pada periode 2025 – 2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	2,98%	
2015	3,26%	
2019	2,89%	
2022	2,88%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	2,86%	2,57%
2030	2,82%	2,05%
2035	2,77%	1,53%
2040	2,73%	1,02%
2045	2,68%	0,50%



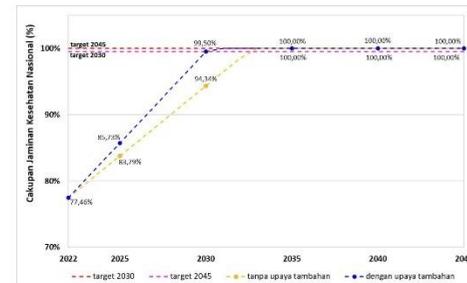
Rekomendasi :	
Sasaran	: Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2045 menjadi 0,5-0,8%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; 2. Penguatan ekonomi lokal dan inklusif; 3. Pembangunan infrastruktur dan teknologi; 4. Peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinsos P3AP2KB

2) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Indikator TPB :	
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Tujuan TPB :	
3-	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target TPB :	
2030	: Meningkat menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)
2015	: Meningkat menjadi 99,5% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capain Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan sebesar 2,11% per-tahun. Pada tahun 2022 cakupan JKN tercatat sebesar 77,46% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) cakupan JKN akan meningkat menjadi 94,34% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2045 (mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 99,5% (RPJPN 2025-2045) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,76% per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		N.A
2015		44,64%
2019		71,13%
2022		77,46%
<i>Proyeksi</i>		
2025	83,79%	85,73%
2030	94,34%	99,50%
2035	100,00%	100,00%
2040	100,00%	100,00%
2045	100,00%	100,00%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya cakupan JKN pada tahun 2045 menjadi 99,5%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan pendafaran; 2. Penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinsos P3AP2KB

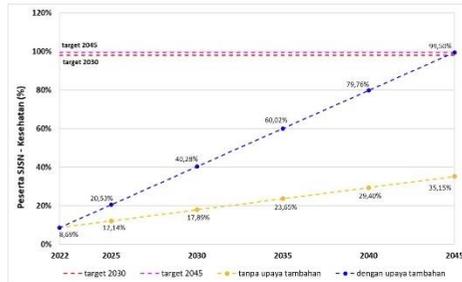
3) Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Indikator TPB :	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
Tujuan TPB :	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 98% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 99,5% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1,15% per-tahun. Pada tahun 2022 peserta SJSN Bidang Kesehatan tercatat sebesar 8,69% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) peserta SJSN Bidang Kesehatan akan meningkat menjadi 17,90% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 35,15% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 99,5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 3,95% per-tahun pada periode 2025 – 2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	5,24%	
2022	8,69%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	12,14%	20,53%
2030	17,90%	40,28%
2035	23,65%	60,02%
2040	29,40%	79,76%
2045	35,15%	99,50%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya cakupan kesepertaan SJSN Kesehatan pada tahun 2045 menjadi 99,5%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran; 2. Penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinsos P3AP2KB

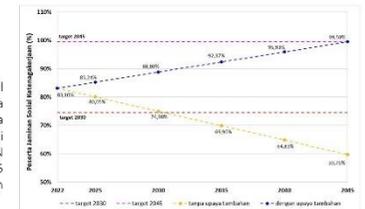
4) Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Indikator TPB :	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Tujuan TPB :	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 74,57% [tenaga kerja Formal] dan 25,94% [Informal] (Perpres 111/22)
2045	: Meningkatkan menjadi 99,5% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

a) Tenaga kerja formal

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi peserta jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (tenaga Kerja Formal) mengalami penurunan sebesar 1,01% per-tahun. Pada tahun 2022 peserta jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (tenaga Kerja Formal) tercatat sebesar 83,10% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) peserta jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (tenaga Kerja Formal) akan turun menjadi 75,06% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 59,75% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB 99,5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan 0,71% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	49,6%	
2019	63,7%	
2022	83,10%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	80,05%	85,24%
2030	74,98%	88,80%
2035	69,90%	92,37%
2040	64,83%	95,93%
2045	59,75%	99,50%



b) Tenaga kerja informal

Data proporsi peserta jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk tenaga Kerja Informal belum tersedia, sehingga tidak dapat diproyeksi. Untuk mencapai target indikator TPB sebesar 99,5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan 4,33% per-tahun pada 2025 – 2045.

Capaian	Target Capaian					Status Capaian		
	2022	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045
N.A	12,98%	34,61%	56,24%	77,87%	99,50%		Belum Mencapai Target	Mencapai Target

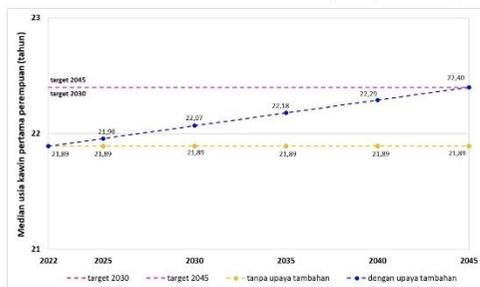
Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya cakupan kesepertaan SJSN Ketenagakerjaan pada 2045 menjadi 99,5%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan kesadaran dan edukasi pekerja terutama sektor informal; 2. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran; 3. Penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disnakertrans

5) Median usia kawin pertama perempuan

Indikator TPB :
5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
Tujuan TPB :
5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Target TPB :
2030 : Meningkatkan menjadi 22,4 thn (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Meningkatkan menjadi 22,4 thn (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :
Optimis
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Data median usia kawin pertama perempuan yang tersedia hanya pada tahun 2022 (21,89 tahun), sehingga tidak dapat dilakukan proyeksi lebih lanjut dan diasumsikan tidak berubah hingga 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030). Oleh karena itu perlu upaya tambahan. Untuk percepatan mencapai target indikator TPB pada tahun 2030 (22,4 tahun) dengan skenario optimis, maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,02 per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	N.A	
2022	21,89	
<i>Proyeksi</i>		
2025	21,89	21,96
2030	21,89	22,07
2035	21,89	22,18
2040	21,89	22,29
2045	21,89	22,40



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatkan median usia kawin pertama perempuan menjadi 22,4 tahun
Strategi dan Arah Kebijakan : 1. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; 2. pemberdayaan perempuan; 3. pelibatan tokoh masyarakat dan agama; 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Dinsos P3AP2KB

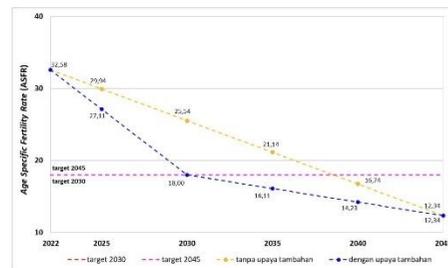
6) Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Indikator TPB :
3.7.2* 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
Tujuan TPB :
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Target TPB :
2030 : Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)
2045 : Menurun menjadi 18 (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :
Optimis
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) mengalami penurunan sebesar 0,88 per-tahun. Pada tahun 2022 ASFR tercatat sebesar 32,58 (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) ASFR akan turun menjadi 25,54 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 12,34 pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 18 (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 1,82 per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	33,72	
2022	32,58	
<i>Proyeksi</i>		
2025	29,94	27,11
2030	25,54	18,00
2035	21,14	16,11
2040	16,74	14,23
2045	12,34	12,34



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi metode modern menjadi 64,55%
Strategi dan Arah Kebijakan : 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi; 2. Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan; 3. Penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Dinsos P3AP2KB

7) Perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan

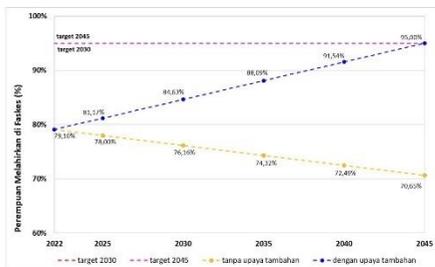
Indikator TPB :	
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
3.1.2.(a)	
Tujuan TPB :	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 111/2022)

Alternatif Skenario :
Moderat

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,27% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan tercatat sebesar 79,10% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan akan turun menjadi 78% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 70,65% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 95% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,69% per tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	81,98%	
2022	79,10%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	78,00%	81,17%
2030	76,16%	84,63%
2035	74,32%	88,09%
2040	72,49%	91,54%
2045	70,65%	95,00%



Rekomendasi :

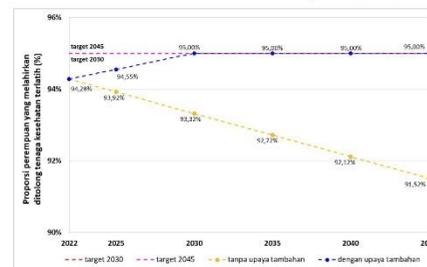
Sasaran	: Meningkatnya cakupan persalinan di faskes pada tahun 2045 menjadi 95%
Strategi dan	: 1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes;
Arah Kebijakan	: 2. Penguatan sistem rujukan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disnakertrans

8) Perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih

Indikator TPB :	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Tujuan TPB :	
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 59/2017)
2045	: Meningkatkan menjadi 95% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih mengalami penurunan sebesar 0,12% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih tercatat sebesar 94,28% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi perempuan yang melahirkan ditolong tenaga kesehatan terlatih akan turun menjadi 93,32% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 91,52% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 95% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,09% per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	96,26%	
2022	94,28%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	93,92%	94,55%
2030	93,32%	95,00%
2035	92,72%	95,00%
2040	92,12%	95,00%
2045	91,52%	95,00%



Rekomendasi :

Sasaran	: Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil menjadi 95%
Strategi dan	: 1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan (terutama pelayanan maternal);
Arah Kebijakan	: 2. Peningkatan akses dan ketersediaan tenaga kesehatan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Kesehatan

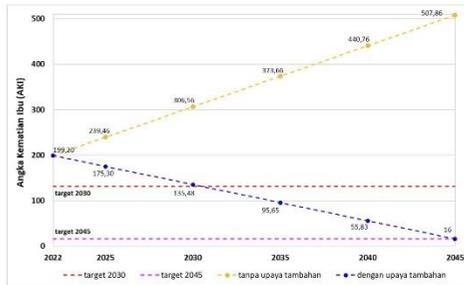
9) Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator TPB :
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)
Tujuan TPB :
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target TPB :
2030 : Menurun menjadi 131 (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Menurun menjadi 16 (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami peningkatan sebesar 13,42 per tahun. Pada tahun 2022 AKI tercatat sebesar 199,20 (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) AKI akan naik menjadi 306,56 pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 507,86 pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 16 (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 7,97 per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	157,29	
2022	199,20	
<i>Proyeksi</i>		
2025	239,46	175,30
2030	306,56	135,48
2035	373,66	95,65
2040	440,76	55,83
2045	507,86	16,00



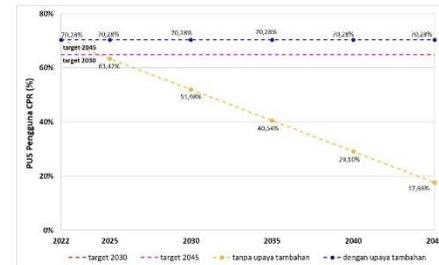
Rekomendasi :	
Sasaran	: Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2045 menjadi 16
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan (terutama pelayanan maternal); 2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 3. Penggunaan teknologi informasi; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Kesehatan

10) Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara

Indikator TPB :
1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) 3.7.1.(a) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
Tujuan TPB :
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target TPB :
2030 : Meningkatkan menjadi 65% (Perpres 59/2017) 2045 : Meningkatkan menjadi 65% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :
Optimis
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi PUS penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara mengalami penurunan sebesar 2,29% per tahun. Pada tahun 2022 prevalensi PUS penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara tercatat sebesar 70,28% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi PUS penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara akan turun menjadi 51,98% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 17,66% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 65% (Perpres 59/2017) pada periode 2025-2045, maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2022 (70,28%).

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	72,71%	
2015	74,92%	
2019	77,14%	
2022	70,28%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	63,47%	70,28%
2030	51,98%	70,28%
2035	18,53%	70,28%
2040	15,53%	70,28%
2045	12,53%	70,28%



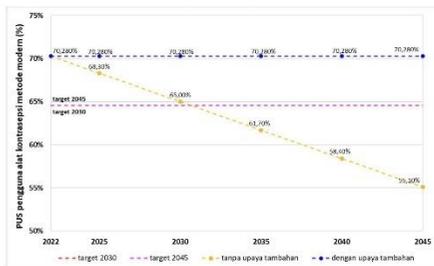
Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS pada tahun 2045 menjadi 65%.
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi; 2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 3. Kolaborasi dengan stakeholder; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DinsosP3AP2KB

11) Pengguna alat kontrasepsi metode modern

Indikator TPB :	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
Tujuan TPB :	
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 64,55% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 64,55% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 PUS pengguna alat kontrasepsi metode modern mengalami penurunan sebesar 0,66% per-tahun. Pada tahun 2022 PUS pengguna alat kontrasepsi metode modern tercatat sebesar 70,28% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) PUS pengguna alat kontrasepsi metode modern akan turun menjadi 65% pada tahun 2030 (mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 55,10% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 64,55% (Roadmap SDGs 2030) pada periode 2025-2045, maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2022 (70,28%).

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		22,71%
2015		74,92%
2019		77,14%
2022		70,28%
<i>Proyeksi</i>		
2025	68,30%	70,28%
2030	65,00%	70,28%
2035	61,70%	70,28%
2040	58,40%	70,28%
2045	55,10%	70,28%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi metode modern menjadi 64,55%
Strategi dan	: 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi;
Arah Kebijakan	: 2. Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan; 3. Penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinsos P3AP2KB

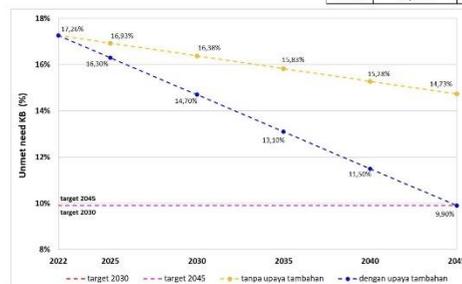
12) Unmet need KB

Indikator TPB :	
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Tujuan TPB :	
5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	
Target TPB :	
2030	: Menurun menjadi 9,9% (Perpres 59/2017)
2045	: Menurun menjadi 9,9% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 unmet need KB mengalami penurunan sebesar 0,11% per-tahun. Pada tahun 2022 unmet need KB tercatat sebesar 17,26% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) unmet need KB akan turun menjadi 16,38% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 14,73% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 9,9% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,32% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		14,18%
2015		18,07%
2019		18,75%
2022		17,26%
<i>Proyeksi</i>		
2025	16,93%	16,30%
2030	16,38%	14,70%
2035	15,83%	13,10%
2040	15,28%	11,50%
2045	14,73%	9,90%



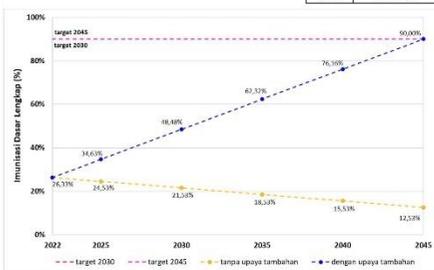
Rekomendasi :	
Sasaran	: Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2045 menjadi 9,9%
Strategi dan	: 1. Peningkatan akses, ketersediaan dan kualitas layanan KB;
Arah Kebijakan	: 2. Pelibatan pria dalam KB; 3. pelibatan tokoh masyarakat dan agama; 4. Penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; 5. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 6. Penggunaan teknologi informasi; 7. Kolaborasi dengan stakeholder; 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinsos P3AP2KB

13) Anak yang menerima imunisasi dasar lengkap

Indikator TPB :	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
Tujuan TPB :	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 90% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 90% (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap mengalami penurunan sebesar 0,60% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap tercatat sebesar 26,33% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap akan turun menjadi 21,53% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 12,53% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator IPB sebesar 90% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 7,77% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	92,08%	
2019	35,70%	
2022	26,33%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	24,53%	34,63%
2030	21,53%	48,48%
2035	18,53%	62,32%
2040	15,53%	76,16%
2045	12,53%	90,00%



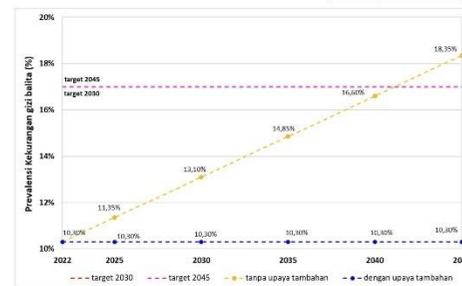
Rekomendasi :	
Sasaran	: 1. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2045 menjadi 90%. 2. Tercapainya minimal 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2045
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan akses dan distribusi vaksin; 2. peningkatan kualitas pelayanan imunisasi; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinkes

14) Kekurangan gizi (*underweight*) pada balita

Indikator TPB :	
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita
Tujuan TPB :	
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	
Target TPB :	
2030	: Menurun menjadi 17% (Perpres 59/2017)
2045	: Menurun menjadi 17% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita mengalami peningkatan sebesar 0,35% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi kekurangan gizi pada anak balita tercatat sebesar 10,30% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi kekurangan gizi pada anak balita akan naik menjadi 13,10% pada tahun 2030 (mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian naik menjadi 18,35% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 17% (Perpres 59/2017) pada periode 2025-2045, maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2022 (10,30%).

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	9,00%	
2022	10,30%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	11,35%	10,30%
2030	13,10%	10,30%
2035	14,85%	10,30%
2040	16,60%	10,30%
2045	18,35%	10,30%



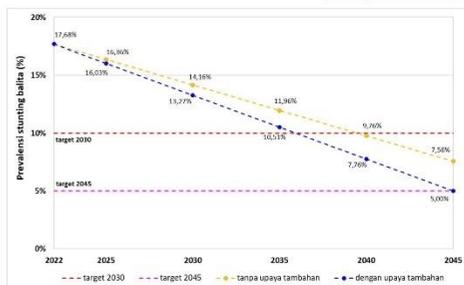
Rekomendasi :	
Sasaran	: Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada balita menjadi 17%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi; 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Kesehatan

15) Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Indikator TPB :
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
Tujuan TPB :
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Target TPB :
2030 : Menurun menjadi 10% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Menurun menjadi 5% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita mengalami penurunan sebesar 0,44% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi stunting pada balita tercatat sebesar 17,68% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi stunting pada balita akan turun menjadi 14,16% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 7,56% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 5% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,55% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	30,09%	
2019	20,60%	
2022	17,68%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	16,36%	16,03%
2030	14,16%	13,27%
2035	11,96%	10,51%
2040	9,76%	7,76%
2045	7,56%	5,00%



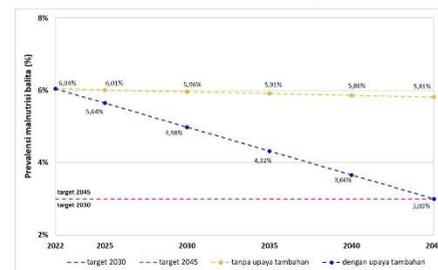
Rekomendasi :
Sasaran : Menurunnya prevalensi stunting balita pada tahun 2015 menjadi 5%
Strategi dan Araah Kebijakan : 1. Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi; 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Dinas Kesehatan

16) Malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) pada balita

Indikator TPB :
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) pada balita
Tujuan TPB :
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Target TPB :
2030 : Menurun menjadi 3% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Menurun menjadi 3% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) pada balita mengalami penurunan sebesar 0,01% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi stunting pada balita tercatat sebesar 6,04% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi malnutrisi pada balita akan turun menjadi 5,96% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 5,81% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 3% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,13% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	22,80%	
2019	9,60%	
2022	6,04%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	6,01%	5,64%
2030	5,96%	4,98%
2035	5,91%	4,32%
2040	5,86%	3,66%
2045	5,81%	3,00%



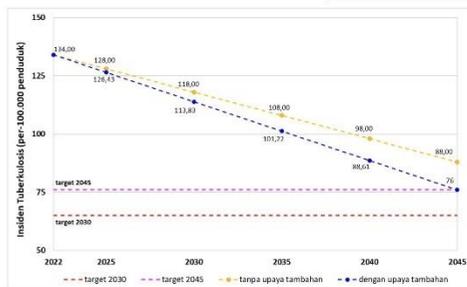
Rekomendasi :
Sasaran : Menurunnya prevalensi wasting (kurus) balita pada tahun 2045 menjadi 3%
Strategi dan Araah Kebijakan : 1. Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi; 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Dinas Kesehatan

17) Insiden Tuberkulosis (ITB)

Indikator TPB :
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
Tujuan TPB :
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target TPB :
2030 : Menurun menjadi 65 (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Menurun menjadi 76 (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Insiden Tuberkulosis (ITB) mengalami penurunan sebesar 7/100.000 per-tahun. Pada tahun 2022 Insiden Tuberkulosis (ITB) tercatat sebesar 134/100.000 (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) Insiden Tuberkulosis (ITB) akan turun menjadi 118/100.000 pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 88/100.000 pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 76/100.000 (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,52/100.000 per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		N.A
2015		183,00
2019		312,00
2022		134,00
<i>Proyeksi</i>		
2025	128	126
2030	118	114
2035	108	101
2040	98	89
2045	88	76



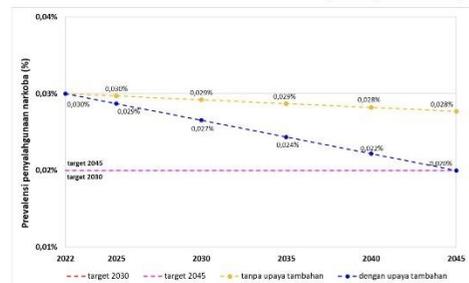
Rekomendasi :	
Sasaran :	Menurunkan prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2045 menjadi 76
Strategi dan Arah Kebijakan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan program pencegahan dan pengendalian TB; 2. Peningkatan akses perawatan TB; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD :	Dinas Kesehatan

18) Prevalensi penyalahgunaan narkoba

Indikator TPB :
3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
Tujuan TPB :
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target TPB :
2030 : Menurun menjadi 0,02% (Perpres 59/2017)
2045 : Menurun menjadi 0,02% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan sebesar 0,0001% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 0,03% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi penyalahgunaan narkoba akan turun menjadi 0,029% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 0,028% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 0,02% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,0004% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		N.A
2015		0,04%
2019		0,05%
2022		0,03%
<i>Proyeksi</i>		
2025	0,030%	0,029%
2030	0,029%	0,027%
2035	0,029%	0,024%
2040	0,028%	0,022%
2045	0,028%	0,020%



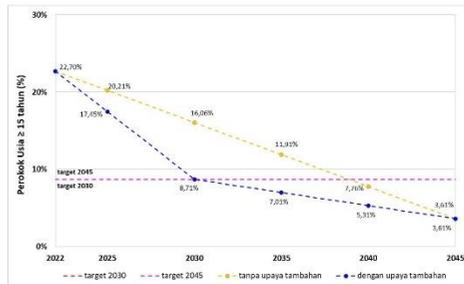
Rekomendasi :	
Sasaran :	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba < 0,07%
Strategi dan Arah Kebijakan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan hukum dan penegakan; 2. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial; 3. Penguatan sistem dukungan sosial dan komunitas; 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD :	Bakesbangpol

19) Perokok usia ≥ 15 tahun

Indikator TPB :
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
Tujuan TPB :
3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target TPB :
2030 : Menurun menjadi 8,71% (Perpres 111/2022)
2045 : Menurun menjadi 8,71% (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :
Optimis
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun mengalami penurunan sebesar 0,83% per-tahun. Pada tahun 2022 prevalensi penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 22,70% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun akan turun menjadi 16,06% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 3,61% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 8,71% (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,75% per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	21,34%	
2019	25,19%	
2022	22,70%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	20,21%	17,45%
2030	16,06%	8,71%
2035	11,91%	7,01%
2040	7,76%	5,31%
2045	3,61%	3,61%



Rekomendasi :
Sasaran : Menurunkan persentase perokok usia ≥ 15 tahun menjadi 8,71%
Strategi dan Arah Kebijakan : 1. Penguatan program layanan konseling upaya berhenti merokok; 2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 3. Penggunaan teknologi informasi; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Dinas Kesehatan

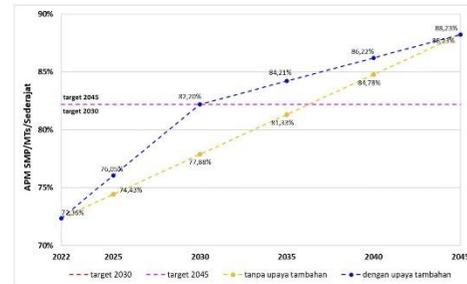
20) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat

Indikator TPB :
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
Tujuan TPB :
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 82,20% (Perpres 59/2017)
2045 : Meningkat menjadi 82,20% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :
Optimis
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,69% per-tahun. Pada tahun 2022 APM SMP/MTs/ sederajat tercatat sebesar 72,36% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) APM SMP/MTs/ sederajat akan naik menjadi 77,88% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian naik menjadi 88,23% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 82,20% (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,23% per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	63,59%	
2019	70,28%	
2022	72,36%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	74,43%	76,05%
2030	77,88%	82,20%
2035	81,33%	84,21%
2040	84,78%	86,22%
2045	88,23%	88,23%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya APM SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2045 menjadi 82,20%
Strategi dan Arah Kebijakan : 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; 2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Dinas Pendidikan

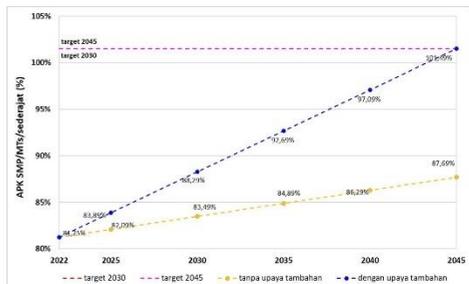
21) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Indikator TPB :	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
Tujuan TPB :	
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 101,49% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 101,49% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,28% per-tahun. Pada tahun 2022 APK SMP/MTs/ sederajat tercatat sebesar 81,25% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) APK SMP/MTs/ sederajat akan naik menjadi 83,49% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 87,69% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator IPB sebesar 101,49% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,88% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	78,43%	
2015	75,85%	
2019	78,93%	
2022	81,25%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	82,09%	83,89%
2030	83,49%	88,29%
2035	84,89%	92,69%
2040	86,29%	97,09%
2045	87,69%	101,49%



Rekomendasi :

Sasaran	: Meningkatkan APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2045 menjadi 101,49%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; 2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Pendidikan

22) Rasio APM perempuan/laki-laki

Indikator TPB :	
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki pada SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat
Tujuan TPB :	
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	
Target TPB :	
2030	: SD meningkat menjadi : 99,78%; SMP meningkat menjadi : 101,50% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: SD meningkat menjadi : 99,78%; SMP meningkat menjadi : 101,50% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

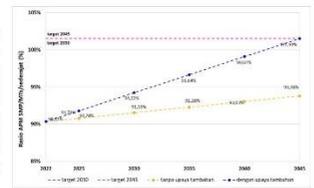
a. SMP/MI/ sederajat

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,15% per tahun. Pada tahun 2022 rasio APM perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/ sederajat tercatat sebesar 90,33% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) rasio APM perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/ sederajat akan naik menjadi 91,53% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 93,78% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 101,50% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,49% per tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	120,07%	
2015	126,25%	
2019	93,46%	
2022	90,33%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	90,78%	91,79%
2030	91,53%	94,22%
2035	92,28%	96,64%
2040	93,03%	99,07%
2045	93,78%	101,50%

b. SD/MI/ sederajat

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Rasio APM SD/MI/ sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,005% per-tahun. Pada tahun 2022 rasio APM tercatat sebesar 101,57% (mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi BAU rasio APM akan naik menjadi 101,61% pada tahun 2030 (mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 101,69% pada tahun 2045 (mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu dipertahankan.



Capaian	Target Capaian	Status Capaian					
2022	2025	2030	2035	2040	2045	2030	2045
101,57%	101,59%	101,61%	101,64%	101,66%	101,69%	Mencapai Target	Mencapai Target

Rekomendasi :

Sasaran	: Meningkatnya rasio APM perempuan/laki laki di SD/MI/ sederajat menjadi 99,78 & SMP/MTs/ sederajat menjadi 101,50
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan; 2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Pendidikan

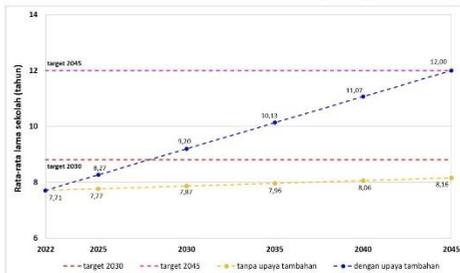
23) Rata-rata lama sekolah

Indikator TPB :
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun
Tujuan TPB :
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 8,8 tahun (Perpres 59/2017)
2045 : Meningkat menjadi 12 tahun (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,02 per-tahun. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 7,71 (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) rata-rata lama sekolah akan naik menjadi 7,87 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian naik menjadi 8,16 pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 12 (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,19 per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	11,52%	
2019	61,13%	
2022	68,79%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	70,86%	74,57%
2030	74,31%	84,20%
2035	77,76%	86,13%
2040	81,21%	88,07%
2045	84,66%	90,00%



Rekomendasi :

Sasaran	: Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2045 menjadi 12 tahun
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan akses, infrastruktur dan kualitas pendidikan; 2. Program khusus untuk kelompok rentan; 3. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi; 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Pendidikan

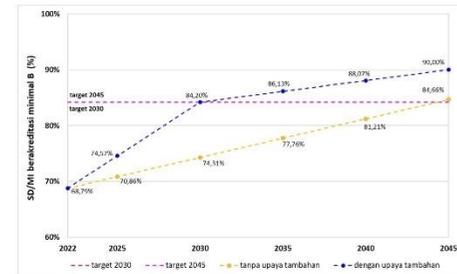
24) SD/MI berakreditasi minimal B

Indikator TPB :
4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Tujuan TPB :
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 84,2% (Perpres 59/2017)
2045 : Meningkat menjadi 84,2% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :
Optimis
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase SD/MI berakreditasi minimal B mengalami peningkatan sebesar 0,69% per-tahun. Pada tahun 2022 SD/MI berakreditasi minimal B tercatat sebesar 68,79% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) SD/MI berakreditasi minimal B akan naik menjadi 74,31% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian naik menjadi 84,66% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 84,20% (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,93% per tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	11,52%	
2019	61,13%	
2022	68,79%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	70,86%	74,57%
2030	74,31%	84,20%
2035	77,76%	86,13%
2040	81,21%	88,07%
2045	84,66%	90,00%



Rekomendasi :

Sasaran	: Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi min. B pada tahun 2045 menjadi 84,2%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah; 2. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3. Penguatan manajemen sekolah; 4. pelibatan orang tua dan komunitas; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Pendidikan

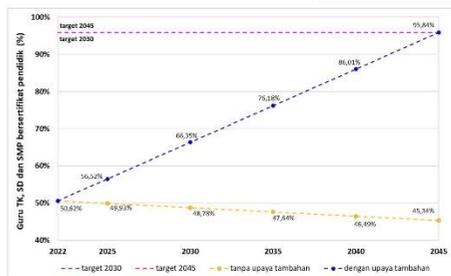
25) Guru TK, SD dan SMP bersertifikat pendidik

Indikator TPB :
4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik
Tujuan TPB :
4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 95,84% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Meningkat menjadi 95,84% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase guru TK, SD dan SMP bersertifikat pendidik mengalami penurunan sebesar 0,23% per-tahun. Pada tahun 2022 guru bersertifikat pendidik tercatat sebesar 50,62% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) guru bersertifikat pendidik akan turun menjadi 48,78% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 45,34% pada tahun 2045 (belum mencapai target SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 95,84% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,97% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	67,54%	
2022	50,62%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	49,93%	56,52%
2030	48,78%	66,35%
2035	47,64%	76,18%
2040	46,49%	86,01%
2045	45,34%	95,84%



Rekomendasi :

Sasaran	: Meningkatnya persentase guru TK, SD dan SMP bersertifikat pendidik menjadi 95,84%
Strategi dan	: 1. Peningkatan program sertifikasi guru;
Arah Kebijakan	: 2. Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan; 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan; 4. Program khusus untuk guru di daerah terpencil; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Dinas Pendidikan

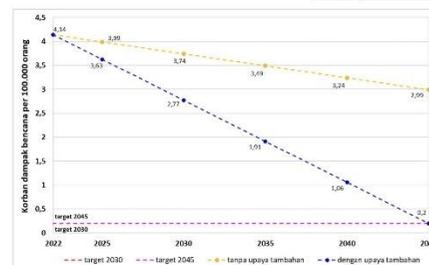
26) Korban terkena dampak bencana

Indikator TPB :
1.5.1*; 11.5.1*; 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Tujuan TPB :
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 13 - Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Target TPB :
2030 : Maksimal 0,2 per 100.000 jiwa (Perpres 111/2022)
2045 : Maksimal 0,2 per 100.000 jiwa (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang mengalami penurunan sebesar 0,05 per tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,4 (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang akan turun menjadi 3,74 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 2,99 pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 0,2 (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,17 per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	1,39	
2015	4,69	
2019	5,62	
2022	4,14	
<i>Proyeksi</i>		
2025	3,99	3,63
2030	3,74	2,77
2035	3,49	1,91
2040	3,24	1,06
2045	2,99	0,20



Rekomendasi :

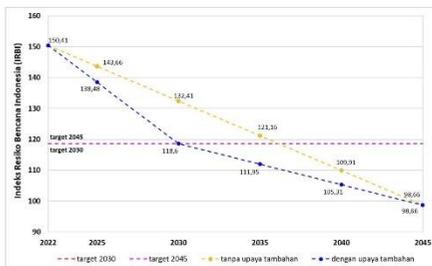
Sasaran	: Jumlah korban meninggal, hilang & terkena dampak bencana maks. 0,2/100.000 ¹⁰⁰⁰ /1000
Strategi dan	: 1. Perencanaan dan pengelolaan tata ruang;
Arah Kebijakan	: 2. Peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat; 3. Penguatan sistem tanggap darurat; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Kolaborasi dengan stakeholder; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: BPBD

27) Indeks Risiko Bencana Indonesia

Indikator TPB :	
1.5.1.(e) 11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia
Tujuan TPB :	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	
Target TPB :	
2030	: Menurun menjadi 118,6 (Perpres 59/2017)
2045	: Menurun menjadi 118,6 (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) mengalami penurunan sebesar 2,25 per-tahun. Pada tahun 2022 IRBI tercatat sebesar 150,41 (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) IRBI akan turun menjadi 132,41 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 98,66 pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 118,6 (Perpres 59/2017) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 3,98 per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	N.A
2015	N.A	N.A
2019	165,12	
2022	150,41	
<i>Proyeksi</i>		
2025	143,66	138,48
2030	132,41	118,60
2035	121,16	111,95
2040	109,91	105,31
2045	98,66	98,66



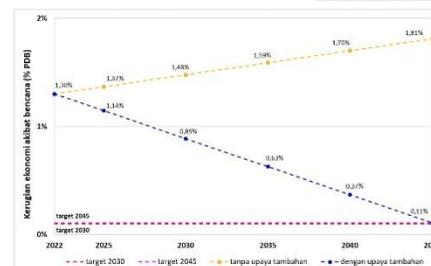
Rekomendasi :	
Sasaran	: Menurunnya Indeks risiko bencana menjadi 118,6
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Pemetaan risiko dan zonasi wilayah; 2. Pengembangan infrastruktur tahan bencana; 3. Penguatan kapasitas lembaga lokal; 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: BPBD

28) Kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Indikator TPB :	
1.5.2.(a) 11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
Tujuan TPB :	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	
Target TPB :	
2030	: Maksimal 0,10% PDB (Perpres 111/2022)
2045	: Maksimal 0,11% PDB (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana mengalami peningkatan sebesar 0,02% per-tahun. Pada tahun 2022 jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana tercatat sebesar 1,30% dari PDB (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana akan naik menjadi 1,60% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian naik menjadi 1,81% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 0,11% PDB (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,05% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	N.A
2015	0,06%	
2019	1,08%	
2022	1,30%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	1,37%	1,14%
2030	1,48%	0,89%
2035	1,59%	0,63%
2040	1,70%	0,37%
2045	1,81%	0,11%



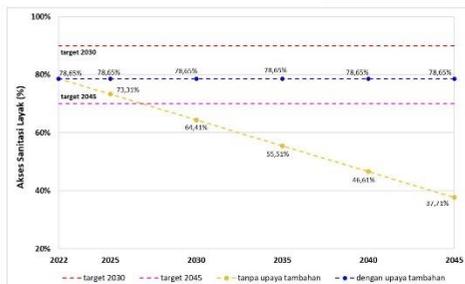
Rekomendasi :	
Sasaran	: Kerugian ekonomi langsung akibat bencana maksimal sebesar 0,11%
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Pemetaan risiko dan zonasi wilayah; 2. Pengembangan infrastruktur tahan bencana; 3. Penguatan kapasitas lembaga lokal; 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 5. Penggunaan teknologi informasi; 6. Kolaborasi dengan stakeholder; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: BPBD

29) Akses terhadap layanan sanitasi layak

Indikator TPB :	
1.4.1.(e) 6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
Tujuan TPB :	
1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 90% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 70% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak mengalami penurunan sebesar 1,78% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak tercatat sebesar 78,65% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak akan turun menjadi 64,41% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 37,71% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 70% (RPJPN 2025-2045) pada periode 2025-2045, maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2022 (78,65%).

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	44,02%	
2019	82,21%	
2022	78,65%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	73,31%	78,65%
2030	64,41%	78,65%
2035	55,51%	78,65%
2040	46,61%	78,65%
2045	37,71%	78,65%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya akses sanitasi layak pada tahun 2045 menjadi 70%.
Strategi dan Arah Kebijakan	: 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sanitasi; 2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; 3. Penggunaan teknologi informasi; 4. Kolaborasi dengan stakeholder; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DPUPRP

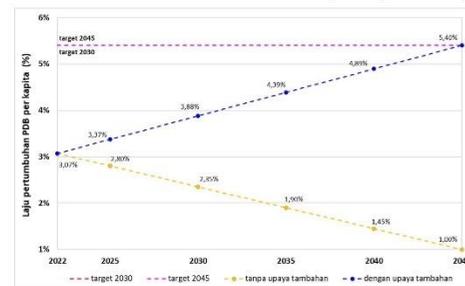
30) Laju pertumbuhan PDB per kapita

Indikator TPB :	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita
Tujuan TPB :	
8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 5,4% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 5,4% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 laju pertumbuhan PDB per kapita mengalami penurunan sebesar 0,09% per-tahun. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDB per kapita tercatat sebesar 3,07% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) laju pertumbuhan PDB per kapita akan turun menjadi 2,35% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 1,00% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 5,4% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,10% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	3,99%	
2015	2,70%	
2019	10,18%	
2022	3,07%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	2,80%	3,37%
2030	2,35%	3,88%
2035	1,90%	4,39%
2040	1,45%	4,89%
2045	1,00%	5,40%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya laju pertumbuhan PDB per kapita pada tahun 2045 menjadi 5,4%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif; peningkatan efisiensi dan produktivitas; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Bappedalitbang

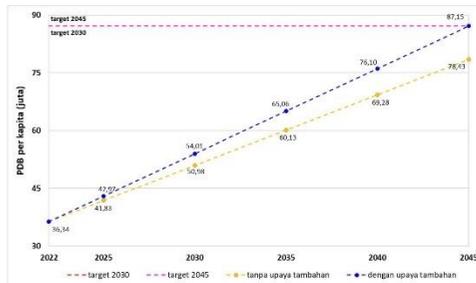
31) PDB per kapita

Indikator TPB :	
8.1.1.(a)	PDB per kapita
Tujuan TPB :	
8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 87,15 juta (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 87,15 juta (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022, PDB per kapita mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta per-tahun. Pada tahun 2022 PDB per kapita tercatat sebesar 36,34 juta (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) PDB per kapita akan naik menjadi 50,98 juta pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian naik menjadi 78,43 juta pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator IPB sebesar 87,15 juta (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 2,21 juta per tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
	Baseline	
2012		18,03
2015		22,51
2019		30,21
2022		36,34
Proyeksi		
2025	41,83	42,97
2030	50,98	54,01
2035	60,13	65,06
2040	69,28	76,10
2045	78,43	87,15



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya PDB per kapita menjadi 87,15 juta
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif; peningkatan efisiensi dan produktivitas; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Bappedalitbang

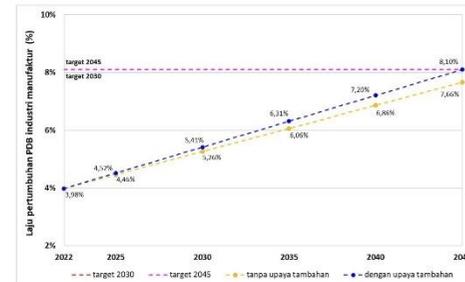
32) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Indikator TPB :	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
Tujuan TPB :	
9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 8,1% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 8,1% (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur mengalami peningkatan sebesar 0,16% per-tahun. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur tercatat sebesar 3,98% (mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) laju pertumbuhan PDB industri manufaktur akan naik menjadi 5,26% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian naik menjadi 7,66% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator IPB sebesar 87,15% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,18% per tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
	Baseline	
2012		N.A
2015		3,17%
2019		3,49%
2022		3,98%
Proyeksi		
2025	4,46%	4,52%
2030	5,26%	5,41%
2035	6,06%	6,31%
2040	6,86%	7,20%
2045	7,66%	8,10%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur pada 2045 menjadi 8,1%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif; peningkatan efisiensi dan produktivitas; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DKUMPP

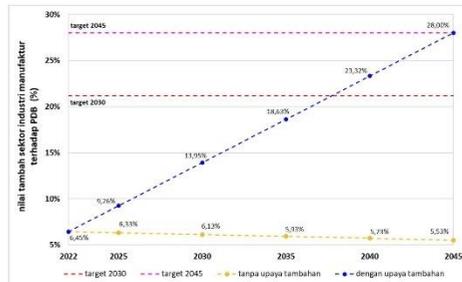
33) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB

Indikator TPB :
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB
Tujuan TPB :
9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 21,2% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Meningkat menjadi 28% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,04% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB tercatat sebesar 6,45% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB akan turun menjadi 6,13% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 5,53% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 28% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,94% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	6,89%	
2015	6,53%	
2019	6,53%	
2022	6,45%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	6,33%	9,26%
2030	6,13%	13,95%
2035	5,93%	18,63%
2040	5,73%	23,32%
2045	5,53%	28,00%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB menjadi 28%
Strategi dan Arah Kebijakan : Pengembangan infrastruktur industri; pengembangan inovasi dan penelitian; pengembangan sdm; dukungan keuangan; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : DKUMPP

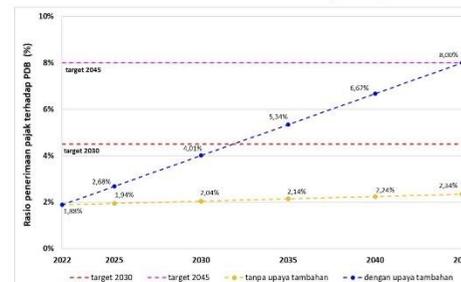
34) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

Indikator TPB :
8.9.1 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Tujuan TPB :
8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 4,5% (Perpres 111/2022)
2045 : Meningkat menjadi 8% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB mengalami peningkatan sebesar 0,07% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB tercatat sebesar 1,88% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB akan naik menjadi 2,04% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian naik menjadi 2,34% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 8% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,27% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	1,36%	
2019	1,29%	
2022	1,88%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	0,429%	2,99%
2030	0,410%	7,24%
2035	0,391%	11,50%
2040	0,372%	15,75%
2045	0,353%	20,00%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada 2045 menjadi 8%
Strategi dan Arah Kebijakan : Pengembangan destinasi pariwisata; pengembangan produk wisata; peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; penguatan pemasaran dan promosi; pengembangan sumber daya manusia; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Disbudporapar

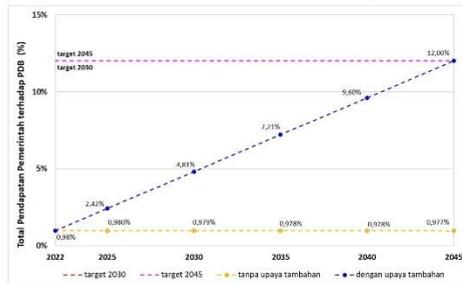
35) Total pendapatan pemerintah terhadap PDB

Indikator TPB :
17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya
Tujuan TPB :
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 11,4 - 12,0% (Perpres 111/2022)
2045 : Meningkat menjadi 11,4 - 12,0% (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 total pendapatan pemerintah terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,001% per-tahun. Pada tahun 2022 total pendapatan pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 0,98% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) total pendapatan pemerintah terhadap PDB akan turun menjadi 0,979% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian turun menjadi 0,977% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 12% (Perpres 111/2022) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,48% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	1,54%	
2015	1,38%	
2019	1,34%	
2022	0,98%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	0,980%	2,42%
2030	0,979%	4,81%
2035	0,978%	7,21%
2040	0,978%	9,60%
2045	0,977%	12,00%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB menjadi 11,4-12,0%
Strategi dan Arah Kebijakan : Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan ukm dan ekonomi kreatif; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : BPKPAD

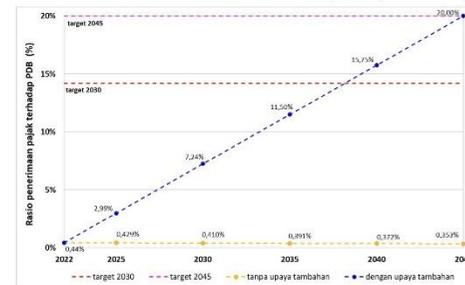
36) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Indikator TPB :
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
Tujuan TPB :
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 14,2% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Meningkat menjadi 18-20% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 rasio penerimaan pajak terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,004% per-tahun. Pada tahun 2022 rasio penerimaan pajak terhadap PDB tercatat sebesar 0,44% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) rasio penerimaan pajak terhadap PDB akan turun menjadi 0,413% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 0,353% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 20% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,85% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	0,25%	
2015	0,41%	
2019	0,49%	
2022	0,44%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	0,429%	2,99%
2030	0,410%	7,24%
2035	0,391%	11,50%
2040	0,372%	15,75%
2045	0,353%	20,00%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya rasio penerimaan pajak pada tahun 2045 menjadi 18-20%
Strategi dan Arah Kebijakan : Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi; peningkatan akses ekonomi; penguatan sektor industri dan pertanian; peningkatan investasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberdayaan ukm dan ekonomi kreatif; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : BPKPAD

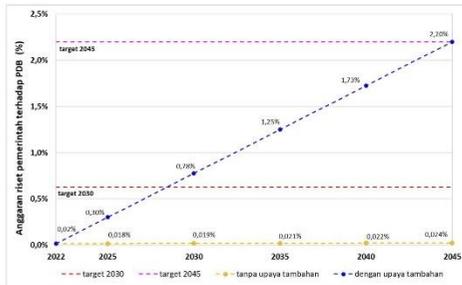
37) Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB

Indikator TPB :
9.5.1 Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
Tujuan TPB :
9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 0,63% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Meningkat menjadi 2,2% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB mengalami peningkatan sebesar 0,0004% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 0,017% (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB akan naik menjadi 0,02% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 0,024% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 2,2% (RPJPN 2025–2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,09% per-tahun pada periode 2025–2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	0,25%	
2015	0,41%	
2019	0,49%	
2022	0,44%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	0,429%	2,99%
2030	0,410%	7,24%
2035	0,391%	11,50%
2040	0,372%	15,75%
2045	0,353%	20,00%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya anggaran riset pemerintah pada tahun 2045 menjadi 2,2%
Strategi dan Arah Kebijakan : Pengembangan infrastruktur riset; prioritas riset strategis; peningkatan program insentif; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Bappedalitbang

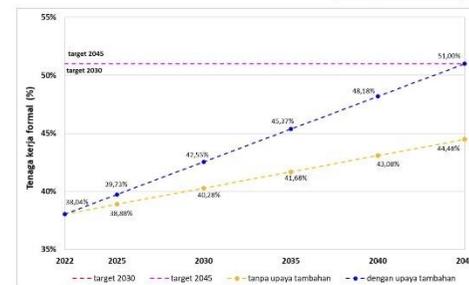
38) Tenaga kerja formal

Indikator TPB :
8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal
Tujuan TPB :
8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Target TPB :
2030 : Meningkat menjadi 51% (Perpres 59/2017)
2045 : Meningkat menjadi 51% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capain Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase tenaga kerja formal mengalami peningkatan sebesar 0,28% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase tenaga kerja formal tercatat sebesar 38,04% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase tenaga kerja formal akan naik menjadi 40,28% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian naik menjadi 44,48% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 51% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,56% per-tahun pada periode 2025–2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012		N.A
2015		36,07%
2019		38,24%
2022		38,04%
<i>Proyeksi</i>		
2025	38,880%	39,73%
2030	40,280%	42,55%
2035	41,680%	45,37%
2040	43,080%	48,18%
2045	44,480%	51,00%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya persentase tenaga kerja formal pada tahun 2045 menjadi 51%
Strategi dan Arah Kebijakan : Penguatan kebijakan dan regulasi tenaga kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas dan daya saing; pengembangan infrastruktur ekonomi; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Disnakertrans

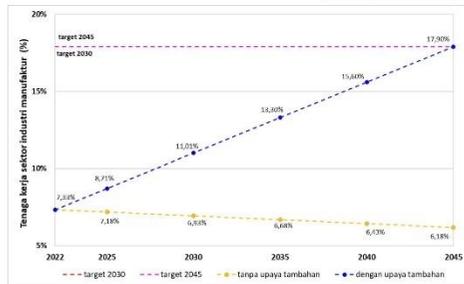
39) Tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

Indikator TPB :	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
Tujuan TPB :	
9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 17,9% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 17,9% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capain Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan sebesar 0,05% per-tahun. Pada tahun 2022 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur tercatat sebesar 7,33% (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur akan turun menjadi 6,93% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian turun menjadi 6,18% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 51% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,46% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N/A	
2015	9,13%	
2019	7,47%	
2022	7,33%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	7,18%	8,71%
2030	6,93%	11,01%
2035	6,68%	13,30%
2040	6,43%	15,60%
2045	6,18%	17,90%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur menjadi 17,9%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan kebijakan dan regulasi tenaga kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas dan daya saing; pengembangan infrastruktur ekonomi; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Disnakertrans

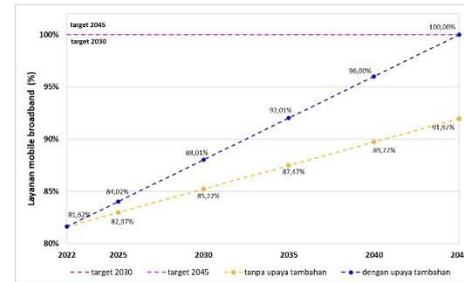
40) Layanan mobile broadband

Indikator TPB :	
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
17.6.2.c)	
Tujuan TPB :	
7 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Meningkatkan menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capain Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 layanan mobile broadband mengalami peningkatan sebesar 0,45% per-tahun. Pada tahun 2022 layanan mobile broadband tercatat sebesar 81,62% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) layanan mobile broadband akan naik menjadi 85,22% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 91,97% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 100% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,80% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N/A	
2015	N/A	
2019	76,15%	
2022	81,62%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	82,97%	84,02%
2030	85,22%	88,01%
2035	87,47%	92,01%
2040	89,72%	96,00%
2045	91,97%	100,00%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya penduduk yang terlayani mobile broadband pada 2045 menjadi 100%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; peningkatan infrastruktur, akses dan kualitas layanan telekomunikasi; peningkatan keter-sediaan dan aksesibilitas perangkat; peningkatan literasi digital; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DKISP

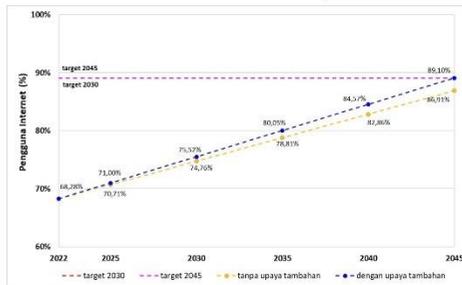
41) Pengguna Internet

Indikator TPB :
9.c.1.(b) 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet
Tujuan TPB :
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Target TPB :
2030 : Meningkatkan menjadi 89,1% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Meningkatkan menjadi 89,1% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :
Moderat
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 pengguna internet mengalami peningkatan sebesar 0,81% per-tahun. Pada tahun 2022 pengguna internet tercatat sebesar 68,28% (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) pengguna internet akan naik menjadi 74,76% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 86,91% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 89,1% (Roadmap SDGs 2030) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,91% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	48,75%	
2022	68,28%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	70,71%	71,00%
2030	74,76%	75,52%
2035	78,81%	80,05%
2040	82,86%	84,57%
2045	86,91%	89,10%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatkan individu yang menggunakan internet pada 2045 menjadi 89,1%
Strategi dan Arah Kebijakan : Penguatan kebijakan dan regulasi pendukung; peningkatan infrastruktur; akses dan kualitas layanan telekomunikasi; peningkatan keter-sediaan dan aksesibilitas perangkat; peningkatan literasi digital; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : DKISP

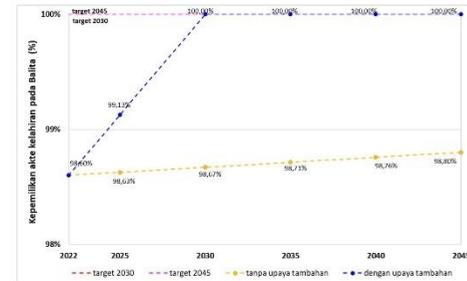
42) Kepemilikan akte kelahiran pada Balita

Indikator TPB :
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
Tujuan TPB :
16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat
Target TPB :
2030 : Meningkatkan menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)
2045 : Meningkatkan menjadi 100% (Roadmap SDGs 2030)
Alternatif Skenario :
Optimis
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 kepemilikan akte kelahiran pada Balita mengalami peningkatan sebesar 0,01% per-tahun. Pada tahun 2022 kepemilikan akte kelahiran pada Balita tercatat sebesar 98,60% (belum mencapai target Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) kepemilikan akte kelahiran pada Balita akan naik menjadi 98,71% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 98,80% pada tahun 2045 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 100% (Roadmap SDGs 2030) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 0,18% per tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	79,54%	
2019	94,15%	
2022	98,60%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	98,63%	99,13%
2030	98,67%	100,00%
2035	98,71%	100,00%
2040	98,76%	100,00%
2045	98,80%	100,00%



Rekomendasi :
Sasaran : Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya tercatat menjadi 100%
Strategi dan Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan infrastruktur pelayanan pencatatan sipil; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD : Disdukcapil

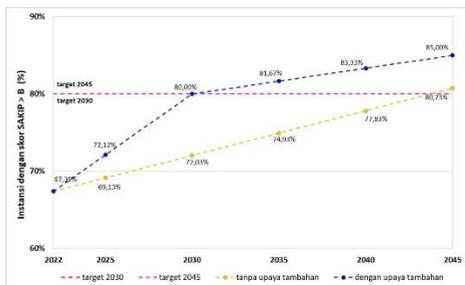
43) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Indikator TPB :	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) KL/L dan Pemda (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
Tujuan TPB :	
16 - Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 80% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 80% (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 instansi pemerintah dengan skor SAKIP > B mengalami peningkatan sebesar 0,58% per-tahun. Pada tahun 2022 instansi pemerintah dengan skor SAKIP > B tercatat sebesar 67,39% (mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) instansi pemerintah dengan skor SAKIP > B akan naik menjadi 72,03% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian naik menjadi 80,73% pada tahun 2045 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 80% (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,58% per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	68,52%	
2022	67,39%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	69,13%	72,12%
2030	72,03%	80,00%
2035	74,93%	81,67%
2040	77,83%	83,33%
2045	80,73%	85,00%



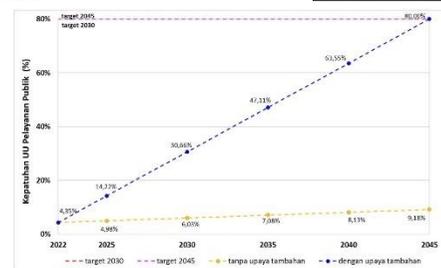
Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya instansi pemerintah dengan skor SAKIP > B menjadi 80%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; transparansi dan akuntabilitas; pengawasan dan pengendalian internal; pemberian penghargaan dan dukungan teknis; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Inspektorat

44) Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik

Indikator TPB :	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
Tujuan TPB :	
16 - Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 80% (Perpres 59/2017)
2045	: Meningkatkan menjadi 80% (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 - 2022 kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik mengalami peningkatan sebesar 0,21% per-tahun. Pada tahun 2022 kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik tercatat sebesar 4,35% (belum mencapai target Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik akan naik menjadi 6,03% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian naik menjadi 9,18% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 80% (Perpres 59/2017) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 3,29% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	N.A	
2019	3,70%	
2022	4,35%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	4,98%	14,22%
2030	6,03%	30,66%
2035	7,08%	47,11%
2040	8,13%	63,55%
2045	9,18%	80,00%



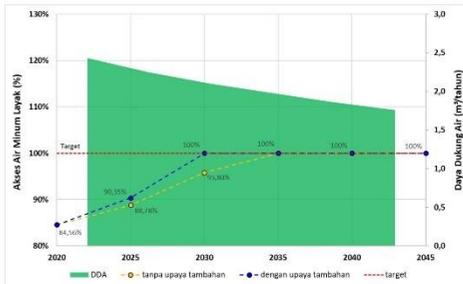
Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik menjadi 80%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan kerangka kebijakan dan regulasi; transparansi dan akuntabilitas; pengawasan dan pengendalian internal; pemberian penghargaan dan dukungan teknis; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: Setda

45) Akses terhadap layanan sumber air minum layak

Indikator TPB :	
1.4.1.(d) 6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Tujuan TPB :	
1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 100% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 100% (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capain Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami peningkatan sebesar 1,30% per-tahun. Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak tercatat sebesar 84,65% (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak akan meningkat menjadi 95,08% pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 111/2022) dan kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2034 (mencapai target Perpres 111/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk percepatan mencapai target indikator TPB sebesar 100% (Perpres 111/2022) pada tahun 2030 maka perlu ditetapkan target peningkatan sebesar 1,39% per-tahun pada periode 2025-2030.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	58,61%	
2019	74,33%	
2022	84,65%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	88,78%	90,35%
2030	95,80%	100%
2035	100%	100%
2040	100%	100%
2045	100%	100%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Meningkatkan akses air minum pada tahun 2045 menjadi 100%.
Strategi dan Arah Kebijakan	: Pembangunan infrastruktur air minum; Perlindungan sumber daya air; Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; Penggunaan teknologi informasi; Kolaborasi dengan stakeholder; Peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DPRKPLH

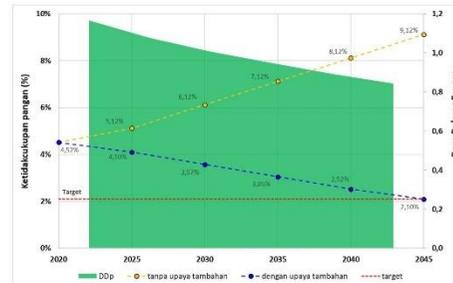
46) Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Indikator TPB :	
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment-POU</i>)
Tujuan TPB :	
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	
Target TPB :	
2030	: Menurun menjadi 3,6% (Roadmap SDGs 2030)
2045	: Menurun menjadi 2,10% (RPJPN 2025-2045)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capain Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan sebesar 0,2% per tahun. Pada tahun 2022 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tercatat sebesar 4,52% (belum mencapai target sesuai Perpres 111/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan akan naik menjadi 6,12% pada tahun 2030 (belum mencapai target Roadmap SDGs 2030) dan kemudian naik menjadi 9,12% pada tahun 2045 (belum mencapai target RPJPN 2025-2045), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 2,10% (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,11% per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N.A	
2015	2,52%	
2019	3,55%	
2022	4,52%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	5,12%	4,10%
2030	6,12%	3,57%
2035	7,12%	3,05%
2040	8,12%	2,52%
2045	9,12%	2,10%



Rekomendasi :	
Sasaran	: Menurunnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menjadi 2,10%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan ketahanan pangan; peningkatan produksi dan akses terhadap pangan; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DKPP

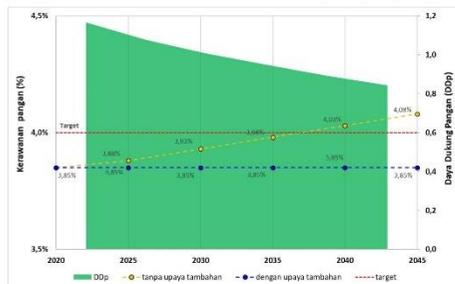
47) Kerawanan pangan

Indikator TPB :	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
Tujuan TPB :	
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	
Target TPB :	
2030	: Meningkatkan menjadi 4% (Perpres 111/2022)
2045	: Meningkatkan menjadi 4% (Perpres 111/2022)
Alternatif Skenario :	
Optimis	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 tingkat kerawanan pangan mengalami peningkatan sebesar 0,01% per-tahun. Pada tahun 2022 tingkat kerawanan pangan tercatat sebesar 3,85% (belum mencapai target sesuai Perpres 11/2022). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) tingkat kerawanan pangan akan naik menjadi 3,93% pada tahun 2030 (mencapai target Perpres 11/2022) dan kemudian naik menjadi 4,08% pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 11/2022), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario optimis, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 4% (Perpres 11/2022) pada periode 2025-2045, maka perlu ditetapkan target capaian adalah minimal mempertahankan capaian tahun 2022 (3,85%).

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N/A	
2015	N/A	
2019	3,82%	
2022	3,85%	
<i>Proyeksi</i>		
2025	3,88%	3,85%
2030	3,93%	3,85%
2035	3,98%	3,85%
2040	4,03%	3,85%
2045	4,08%	3,85%



Rekomendasi :

Sasaran	: Menurunkan prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat pada tahun 2045 menjadi 4%
Strategi dan Arah Kebijakan	: Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DKPP

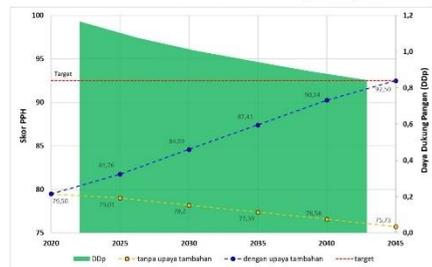
48) Kualitas konsumsi pangan

Indikator TPB :	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan (TKI)
Tujuan TPB :	
2 - Menghilangkan Kelaparan; Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik; serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	
Target TPB :	
2030	: PPH meningkat menjadi 92,5 (Perpres 59/2017)
2045	: PPH meningkat menjadi 92,5 (Perpres 59/2017)
Alternatif Skenario :	
Moderat	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :	

Berdasarkan data tahun 2012 – 2022 skor PPH mengalami penurunan sebesar 0,16 per-tahun. Pada tahun 2022 skor PPH tercatat sebesar 79,5 (belum mencapai target sesuai Perpres 59/2017). Berdasarkan proyeksi tanpa upaya tambahan (*business as usual*) skor PPH akan turun menjadi 78,2 pada tahun 2030 (belum mencapai target Perpres 59/2017) dan kemudian turun menjadi 75,73 pada tahun 2045 (belum mencapai target Perpres 59/2017), oleh karena itu perlu upaya tambahan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan dan skenario moderat, untuk mencapai target indikator TPB sebesar 92,5 (RPJPN 2025-2045) paling lambat pada tahun 2045 maka perlu ditetapkan target penurunan sebesar 0,57 per-tahun pada periode 2025-2045.

Tahun	Tanpa Usaha Tambahan	Dengan Usaha Tambahan
<i>Baseline</i>		
2012	N/A	
2015	89,1	
2019	89,5	
2022	79,5	
<i>Proyeksi</i>		
2025	79,01	81,76
2030	78,2	81,59
2035	77,39	87,41
2040	76,58	90,74
2045	75,73	92,50



Rekomendasi :

Sasaran	: Meningkatkan skor PPH mencapai 92,5 dan TKI menjadi 54,5 kg/kapita/tahun
Strategi dan Arah Kebijakan	: Penguatan pertumbuhan ekonomi; peningkatan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata kelola pemerintahan
OPD	: DKPP

Bab 7

Kesimpulan

- 1) Daya Dukung Daya Tampung Daerah
 - a) Daya dukung lahan permukiman
Daya dukung lahan permukiman (DDL_{Pm}) Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,5 yang berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk hingga ± 1.477.092 jiwa.
 - b) Daya dukung pangan
Daya dukung pangan (DDP_n) Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 1,17 yang berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi hingga ± 675.645 penduduk.
 - c) Daya dukung air
Daya dukung air (DDA) Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,43 yang berarti termasuk dalam kategori “sedang/bersyarat”.
- 2) Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - a) Indikator TPB yang relevan di Kabupaten Banjar terdiri dari 197 indikator TPB kewenangan kabupaten ditambah 1 indikator khas kabupaten (indikator 2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan)
 - b) Capaian TPB pilar Pembangunan Sosial
Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 57 indikator TPB (59,38%) mencapai

target, 36 indikator TPB (37,50%) belum mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 56 indikator TPB (58,33%) mencapai target, 37 indikator TPB (38,54%) belum mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 61 indikator TPB (63,54%) mencapai target, 32 indikator TPB (33,33%) belum mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) tidak/belum ada data.

c) Capaian TPB pilar Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 25 indikator TPB (50%) mencapai target, 16 indikator TPB (32%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 maupun 2045 terdapat sebanyak 23 indikator TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data.

d) Capaian TPB pilar Pembangunan Lingkungan

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 14 indikator TPB (45,16%) mencapai target, 11 indikator TPB (35,48%)

belum mencapai target dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 16 indikator TPB (51,61%) mencapai target, 9 indikator TPB (29,03%) belum mencapai target, dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 17 indikator TPB (54,84%) mencapai target, 8 indikator TPB (25,81%) belum mencapai target, dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum ada data.

e) Capaian TPB pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa dari 21 indikator TPB pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 17 indikator TPB (80,95%) mencapai target, 2 indikator TPB (9,52%) belum mencapai target, dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 16 indikator TPB (76,19%) mencapai target, 3 indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 17 indikator TPB (80,95%) mencapai target, 2 indikator TPB (9,52%) belum mencapai target, dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data.

- 3) Hasil Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan
- a) Peningkatan tata kelola pemerintahan
 - b) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar
 - c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
 - d) Peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim
 - e) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder
 - f) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

DAFTAR PUSTAKA

1. Bapellitbang. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025. Martapura: Bapellitbang; 2023.
2. BPS-Kabupaten-Banjar. Kabupaten Banjar Dalam Angka 2022. Martapura: BPS Kabupaten Banjar; 2023.
3. DLH-Provinsi-Kalimantan-Selatan. Penyusunan Materi Teknis Revisi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banjarbaru: DLH Provinsi Kalimantan Selatan; 2022.
4. Suparmoko M. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. 2020;9(1):39-500.
5. Pertiwi N. Implementasi sustainable development di Indonesia. Bandung: Pustaka Ramadhan; 2017.
6. Kuswartojo T. Agenda 21, GEF dan alih teknologi. *Jurnal Teknologi Lingkungan* 2002;3(3):174-9.
7. Sulistyastuti DR. Pembangunan pendidikan dan MDGs di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 2007;2(2):19-24.
8. Resti S. Transformasi agenda pembangunan global (MDGs-SDGs) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional* 2017;3(1):113-27.
9. Bappenas. Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/sustainable

- development goals (SDGs) Indonesia. Jakarta: Bappenas; 2017.
10. UCLG-ASPAC. Modul pelatihan melokalkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) untuk mendorong pelaksanaan dan pencapaian TPB oleh Pemerintah Daerah: Panduan bagi fasilitator. Jakarta: Sekretariat UCLG ASPAC; 2023.
 11. Widodo B, Ribut L, Donan W. KLHS untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. 2012;4(1):43-54.
 12. Audouin M, Govender K. Strategic environmental assessment: Integrated environmental management. Republic of South Africa: Department of Environmental Affairs and Tourism; 2004.
 13. Asdak C. Kajian lingkungan hidup strategis: Jalan menuju pembangunan berkelanjutan. Yogyakarta: UGM Press; 2018.
 14. Latue PC, Rakuasa H. Analisis spasial daya dukung lahan permukiman di Kota Ternate. *Jurnal JUKIM*. 2023;2(3):12-6.
 15. Sabila S. Daya dukung pangan dalam mendukung ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*. 2020;7(1).
 16. Huang CJ, Ho YH. Governance and economic growth in Asia. *The North American Journal of Economics and Finance*. 2017;39(100):260-72.
 17. Maabut, Adrianus, Katiandagho TM, Laoh OEH. Pemetaan wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*. 2016;12(2):87-94.

GLOSARIUM

SINGKATAN	PENJELASAN
ex-ante	KLHS dibuat sebelum KRP selesai dibuat atau ditentukan
ex-post	KLHS dibuat setelah KRP selesai dibuat atau ditentukan
mutantis mutandis	berlaku sama dalam hal pelaksanaan

PROFIL PENULIS

Dr. Andy Mizwar, S.T., M.Si.



Lahir di Banjarmasin, 7 Juli 1980. Menyelesaikan S-1 Teknik Lingkungan di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Yogyakarta tahun 2004. Melanjutkan S-2 di Program Magister Pengelolaan Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogya-

karta dan lulus tahun 2006. Memperoleh gelar Doktor dari Departemen Teknik Lingkungan ITS Surabaya pada tahun 2016. Sejak 2008 aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat. Bidang keahlian pengelolaan sampah dan limbah B3, dan Kajian Lingkungan. Aktif juga sebagai profesional tim penyusun Amdal pada LPJP PT. Hayuningrat Environmental Consultant.

Alamat korespondensi : andymizwar@ulm.ac.id

Dr.Eng. Maya Amalia, S.T., M.Eng..



Lahir di Banjarmasin, 03 Mei 1982. Menyelesaikan S-1 Teknik Sipil di Universitas Lambung Mangkurat tahun 2004. Melanjutkan S-2 di Program Magister Teknik Sipil UGM Yogyakarta dan lulus tahun 2011.

Memperoleh gelar Doktor Engineering dari Saga University Jepang pada tahun 2020. Sejak 2005 aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat. Bidang keahlian pengelolaan sumberdaya air khususnya irigasi dan bangunan air. Mulai tahun 2023 menduduki jabatan selaku Kepala Unit Penunjang Akademik Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat periode 2023-2027. Karya Buku yang telah diterbitkan yaitu Rekayasa Sungai pada tahun 2022.

Alamat korespondensi : m.amalia@ulm.ac.id

Muhammad Akbar, S.T., M.Ling.



Lahir di Kuala Kapuas pada 28 Agustus 1997. Penulis menempuh pendidikan dasar di MIN Selat Unit 2 Kapuas, sekolah menengah pertama di MTsN Selat Kapuas dan sekolah menengah atas di MAN Selat Kapuas.

Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan sarjana di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat dan pendidikan pascasarjana di Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Sejak tahun 2020 hingga sekarang penulis bekerja sebagai konsultan lingkungan di PT. Hayuningrat Environment Consultant.

Winaldy Rahman, S.T.



Lahir di Banjarbaru, 21 Mei 1996. Menyelesaikan Pendidikan di SDN Tibung Raya 1 tahun 2008, SMPN 1 Kandangan tahun 2011, dan SMAN 1 Kandangan tahun 2014. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Strata 1 tahun 2014 di Program Studi Teknik Lingkungan,

Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis merupakan staf di PT Geotenviro Teknindo Nusantara dan berperan aktif sebagai tenaga ahli di beberapa penyusunan Dokumen Lingkungan. Selain itu penulis juga beberapa kali terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Alamat korespondensi : winaldyrahman@gmail.com.

Ilman Sahbani, S.T., M.T.



Lahir di Banjarmasin, 5 Agustus 1994. Menyelesaikan S1 Teknik Lingkungan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) tahun 2017 dan S2 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2023.

Penulis merupakan staf di PT Jarank Sasat Tentknika

dan berperan aktif sebagai tenaga ahli di beberapa penyusunan Dokumen Lingkungan. Selain itu penulis juga beberapa kali terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Lenalda Febriany Santosa, S.T., M.T.



Penulis lahir di Banjarbaru, 14 Februari 1997. Lulus S-1 di Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru tahun 2020 dan lulus S-2 di Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2022.

Penulis merupakan staf di PT Hayuningrat Environment Consultant sejak 2023 hingga sekarang. Penulis terlibat dalam penyusunan beberapa dokumen KLHS pada beberapa kota/kabupaten lainnya.

SINOPSIS BUKU

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar 2025-2045 merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui analisis menyeluruh, buku ini menyoroti capaian dan tantangan pembangunan daerah selama periode RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025 dan memperkenalkan kerangka strategis untuk RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembahasan utama dalam buku ini mencakup analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045

juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi Kabupaten Banjar pada masa depan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Banjar 2025-2045

Melalui analisis menyeluruh, buku ini menyoroti capaian dan tantangan pembangunan daerah selama periode RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025 dan memperkenalkan kerangka strategis untuk RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembahasan utama dalam buku ini mencakup analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kesejah-teraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045 juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi Kabupaten Banjar pada masa depan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

